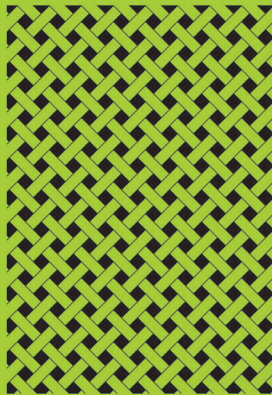


**Sufi
Ti Aisyah**

**Dampak Kebijakan Sertifikasi
Dosen Dalam Peningkatan Kinerja
Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas
Malikussaleh**



Editor: Ahmad Yani

UNIMAL PRESS

**Dampak Kebijakan Sertifikasi
Dosen Dalam Peningkatan Kinerja
Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas
Malikussaleh**



universitas
MALIKUSSALEH

**Sufi
Ti Aisyah**

**Dampak Kebijakan Sertifikasi Dosen Dalam
Peningkatan Kinerja Dosen di Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Malikussaleh**

Editor:
Ahmad Yani

UNIMAL PRESS

Judul: **Dampak Kebijakan Sertifikasi Dosen Dalam Peningkatan Kinerja Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh**

X + 150 hal., 15 cm x 23 cm

Cetakan Pertama: Mei, 2017

Hak Cipta © dilindungi Undang-undang. *All Rights Reserved*

Penulis:

Sufi

Ti Aisyah

Editor: Ahmad Yani

Penata Letak: Eriyanto

Pracetak dan Produksi: **Unimal Press**

Penerbit:

UNIMAL PRESS

Unimal Press

Jl. Sulawesi No.1-2

Kampus Bukit Indah Lhokseumawe 24351

PO.Box. 141. Telp. 0645-41373. Fax. 0645-44450

Laman: www.unimal.ac.id/unimalpress.

Email: unimalpress@gmail.com

ISBN:

978-602-1373-87-3

Dilarang keras memfotocopy atau memperbanyak sebahagian atau seluruh buku ini tanpa seizin tertulis dari Penerbit

Kata Pengantar

Asslamualaikum Wr.Wb, Tiada kata yang patut dan yang indah diucapkan terkecuali “Puji Syukur Alhamdulillah” kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat, taufik dan hidayahnya penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis : Dampak Kebijakan Sertifikasi Dosen Dalam Peningkatan Kinerja Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.

Karya Ilmiah (Tesis) ini merupakan salah satu syarat untuk dapat dinyatakan lulus dari program studi Magister Administrasi Publik di STIA_LAN Bandung.

Tidak ada perjuangan dan pengorbanan yang sia-sia yang dilakukan oleh seorang manusia, terutama sekali di bidang Pendidikan, sampai Allah SWT, mengangkat harkat martabat umat manusia yang bersungguh dalam menuntut ilmu, sehingga penulis menyadari semua hal itu. Untuk itu penulis berterima kasih kepada:

1. Prof .Dr .H. Deddy Mulyadi, M.Si selaku Pembimbing pertama.
2. Dr. Hj.Sintaningrum MT, selaku Pembimbing kedua.

Semoga Allah membalas semua kebaikan beliau selama dalam membimbing penulis, hingga terselesaikanya penelitian ini.

Pada kesempatan yang sama ini penulis juga mengucapkan terima kasih serta mengdedikasikan karya ilmiah(Tesis) ini kepada :

- 1) Alm. Hj.Salihati Saleh, selaku orang tua penulis yang sudah berpulang kerahmatullah. Semoga Allah mengampuni beliau Amin Ya Allah.
- 2) H. Djafar Hamzah selaku orang tua penulis, semoga beliau sehat wall aflat dan dalam lindungan Allah SWT.
- 3) Rizgia Irwan Yahya Abu selaku istri penulis yang telah bersabar serta mendampingi penulis sampai terlaksananya tesis ini.

- 4) (Alm) Irwan Yahya Abu serta (Alm) RizQan Yahya Abu, selaku ayah mertua penulis dan abang ipar penulis, semoga di ampuni segala dosanya Amin....
- 5) Arti Andayani selaku mamak mertua penulis dan Riz Kelana selaku abang ipar penulis.
- 6) Azis, Kak Ifayanti A.md, serta Bripka Efin selaku saudara-saudara penulis.
- 7) Almuhadi, Muhammad Ibno, Hendrik Novianto, Nanda Saputra, Zaki Al Fuad, Herwandi, A.Razak, Nazar, Muryali, Muhammad Ali S,Ag., M.Si., Ahmad Yani, Kak Maryam, teman-teman penulis di konsentrasi Manajemen Kebijakan Publik STIA-LAN Bandung, serta teman-teman penulis yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu.
- 8) Pak Asep, Pak Dino, serta Pak Zai, Pak Hendrikus selaku dosen PA penulis di STIA –LAN Bandung.
- 9) Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis sehingga terselesaikan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa substansi maupun metode penelitian tesis ini masih jauh dari yang diharapkan, karenanya kritik dan saran demi kesempurnaan tesis ini dapat memperbaiki segala kekurangannya, Amin.....

Penulis

Sufi
Ti Aisyah

Abstrak

Universitas Malikusaleh (Unimal) dalam meningkatkan mutu dan kualitas Pendidikan melaksanakan kebijakan pemerintah melalui pelaksanaan sertifikasi dosen yang di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi di Unimal. Fokus penelitian adalah: Sertifikasi Dosen Berdampak Terhadap Peningkatan Tri Dharma di FISIP Unimal. Hambatan Dalam Pelaksanaan Tri Dharma di FISIP Unimal. Serta upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Tri Dharma di FISIP Unimal. Tujuan Penelitian adalah Ingin mengetahui dampak Sertifikasi Dosen terhadap pelaksanaan kegiatan Tri dharma Perguruan Tinggi di FISIP Unimal. Ingin mengetahui hambatan dari Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di FISIP Unimal. Serta upaya penyelesaian hambatan tri dharma perguruan tinggi.

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi secara langsung, wawancara dengan Pimpinan Fakultas ISIP Unimal dan dosen FISIP serta Dokumentasi. Teknik Verifikasi Data dengan *Triangulation of data* (melakukan pelacakan sumber data), *Member cheking* (melakukan pengecekan ulang terhadap anggota informan), *Clarification of research bias* (klarifikasi dari peneliti yang bias terutama yang berhubungan dengan fokus kajian).

Hasil Penelitian menunjukkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kebijakan Sertifikasi Dosen di FISIP Unimal, tidak terlalu berdampak positif terhadap kinerja dosen, ini bisa dilihat dari aspek pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Hambatan Pelaksanaan Tri Dharma di FISIP Unimal yaitu Rendahnya kesadaran dosen dalam mengajar, seperti masih ada dosen FISIP Unimal yang tidak konsisten atau tidak disiplin dalam pengajaran. Kurangnya minat penelitian maupun pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh

sebagian dosen FISIP Universitas Malikussaleh, ada sebagian dosen yang hanya mengajar saja, sehingga tidak tertarik atau terlibat dalam berbagai hal pengabdian kepada masyarakat. Selain itu juga kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan perkuliahan di FISIP Universitas Malikussaleh.

3. Upaya dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan tri Dharma Pimpinan Fakultas maupun Universitas masih kurang responsive terhadap mengatasi hambatan tersebut sehingga upaya yang selama ini dilakukan belum berdampak pada perbaikan kondisi yang lebih baik.

Berdasarkan temuan hasil penelitian, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Diharapkan dengan bertambah jumlah dosen tersertifikasi di FISIP Unimal, maka adanya suatu perubahan kearah yang lebih baik seperti peningkatan kinerja kemampuan profesionalisme dosen dalam pelaksanaan pencapaian Tri Dharma Perguruan Tinggi, baik dalam pengajaran, penelitian maupun pengabdian masyarakat.
2. Dalam penyelesaian hambatan Tri dharma di Fisip Unimal, Perlu adanya usaha peningkatan kedisiplinan dosen dalam melaksanakan Tri Dharma di FISIP Unimal. Selain itu juga perlu dievaluasi dan laporan secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada Pimpinan Universitas baik ditingkat Rektor maupun Dekan. Perlu adanya penyediaan berbagai informasi maupun jumlah dana penelitian, sehingga dosen tertarik melaksanakan penelitian serta pengabdian masyarakat. Perlu disempurnakan atau dilengkapi dengan saran dan prasarana di fakultas ISIP Universitas Malikussaleh
3. Upaya dalam mengatasi hambatan tersebut melalui keseriusan dari seluruh komponen civitas akademika terutama pimpinan Fakultas ISIP Unimal, untuk menindak secara tegas dosen yang tidak disiplin mengajar, selain itu pimpinan fakultas juga harus proaktif mencari peluang untuk

dosen melakukan penelitian, seperti penyediaan dana atau hibah penelitian selain dari Dikti.

PENGANTAR EDITOR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT dan seulawat beserta salam kita atur kepada nabi Muhammad SAW. Sehingga penyusunan buku dengan judul Dampak Kebijakan Sertifikat Dosen dalam Peningkatan Kinerja Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh dapat diselesaikan.

Penyusun telah berusaha menampilkan buku ini dalam kondisi yang terbaik dan secepat mungkin, namun karena keterbatasan dan kelemahan yang ada, pasti terbuka kemungkinan kesalahan. Untuk itu penyusun mengharap masukan positif dari semua pihak untuk perbaikan buku ini.

Dengan penuh kerendahan hati, penyusun menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang langsung maupun tidak langsung, turut andil dan memotivasi penyelesaian buku.

Akhirnya, semoga buku referensi ini membawa manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Amin.

Editor,

Ahmad Yani

Daftar Isi

| | |
|--|-----|
| Kata Pengantar | v |
| Abstrak..... | vii |
| Daftar Isi..... | xi |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Penelitian | 1 |
| B. Fokus Penelitian..... | 4 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 5 |
| BAB II. KERANGKA TEORITIS | 7 |
| A. Tinjauan Teoritis..... | 7 |
| 1. Kebijakan Publik | 7 |
| <i>a. Pengertian dan konsep Kebijakan Publik</i> | 7 |
| 1) Tahap-tahap Kebijakan..... | 10 |
| a) Penyusunan Agenda..... | 10 |
| b) Implementasi Kebijakan..... | 11 |
| c) Evaluasi Kebijakan..... | 15 |
| <i>b. Evaluasi Kebijakan dan Dampak (impact)</i> <i>Kebijakan Publik serta Penilaiannya</i> | 27 |
| <i>c. Konsep Manajemen Mutu</i> | 32 |
| 2. Sertifikasi Dosen..... | 34 |
| <i>a. Pengertian dan Konsep Sertifikasi Dosen</i> | 34 |
| <i>b. Dasar Hukum Sertifikasi</i> | 39 |
| <i>c. Tujuan serta Sasaran Sertifikasi Dosen</i> | 40 |
| <i>d. Prosedur dan Syarat Sertifikasi Dosen</i> | 40 |
| B. Model Konseptual..... | 45 |
| C. Pertanyaan Penelitian..... | 46 |
| BAB III. METODE PENELITIAN | 47 |
| A. Pendekatan Penelitian..... | 47 |

| | | |
|----------------|---|------------|
| B. | Informan Penelitian | 50 |
| C. | Teknik dan Instrumental Pengumpulan Data..... | 51 |
| 1. | Teknik Pengumpulan Data..... | 51 |
| 2. | Observasi Langsung..... | 52 |
| 3. | Wawancara Secara Mendalam (<i>In Depth Interview</i>)..... | 52 |
| 4. | Kajian Dokumentasi..... | 53 |
| D. | Teknik Verifikasi data..... | 53 |
| E. | Prosedur Pengelolaan dan Analisis Data | 54 |
| BAB IV. | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 57 |
| A. | Lokus Penelitian..... | 57 |
| a. | Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh..... | 60 |
| b. | Struktur Organisasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh..... | 63 |
| c. | Tenaga Pendidik..... | 66 |
| d. | Mahasiswa | 66 |
| e. | Alumni | 67 |
| f. | Rasio Dosen, Pegawai dan Mahasiswa..... | 67 |
| g. | Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat..... | 68 |
| h. | Sarana dan Prasarana | 69 |
| B. | Hasil Penelitian..... | 69 |
| C. | Pembahasan | 98 |
| BAB V. | PENUTUP | 132 |
| A. | Kesimpulan..... | 132 |
| B. | Saran | 133 |
| Lampiran 1 | | 138 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sertifikasi Dosen adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada dosen. Program ini merupakan upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional dan memperbaiki kesejahteraan dosen, dengan mendorong dosen untuk secara berkelanjutan meningkatkan profesionalismenya, (Peraturan Pemerintah Nomor .37 tahun 2009 tentang dosen).

Sertifikat pendidik yang diberikan kepada dosen melalui proses sertifikasi adalah bukti formal pengakuan terhadap dosen sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi. Sertifikasi dosen merupakan program yang dijalankan berdasar Peraturan Permendiknas RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Permendiknas No 37 Tahun 2009, tentang Dosen Bab II, Pasal 2).

Prinsip Sertifikasi Dosen antara lain sebagai berikut, sesuai dengan Permendiknas No 47 Tahun 2009 : Dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel Objektif yaitu mengacu kepada proses perolehan sertifikat pendidik yang impartial, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar pendidikan nasional. Berujung

pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan mutu dosen dan kesejahteraan dosen. Sertifikasi dosen merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan mutu dosen yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan dosen. Dosen yang telah lulus uji sertifikasi akan diberi tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok sebagai bentuk upaya Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dosen.

Tunjangan tersebut berlaku, baik bagi dosen yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun bagi dosen yang berstatus non-pegawai negeri sipil (non PNS/swasta). Dengan peningkatan mutu dan kesejahteraan dosen maka diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Sertifikasi dosen merupakan penjelmaan dari sebuah konsep penyempurnaan pelaksanaan pendidikan nasional di Perguruan Tinggi, yang akan meningkatkan kualitas maupun mutu pendidikan khususnya di Perguruan tinggi.

Bersamaan dengan itu juga Universitas Malikusaleh dalam meningkatkan mutu dan kualitas Pendidikannya juga melaksanakan kebijakan dari pemerintah melalui pelaksanaan sertifikasi bagi para dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam melaksanakan tugas mengajar bagi dosen sebagai jabatan profesionalisme guna mendukung penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Malikussaleh.

Dalam pelaksanaan Sertifikasi Dosen, ada berbagai indikator-indikator pelaksanaannya yang berhubungan dengan Tridarma Perguruan Tinggi, diantaranya: Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat. Selain itu juga dampak pelaksanaan sertifikasi dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam hal ini Mahasiswa untuk menyerap ilmu pengetahuan terutama di Civitas Akademika FISIP Universitas Malikussaleh.

Kebijakan Sertifikasi Dosen sudah berjalan sejak di tetapkan pada tahun 2008, banyak hal yang dijumpai dalam pelaksanaanya. Berdasarkan data dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, jumlah dosen yang sudah bersertifikasi berjumlah 37orang, dapat dilihat dari data berikut:

Tabel I.1
JumlahDosenSertifikasi di Universitas Malikussaleh

| No | Fakultas | Jumlah |
|--------|------------|-----------|
| 1. | Fisip | 37 orang |
| 2. | Hukum | 36 orang |
| 3. | Ekonomi | 40 orang |
| 4. | Pertanian | 38 orang |
| 5. | Teknik | 45 orang |
| 6. | Kedokteran | 26 orang |
| Jumlah | | 222 orang |

Sumber: BAAK Universitas Malikussaleh, 2013

Banyaknya dosen yang telah memiliki setifikasi belumberdampak pada peningkatan profesionalisme Dosen di FISIP Universitas Malikussaleh, dalam peningkatan kemampuan lulusan atau kualitas mahasiswa dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Ini bisa dilihat dari nilai-nilai yang diterima mahasiswa FISIP ditiap semester masih rendah, demikian pula prestasi yang dicapai dalam setiap kegiatan perlombaanbaik ditingkat Nasional maupun Internasional masih jarang.

Berdasarkan pengamatan penulis, 37 dosen khususnya di FISIP Unimal sudah bersertifikasi,namun bila dilihat dari segi profesionalime dosen dalam melaksanakan pembelajar,penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat masih kurang. Seperti masih ada dosen yang mengajar kepada mahasiswa masih menggunakan Satuan

Ajaran Pembelajaran (SAP) yang tidak *up to date* dengan kondisi sekarang, selain itu masih rendahnya partisipasi dosen yang ikut serta dalam berbagai penulisan karya ilmiah baik di Jurnal Nasional maupun Opini di surat kabar lokal maupun nasional.

Selain itu juga masih ada sebagian dosen yang melaksanakan tugas mengajarnya hanya sebatas tuntutan tugas jam ngajar saja, tidak dijiwai pada nilai kebersamaan dan menjadikan mahasiswa itu sebagai mitra dosen dalam mengajar di ruangannya sehingga belum mampu menciptakan kondisi yang padu antara mahasiswa dengan dosen di ruangan.

Dari berbagai Permasalahan yang penulis temukan di lapangan, sangat bertolak belakang dengan aturan atau kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah melalui Peraturan Mendiknas RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen. Dari Permendiknas dijelaskan bahwa pemberian sertifikasi kepada dosen bertujuan untuk meningkatkan Kompetensi dan kualitas dosen dalam melaksanakan tugas profesionalismenya kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat mengerti, memahami serta meningkatkan kemampuan yang kompetitif di bidang ilmu pengetahuan.

Ini merupakan kondisi yang sedang terjadi terutama di FISIP Universitas Malikussaleh, terhadap sebagian dosen yang belum maksimal dalam peningkatan Profesionalisme khususnya pada proses belajar mengajar (Tri Dharma Perguruan Tinggi), karenanya penulis tertarik untuk meneliti dalam karya ilmiah (tesis) yang berjudul: Evaluasi Kebijakan Sertifikasi Terhadap Kinerja Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.

B. Fokus Penelitian

1. Apakah Kebijakan Sertifikasi Dosen mampu memberikan dampak terhadap peningkatan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.

2. Apa Hambatan Dalam Pelaksanaan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi di FISIP Universitas Malikussaleh.
3. Apa upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di FISIP Universitas Malikussaleh.

C. Tujuan Penelitian

1. Ingin mengetahui Dampak Kebijakan Sertifikasi Dosen terhadap kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi (Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) di FISIP Unimal.
2. Ingin mengetahui hambatan dari Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di FISIP Unimal.
3. Ingin mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di FISIP Universitas Malikussaleh.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan serta pemikiran ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Konsep Sertifikasi dosen.
2. Menjadi acuan referensi bagi peneliti selanjutnya terhadap fokus kajian yang hampir sama.



BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian dan konsep Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan terjemahan dari kata *policy* yang berasal dari bahasa Inggris. Kata *policy* diartikan sebagai sebuah rencana kegiatan atau pernyataan mengenai tujuan-tujuan, yang diajukan atau diadopsi oleh suatu pemerintahan, partai politik, dan lain-lain. Kebijakan juga diartikan sebagai pernyataan-pernyataan mengenai kontrak penjaminan atau pernyataan tertulis. Pengertian ini mengandung arti bahwa yang disebut kebijakan adalah mengenai suatu rencana, pernyataan tujuan, kontrak penjaminan dan pernyataan tertulis baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, partai politik, dan lain-lain. Dengan demikian siapapun dapat terkait dalam suatu kebijakan (Parson, 2006:7)

James E. Anderson (1988:350) memberikan pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Pengertian ini memberikan pemahaman bahwa kebijakan dapat berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang berisi serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku dalam rangka memecahkan suatu masalah tertentu.

James E. Anderson (1988:350) secara lebih jelas menyatakan bahwa yang dimaksud kebijakan adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Pengertian ini, menurutnya, berimplikasi: (1) bahwa kebijakan selalu

mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan, (2) bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah, (3) bahwa kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, (4) bahwa kebijakan bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu, (5) bahwa kebijakan, dalam arti positif, didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif).

Dalam pengertian ini, James E. (1988:350) Anderson menyatakan bahwa kebijakan selalu terkait dengan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Pernyataan bahwa kebijakan terkait dengan pemerintah tidak hanya disampaikan oleh James E. Anderson. George A (1980 :87). mengemukakan pengertian kebijakan sebagai apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan itu dapat berupa sasaran atau tujuan dari program-program pemerintah. Penetapan kebijakan tersebut dapat secara jelas diwujudkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam pidato-pidato pejabat teras pemerintah serta program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.

Pengertian serupa juga dikemukakan oleh Thomas R. Dye (1976: 654). Ia menyatakan bahwa kebijakan merupakan apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dalam mendudukan pengertian kebijakan, James Anderson mencontohkan penggunaan istilah *kebijakan* seperti dalam kalimat “Kebijakan Ekonomi Amerika”, “Kebijakan Minyak Arab Saudi”, atau “Kebijakan Pertanian Eropa Barat”. Menurutnya, istilah *kebijakan* dapat juga digunakan untuk istilah yang lebih spesifik dalam arti tidak hanya dilekatkan untuk penggunaan dalam lingkup makro (baca: negara). Contoh yang dikemukakan James E. Anderson seperti

pada penggunaan dalam kalimat “Kebijakan Kota Chicago dalam Polusi di Danau Michigan dari Milwaukee, Wisconsin”.

Pengertian lain mengenai kebijakan dikemukakan oleh Asmawi (2010 :76). Ia memberikan pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Kebijakan yang dikemukakan oleh Irfan Islamy (2001;14) ini mencakup tindakan-tindakan yang ditetapkan pemerintah. Kebijakan ini tidak cukup hanya ditetapkan tetapi dilaksanakan dalam bentuk nyata. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut juga harus dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu. Terakhir, pengertian Irfan Islamy meniscayakan adanya kepentingan bagi seluruh masyarakat yang harus dipenuhi oleh suatu kebijakan dari pemerintah.

James Anderson menyatakan adanya keharusan untuk membedakan antara apa yang ingin dilaksanakan pemerintah dengan apa yang sebenarnya mereka lakukan di lapangan. Hal ini menjadi penting karena kebijakan bukan hanya sebuah keputusan sederhana untuk memutuskan sesuatu dalam suatu momen tertentu, namun kebijakan harus dilihat sebagai sebuah proses. Untuk itulah pengertian kebijakan sebagai suatu arah tindakan dapat dipahami secara lebih baik bila konsep ini dirinci menjadi beberapa kategori. Kategori-kategori itu antara lain adalah tuntutan-tuntutan kebijakan (*policy demands*), keputusan-keputusan kebijakan (*policy decisions*), pernyataan-pernyataan kebijakan (*policy statements*), hasil-hasil kebijakan (*policy outputs*), dan dampak-dampak kebijakan (*policy outcomes*), James Anderson

Tuntutan-tuntutan kebijakan adalah tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh aktor-aktor swasta atau pemerintah, ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah dalam suatu sistem politik. Keputusan

kebijakan dipengertiankan sebagai keputusan-keputusan yang dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintah yang mengesahkan atau memberi arah dan substansi kepada tindakan-tindakan kebijakan publik. Sedangkan pernyataan-pernyataan kebijakan adalah pernyataan-pernyataan resmi atau artikulasi-artikulasi kebijakan publik. Hasil-hasil kebijakan lebih merujuk pada manifestasi nyata dari kebijakan, yaitu hal-hal yang sebenarnya dilakukan menurut keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan kebijakan. Adapun dampak-dampak kebijakan lebih merujuk pada akibat-akibatnya bagi masyarakat, baik yang diinginkan atau tidak diinginkan yang berasal dari tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah.

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang menjadi keputusan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertujuan untuk memecahkan masalah demi kepentingan masyarakat, Duun (2004:543).

1) Tahap-tahap Kebijakan

Dalam pembuatan kebijakan terdapat tahap-tahap yang harus dilewati agar suatu kebijakan dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik. Kebijakan yang dimunculkan sebagai sebuah keputusan terlebih dahulu melewati beberapa tahap penting. Tahap-tahap penting tersebut sangat diperlukan sebagai upaya melahirkan kebijakan yang baik dan dapat diterima sebagai sebuah keputusan. Tahap-tahap dalam kebijakan tersebut yaitu:

a) Penyusunan Agenda

Sebelum kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan, pembuat kebijakan perlu menyusun agenda dengan memasukkan dan memilih masalah-masalah mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas. Masalah-masalah yang terkait dengan kebijakan akan dikumpulkan sebanyak mungkin untuk diseleksi. Pada tahap ini beberapa masalah dimasukkan dalam agenda untuk dipilih.

Terdapat masalah yang ditetapkan sebagai fokus pembahasan, masalah yang mungkin ditunda pembahasannya, atau mungkin tidak disentuh sama sekali. Masing-masing masalah yang dimasukkan atau tidak dimasukkan dalam agenda memiliki argumentasi masing-masing. Pihak-pihak yang terlibat dalam tahap penyusunan agenda harus secara jeli melihat masalah-masalah mana saja yang memiliki tingkat relevansi tinggi dengan masalah kebijakan. Sehingga pemilihan dapat menemukan masalah kebijakan yang tepat.

Masalah yang sudah dimasukkan dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh pembuat kebijakan dalam tahap formulasi kebijakan. Dari berbagai masalah yang ada tersebut ditentukan masalah mana yang merupakan masalah yang benar-benar layak dijadikan fokus pembahasan. Dari sekian banyak alternatif yang ditawarkan, pada akhirnya akan diadopsi satu alternatif pemecahan yang disepakati untuk digunakan sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Tahap ini sering disebut juga dengan tahap legitimasi kebijakan (*policy legitimation*) yaitu kebijakan yang telah mendapatkan legitimasi. Masalah yang telah dijadikan sebagai fokus pembahasan memperoleh solusi pemecahan berupa kebijakan yang nantinya akan diimplementasikan, Dunn (2004:244).

b) Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik merupakan bagian pelaksanaan program dalam suatu proses kebijakan. Tanpa adanya implementasi, maka suatu program kebijakan akan nampak sebagai produk yang sia-sia.

Menurut lester dan Stewart (Winarno:2010) mengungkapkan bahwa implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai actor, organisasi, prosedur, dan teknik berkerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Selain itu untuk menggambarkan kerumitan

dalam proses implementasi kebijakan, Eugene Bardach (Agustino:2012) menyebutkan :

“Adalah cukup untuk membuat program dan kebijakan umum untuk kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit bagi merumuskannya bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Lebih sulit lagi untuk melaksanakan dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien”.

Edward III (Sentosa:2009) juga mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan adalah: *“Is the of policy making between the esthablishment of policy”* (tahapan dari pembuatan/perumusan kebijakan diantara penegakan keadilan).

Implementasi kebijakan merupakan sebuah tahapan yang paling penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, hal ini dikarenakan prosedur proses kebijakan bisa dinilai tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan, seperti dikatakan oleh Chief j.O Udoji (Agustino :2012) menyebutkan :

“Pelaksanaan kebijakan adalah suatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip klu tidak diimplementasikan”

Dalam kaitan dengan pengelolaan kepentingan publik menurut pandangan Shafritz dan Russel (Sentosa:2009) menyebutkan bahwa:

“Implementasi is the process of putting a government program into effects; it the total process of translating a legal mandate, whetever an executive order or an anacted statute into appropriate program directives and stractures that provide service or creative goods”. (implementasi adalah proses menempatkan sebuah program pemerintah kedalam suatu

efek, dan merupakan proses total dalam menerjemahkan sebuah mandat hukum, appun perintah eksekutif atau undang-undang ditetapkan menjadi arahan program yang sesuai dan struktur dal menyediakan jasa maupun barang kreatif).

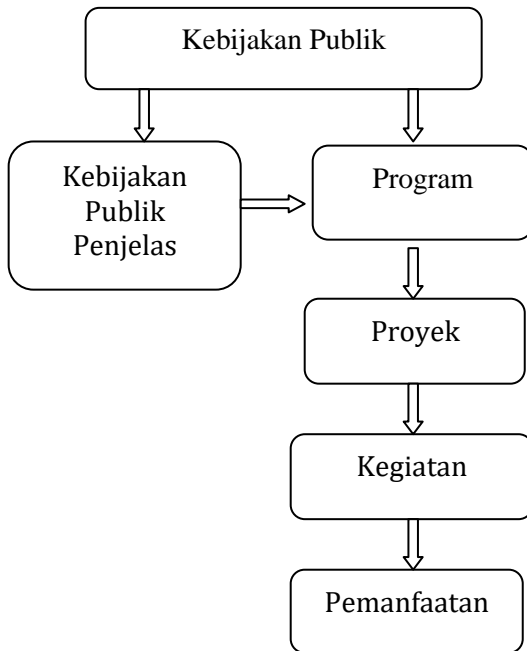
Implementasi kebijakan merupakan salah satu bagian dari kajian kebijakan publik, hal ini dikarenakan dapat memberikan informasi kepada pemerintah maupun masyarakat dalam memahami suatu program pemerintah dimaksud apakah berjalan sebagaimana messtinya. Sebagaimana diungkapkan oleh mazmanian dan Sabatier (Sentosa :2009):

“Implementation is carrying out of basic decion, usually incorporated in statute but which can also take the form important excutive orders or court decision. Ideally that decisions indentifies the problem (s) to be addressed, stimulate (s) to be pursued, and, in a variety of ways,-structures-the implementation process normally runs through a number of stages beginning with passage of the besic statute, followed by the policy outputs, the perceived impacts of agency decions, and finally, important revisions for attempted revisions in the basic statute” (pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut menginentifikasikan masalah yang ingin capai, dan berbagai cara untuk mengstruktur/mengatur proses implementasinya).

Proses implementasi berlangsungsetelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan badan instansi pelaksanaan, kesediaan

dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata baik yang dikehendaki atau yang tidak dari output tersebut, dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap undang undang/peraturan yang bersangkutan.

Menurut Nugroho (2012:647) Implementasi pada prinsipnya adalah “cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan, tidak kurang tidak lebih ” untuk implementasi kebijakan publik , menurutnya ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung, mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau formulasi kebijakan devirat atau turunan dan kebijakan publik. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Alur Implementasi kebijakan

Dengan demikian, implementasi kebijakan mengandung arti bahwa proses untuk menerapkan dan menjalankan seluruh kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah dengan memperhatikan beberapa kajian dan standar ukuran yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c) Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini, kebijakan yang telah dilaksanakan akan dievaluasi, untuk dilihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah atau tidak. Pada tahap ini, ditentukan kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan telah meraih hasil yang diinginkan. Pada tahap ini, penilaian tidak hanya menilai implementasi dari kebijakan. Namun lebih jauh, penilaian ini akan menentukan perubahan terhadap kebijakan. Suatu kebijakan dapat tetap seperti semula, diubah atau dihilangkan sama sekali.

Analisis kebijakan merupakan penelitian sosial terapan yang secara sistematis disusun dalam rangka mengetahui substansi dari kebijakan agar dapat diketahui secara jelas informasi mengenai masalah-masalah yang dijawab oleh kebijakan dan masalah-masalah yang mungkin timbul sebagai akibat dari penerapan kebijakan. Ruang lingkup dan metode analisis kebijakan umumnya bersifat deskriptif dan faktual mengenai sebab-sebab dan akibat-akibat suatu kebijakan.

Penelitian kebijakan sedapat mungkin melihat berbagai aspek dari kebijakan agar dapat menghasilkan informasi yang lengkap. Informasi mengenai masalah-masalah yang dijawab oleh kebijakan serta masalah-masalah yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan menjadi fokus dari analisis kebijakan.

Sudarwan Danim (2003:24) menyatakan bahwa proses penelitian kebijakan pada hakikatnya merupakan penelitian yang dimaksudkan guna melahirkan rekomendasi untuk pembuat

kebijakan dalam rangka pemecahan masalah sosial. Kegiatan penelitian ini dilakukan untuk mendukung kebijakan. Sudarwan Danim secara jelas menyatakan hasil yang ingin dicapai dari penelitian kebijakan yaitu menghasilkan rekomendasi yang mungkin diperlukan pembuat kebijakan dalam rangka pemberian solusi terhadap masalah-masalah sosial.

Selain itu, penelitian kebijakan perlu dipahami sebagai bentuk dukungan kepada kebijakan itu sendiri. Rekomendasi yang dihasilkan dari proses penelitian kebijakan dapat berupa dukungan penuh terhadap kebijakan, kritik dan saran mengenai bagian mana dari kebijakan yang perlu diperbaiki, atau dapat juga berupa rekomendasi agar kebijakan tidak lagi diterapkan.

Karakteristik dari penelitian kebijakan secara terperinci dijelaskan oleh Allen D. Putt dan J. Fred Springer. Mereka menyatakan bahwa penelitian kebijakan dicirikan sebagai penelitian yang terfokus pada manusia, plural, multi-perspektif, sistematis, berhubungan dengan keputusan, dan kreatif. Penelitian mengenai kebijakan berkaitan erat dengan manusia dan permasalahannya.

Hasil yang ingin dicapai dari penelitian kebijakan yaitu mengenai informasi yang diformulasikan dalam bentuk rekomendasi dalam rangka pemecahan masalah yang terkait dengan kebijakan. Karakteristik plural dari penelitian kebijakan berasal dari hubungan penelitian dengan manusia. Penelitian kebijakan tidak dapat dipisahkan dari konflik nilai dan kepentingan terdapat dari interaksi manusia.

Informasi yang diformulasikan dalam bentuk rekomendasi sebagai hasil yang ingin dicapai oleh penelitian kebijakan mengharuskan adanya pendekatan yang menyeluruh sehingga informasi yang dihasilkan juga dapat berupa rekomendasi yang sesuai dengan kondisi yang ada. Sebagai sebuah penelitian, penelitian kebijakan harus secara sistematis disusun berdasarkan prosedur penelitian sebagai upaya untuk memperoleh informasi

terkait dengan kebijakan. Penelitian kebijakan selalu terkait dengan keputusan.

Keputusan yang dihasilkan berasal dari rekomendasi yang disampaikan. Keputusan dapat berupa keputusan untuk tetap melanjutkan kebijakan, keputusan untuk memperbaiki kebijakan atau keputusan untuk menghapus atau tidak melanjutkan kebijakan. Informasi yang berkaitan dengan kebijakan berupa masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan, dan kinerja kebijakan. Analisis kebijakan menggabungkan lima prosedur umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah manusia, yaitu: definisi, prediksi, preskripsi, deskripsi dan evaluasi. Masing-masing dari informasi kebijakan berkaitan dengan prosedur kebijakan.

Analisis kebijakan dapat dilaksanakan dengan beberapa bentuk. Menurut Dunn terdapat tiga bentuk analisis kebijakan, yaitu:

1. Analisis kebijakan prospektif

Analisis kebijakan prospektif adalah analisis kebijakan yang mengarahkan kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan sebelum suatu kebijakan diterapkan. Model ini dapat disebut sebagai model prediktif.

2. Analisis kebijakan retrospektif

Analisis kebijakan retrospektif adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan setelah suatu kebijakan diimplementasikan. Model ini biasanya disebut sebagai model evaluatif.

3. Analisis kebijakan integratif

Analisis kebijakan integratif adalah bentuk perpaduan antara analisis kebijakan prospektif dan analisis kebijakan retrospektif.

Bentuk analisis kebijakan prospektif memiliki kelemahan karena hanya berfokus pada analisis kebijakan yang mengarahkan perhatian pada konsekuensi kebijakan sebelum kebijakan diterapkan. Pun dengan bentuk analisis kebijakan retrospektif yang

hanya memfokuskan kajiannya pada konsekuensi kebijakan setelah kebijakan diterapkan. Maka analisis kebijakan seharusnya menggunakan bentuk kebijakan integratif, yaitu dengan memadukan antara analisis kebijakan prospektif dan analisis kebijakan retrospektif.

Pada umumnya, analisis kebijakan memfokuskan kajiannya pada tiga hal. Ketiga fokus tersebut merupakan pijakan yang dipedomani dalam melakukan analisis kebijakan. Tiga fokus tersebut, yaitu:

1. Definisi masalah sosial
2. Implementasi kebijakan
3. Akibat-akibat kebijakan

Dengan memfokuskan kajian pada ketiga hal diatas, proses analisis kebijakan akan berusaha mendefinisikan secara jelas permasalahan yang akan menjadi fokus kajian untuk ditanggulangi oleh kebijakan. Setelah masalah yang menjadi fokus kajian analisis kebijakan ditentukan, analisis kebijakan bertugas menentukan kebijakan yang sesuai dengan masalah sehingga masalah dapat dipecahkan dengan baik.

Kebijakan yang telah ditetapkan dan diimplementasikan tentu menghasilkan konsekuensi dalam bentuk akibat-akibat. Akibat yang ditimbulkan dapat berupa akibat positif dan atau akibat negatif. Untuk itulah, analisis kebijakan mengupayakan upaya prediktif dengan meramalkan akibat yang dapat ditimbulkan sebelum kebijakan diimplementasikan dan atau sesudah kebijakan diimplementasikan.

Dengan demikian, analisis kebijakan selalu berkaitan dengan hal-hal sebelum dan sesudah kebijakan ditetapkan dan diimplementasikan. Analisis kebijakan berusaha memberikan definisi yang jelas mengenai kedudukan suatu masalah kebijakan, prediksi yang berkaitan dengan kebijakan, rekomendasi atau preskripsi yang mungkin dapat bermanfaat bagi kebijakan, deskripsi atau

pemantauan terhadap kebijakan, dan evaluasi mengenai kebijakan. Semuanya berjalan sebagai proses yang runtut dan sistematis dalam rangka mendukung kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi masalah.

Dari berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai public policy, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Nugroho R., 2004; 1-7).

Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai kebijakan publik, jadi kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum. Akan tetapi tidak hanya sekedar hukum namun kita harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik; apakah menjadi Undang-Undang, apakah menjadi Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

“Sementara itu pakar kebijakan publik mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan” (Thomas Dye, 1992; 2-4).

Untuk memahami kedudukan dan peran yang strategis dari pemerintah sebagai public actor, terkait dengan kebijakan publik maka diperlukan pemahaman bahwa untuk mengaktualisasinya diperlukan suatu kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat.

Selanjutnya Aminullah (Muhammadi, 2001:371-372) “bahwa kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya dan tindakan dimaksud bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.

Demikian pula berkaitan dengan kata kebijakan ada yang mengatakan: bahwa kata kebijakan berasal dari terjemahan kata policy, yang mempunyai arti sebagai pilihan terbaik dalam batas-batas kompetensi actor dan lembaga yang bersangkutan dan secara formal mengikat. (Ndraha 2003: 492-499).

Meski demikian kata kebijakan yang berasal dari policy dianggap merupakan konsep yang relatif (Michael Hill, 1993: 8): *The concept of policy has a particular status in the rational model as the relatively durable element against which other premises and actions are supposed to be tested for consistency.*

Dengan demikian yang dimaksud kebijakan dalam Kybernology dan adalah sistem nilai kebijakan dan kebijaksanaan yang lahir dari kearifan aktor atau lembaga yang bersangkutan. Selanjutnya kebijakan setelah melalui analisis yang mendalam dirumuskan dengan tepat menjadi suatu produk kebijakan. Dalam merumuskan kebijakan Thomas R. Dye (1976:65) merumuskan model kebijakan antara lain menjadi: model kelembagaan, model elit, model kelompok, model rasional, model inkremental, model teori permainan, dan model pilihan publik, dan model sistem.

Selanjutnya tercatat tiga model yang diusulkan Thomas R. Dye, yaitu: model pengamatan terpadu, model demokratis, dan model strategis. Terkait dengan organisasi, kebijakan menurut George R. Terry dalam bukunya Principles of Management adalah

suatu pedoman yang menyeluruh, baik tulisan maupun lisan yang memberikan suatu batas umum dan arah sasaran tindakan yang akan dilakukan pemimpin (Terry, 1964:278). Kebijakan secara umum menurut Said Zainal Abidin (Said Zainal Abidin,2004:31-33) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:

1. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
2. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
3. Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

Namun demikian berdasarkan perspektif sejarah, maka aktivitas kebijakan dalam tataran ilmiah yang disebut analisis kebijakan, memang berupaya mensinkronkan antara pengetahuan dan tindakan. Dikatakan oleh William N. Dunn (William N. Dunn, 2003: 89) Analisis Kebijakan (Policy Analysis) dalam arti historis yang paling luas merupakan suatu pendekatan terhadap pemecahan masalah sosial dimulai pada satu tonggak sejarah ketika pengetahuan secara sadar digali untuk dimungkinkan dilakukannya pengujian secara eksplisit dan reflektif kemungkinan menghubungkan pengetahuan dan tindakan.

Setelah memaparkan makna kebijakan, maka secara sederhana kebijakan publik digambarkan oleh Bill Jenkins didalam buku *The Policy Process* sebagai Kebijakan publik adalah suatu keputusan berdasarkan hubungan kegiatan yang dilakukan oleh aktor politik guna menentukan tujuan dan mendapat hasil berdasarkan pertimbangan situasi tertentu.

Selanjutnya Bill Jenkins mendefinisikan kebijakan publik sebagai "*A set of interrelated decisions taken by a political actor or*

group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve". (Michael Hill, 1993: 34).

Dengan demikian kebijakan publik sangat berkait dengan administasi negara ketika public actor mengkoordinasi seluruh kegiatan berkaitan dengan tugas dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat melalui berbagai kebijakan publik/umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara.

Untuk itu diperlukan suatu administrasi yang dikenal dengan "administrasi negara." Menurut Nigro dan Nigro dalam buku M. Irfan Islamy "Prinsip-prinsip Kebijakan Negara (Islamy, 2001:1), administrasi negara mempunyai peranan penting dalam merumuskan kebijakan negara dan ini merupakan bagian dari proses politik.

Administrasi negara dalam mencapai tujuan dengan membuat program dan melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan dalam bentuk kebijakan. Oleh karena itu kebijakan dalam pandangan Lasswell dan Kaplan yang dikutip oleh Said Zainal Abidin (Abidin, 2004: 21) adalah sarana untuk mencapai tujuan atau sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktik.

Terkait dengan kebijakan publik, menurut Thomas R. Dye penulis buku "Understanding Public Policy, yang dikutip oleh Riant Nugroho D (Riant, 2004:3) Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil. Sedangkan menurut Said Zainal Abidin, alumni University of Pittsburgh, Pennsylvania, US, (Said Zainal Abidin,2004: 23) kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Sebab itu kebijakan publik berfungsi sebagai

pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus di bawahnya.

Selanjutnya kebijakan publik tersebut setelah melalui analisa yang mendalam dan dirumuskan dengan tepat menjadi suatu produk kebijakan publik. Dalam merumuskan kebijakan publik Thomas R. Dye merumuskan model kebijakan yaitu:

1. Model Kelembagaan;
2. Model Elit;
3. Model Kelompok;
4. Model Rasional;
5. Model Inkremental;
6. Model Teori Permainan;
7. Model Pilihan Publik;
8. Model Sistem

Selain itu ada tiga model yang diusulkan Thomas R. Dye dalam Aswani (2008: 59), yaitu:

1. Model Pengamatan Terpadu;
2. Model Demokratis;
3. Model Strategis

Di sisi lain kebijakan publik sangat berkait dengan administasi negara ketika public actor mengkoordinasi seluruh kegiatan berkaitan dengan tugas dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat melalui berbagai kebijakan publik/umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara. Untuk itu diperlukan suatu administrasi yang dikenal dengan "administrasi negara." Kebutuhan masyarakat tidak seluruhnya dapat dipenuhi oleh individu atau kelompoknya melainkan diperlukan keterlibatan pihak lain yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. Pihak lain inilah yang kemudian disebut dengan administrasi negara.

Proses dilakukan organisasi atau perorangan yang bertindak dalam kedudukannya sebagai pejabat yang berkaitan dengan

penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Administrasi negara dalam mencapai tujuan dengan membuat program dan melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan dalam bentuk kebijakan.

Kebijakan menurut Lasswell dan Kaplan yang dikutip oleh Said Zainal Abidin (Abidin, 2004: 21) adalah sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktik. Pendapat lain tentang kebijakan menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewit adalah suatu keputusan yang menuntut adanya perilaku yang konsisten dan pengulangan bagi pembuat dan pelaksana kebijakan.

Terkait dengan kebijakan publik, menurut Thomas R. Dye penulis buku "Understanding Public Policy, yang dikutip oleh Riant Nugroho D (Riant, 2004:3) Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil.

Sedangkan menurut Said Zainal Abidin, alumni University of Pittsburgh, Pennsylvania, US, (Said Zainal Abidin,2004: 23) kebijakan publik adalah biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Sebab itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus di bawahnya. Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengatur kehidupan bersama untuk mencapai visi dan misi yang telah disepakati.

Namun menurut Riant Nugroho D., bukan berarti kebijakan publik mudah dibuat, mudah dilaksanakan, dan mudah dikendalikan, karena kebijakan publik menyangkut politik (Nugroho, 2004:52). Kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan pemerintahan pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip yaitu: pertama, dalam konteks bagaimana merumuskan kebijakan publik (Formulasi kebijakan); kedua, bagaimana kebijakan publik tersebut

diimplementasikan dan ketiga, bagaimana kebijakan publik tersebut dievaluasi (Nugroho 2004,100-105).

Dalam konteks formulasi, maka berbagai isu yang banyak beredar didalam masyarakat tidak semua dapat masuk agenda pemerintah untuk diproses menjadi kebijakan. Menurut (Nugroho 2004,100-176) Isu yang masuk dalam agenda kebijakan biasanya memiliki latar belakang yang kuat berhubungan dengan analisis kebijakan dan terkait dengan enam pertimbangan sebagai berikut:

1. Apakah Isu tersebut dianggap telah mencapai tingkat kritis sehingga tidak bisa diabaikan?
2. Apakah Isu tersebut sensitif, yang cepat menarik perhatian masyarakat?
3. Apakah Isu tersebut menyangkut aspek tertentu dalam masyarakat?
4. Apakah Isu tersebut menyangkut banyak pihak sehingga mempunyai dampak yang luas dalam masyarakat kalau diabaikan?
5. Apakah Isu tersebut berkenaan dengan kekuasaan dan legitimasi?
6. Apakah Isu tersebut berkenaan dengan kecenderungan yang sedang berkembang dalam masyarakat?

Namun dari semua isu tersebut di atas menurut Said Zainal Abidin (Said Zainal Abidin, 2004: 56-59) tidak semua mempunyai prioritas yang sama untuk diproses. Ini ditentukan oleh suatu proses penyaringan melalui serangkaian kriteria. Berikut ini kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan salah satu di antara berbagai kebijakan:

1. Efektifitas-mengukur suatu alternatif sasaran yang dicapai dengan suatu alternatif kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan.
2. Efisien-dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai.

3. Cukup-suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan sumberdaya yang ada.
4. Adil
5. Terjawab-kebijakan dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan sesuatu golongan atau suatu masalah tertentu dalam masyarakat.

Aktivitas analisis didalam kebijakan publik pada dasarnya terbuka terhadap peran serta disiplin ilmu lain. Oleh karena itu didalam kebijakan publik akan terlihat suatu gambaran bersintesanya berbagai disiplin ilmu dalam satu paket kebersamaan. Berdasarkan pendekatan kebijakan publik, maka akan terintegrasikan antara kenyataan praktis dan pandangan teoritis secara bersama-sama. Dalam kesempatan ini Ripley menyatakan (Randal B. Ripley, 1985: 31).

Di dalam proses kebijakan telah termasuk didalamnya berbagai aktivitas praktis dan intelektual yang berjalan secara bersama-sama. Pada praktik kebijakan publik antara lain mengembangkan mekanisme jaringan aktor (*actor networks*). Melalui mekanisme jaringan aktor telah tercipta jalur-jalur yang bersifat informal (*second track*), yang ternyata cukup bermakna dalam mengatasi persoalan-persoalan yang sukar untuk dipecahkan. Mark Considine memberi batasan jaringan aktor sebagai: (Mark Considine, 1994: 103) Keterhubungan secara tidak resmi dan semi resmi antara individu-individu dan kelompok-kelompok di dalam suatu sistem kebijakan.

Terdapat 3 (tiga) rangkaian kesatuan penting di dalam analisis kebijakan publik yang perlu dipahami menurut Dunn (1994:175), yaitu formulasi kebijakan (*policy formulation*), implementasi kebijakan (*policy implementation*) dan evaluasi kebijakan (*policy evaluation*).

b. Evaluasi Kebijakan dan Dampak (impact) Kebijakan Publik serta Penilaiannya

Menurut Rossi dan Freeman dalam parson (2006:604), mengatakan penilaian tentang dampak kebijakan Publik adalah:

“Untuk memperkirakan apakah intervensi menghasilkan efek yang diharapkan atau tidak. Perkiraan seperti ini tidak menghasilkan jawaban yang pasti tapi hanya beberapa jawaban yang mungkin masuk akal, tujuan dari dasar dari penilaian dampak adalah untuk memperkirakan “efek bersih” dari sebuah intervensi-yakni perkiraan dampak intervensi yang tidak dicampuri oleh pebgaruh dari proses dan kejadian lain yang juga mempengaruhi perilaku atau kondisi yang menjadi sasaran suatu program yang sedang dievaluasi”.

Selain itu dalam penilaian kebijakan menggunakan metode antara lain:

- a. Membandingkan problem/situasi/kondisi/ dengan apa yang terjadi sebelum intervensi
- b. Melakukan eksperimen untuk menguji dampak suatu program terhadap suatu area atau kelompok dengan membandingkannya dengan apa yang terjadi diarea atau kelompok lain yang belum menjadi sasaran intervensi
- c. Membandingkan biaya dan manfaat yang dicapai sebagai hasil dari intervensi
- d. Menggunakan model untuk memahami dan menjelaskan apa yang terjadi sebagai akibat dari kebijakan pada masa lalu
- e. Pendekatan kualitatif dan Judgemental untuk mengevaluasi keberhasilan/ kegagalan kebijakan dan program
- f. Membandingkan apa yang sudah terjadi dengan tujuan atau sasaran tertentu dari sebuah program atau kebijakan
- g. Menggunakan pengukuran kinerja untuk menilai apakah tujuan atau targetnya sudah terpenuhi. Rossi dan Freeman (Parson, 2006:605).

Untuk menjawab pertanyaan mengenai apa efek dari kebijakan, kita memerlukan jawaban analisis terhadap efek kebijakan tersebut. Dengan kata lain evaluasi dampak actual dari kebijakan terhadap problem adalah suatu yang pada dasarnya adalah soal nilai, bukan fakta, arti dari angka-angka tergantung pada maksud si pembuat kebijakan. Ini bisa diartikan bahwa penilaian dampak mungkin akan dibiarkan kearah riset yang kurang komprehensif.

Rossi (dalam Rossi dan Freeman, 1993:446) menunjukkan bahwa hal ini mungkin disebabkan oleh "hukum besi" studi evaluasi, yang menyatakan bahwa semakin bagus studi evaluasi semakin kecil kemungkinannya studi itu akan menunjukkan efek positif.

Analisis kuantitatif terhadap bagaimana kebijakan berdampak pada problem mungkin adalah cara untuk menglegitimasi proses kebijakan, bukan menyediakan penilaian yang memuaskan tentang apakah sebuah kebijakan atau program berkerja baik dan menghasilkan efek. Ketika pembuat kebijakan menggunakan riset terhadap dampak kebijakan terhadap angka kejahatan, gelandangan, pengangguran, kesehatan, standar pendidikan, dan sebagainya, mereka membentuk konteks dan agenda yang tepat problem didefinisikan dan dikonstruksikan.

Karena itu dalam pengertian ini penilaian dampak membawa kembali pada siklus kebijakan – definisi problem dan penentuan agenda. Tujuan penilaian adalah untuk menunjukkan tentang bagaimana suatu kebijakan atau program tertentu sudah berkerja/tidak berkerja", memenuhi tujuan kebijakan/program serta menjaga konstruksi problem dan klaim kebijakan yang diajukan pemerintah, Parson (2006:605).

Selain itu juga dalam memahami evaluasi kebijakan ada yang dinamai dengan evaluasi dampak kebijakan, menurut wahyu 2008:67 mengatakan evaluasi dampak adalah Memberikan perhatian

besar pada output & dampak kebijakan. Evaluasi dampak dilakukan untuk melihat berbagai hal:

1. Menentukan apakah program telah membawa dampak yang diinginkan terhadap individu, rumah tangga dan lembaga
2. Menilai apakah dampak tersebut berkaitan dengan intervensi program
3. Mengeksplorasi akibat yang tidak diperkirakan baik positif maupun negatifnya
4. Permasalahan yang disoroti pada bagaimana program mempengaruhi peserta program dan apakah perbaikan kondisi peserta program betul-betul disebabkan oleh program ataukah faktor lain.

Evaluasi dampak bisa dilakukan sebelum diimplementasikan (sering disebut analisis, asesment, estimasi, prediksi atau perkiraan) atau sesudah diimplementasikan. Sementara itu yang dikatakan dengan dampak evaluasi kebijakan adalah Dampak adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan, selain itu juga akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok sasaran (baik akibat yang diharapkan atau tidak diharapkan), dan akibat tersebut mampu menimbulkan pola perilaku baru pada kelompok sasaran (impact).

Selain itu juga dampak adalah Akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok sasaran, baik yang sesuai dengan yang diharapkan atau tidak dan akibat tersebut tidak mampu menimbulkan perilaku baru pada kelompok sasaran (effects).

Dye dalam Wahyu 2008:70 mengatakan bahwa dampak dari kebijakan publik dapat berupa :

- a) Dampak pada masalah publik (pada kelompok sasaran) yang diharapkan atau tidak
- b) Dampak pada kelompok diluar sasaran sering disebut eksternalitas / dampak melimpah(*spillover effects*)

- c) Dampak sekarang dan yang akan datang
- d) Dampak biaya langsung dikeluarkan untuk membiayai program dan tak langsung yang dikeluarkan publik akibat suatu kebijakan.

Sementara itu menurut Langbien dalam Wahyu 2008:72 mengatakan bahwa dalam memahami dampak evaluasi ada beberapa dimensi yang harus diperhatikan:

1. Waktu

Dimensi ini penting karena :

Kebijakan dapat memberikan dampak sekarang dan yang akan datang, Semakin lama periode waktu semakin sulit mengukur dampak. Ini disebabkan :

- a) Hubungan kausalitas semakin kabur,
- b) Faktor lain yang akan dijelaskan semakin banyak,
- c) Jika efek terhadap individu dipelajari terlalu lama maka akan kesulitan menjaga *track record* individu dalam waktu yang sama

Semakin terlambat sebuah evaluasi dilakukan akan semakin sulit mencari data dan menganalisis pengaruh program yang diamati.

2. Selisih antara dampak aktual dengan yang diharapkan.

Evaluator selain memperhatikan efektivitas tujuan perlu pula memperhatikan (a) berbagai dampak yang tak diinginkan, (b) dampak yang hanya sebagian saja dari yang diharapkan dan (c) juga dampak yang bertentangan dari yang diharapkan

3. Tingkat agregasi dampak

Dampak juga bersifat agregatif artinya bahwa dampak yang dirasakan secara individual akan dapat merembes pada perubahan di masyarakat secara keseluruhan kelembagaan atau organisasi.

4. Tipe dampak

Ada 4 tipe utama dampak program kebijakan :

- a) Dampak pada kehidupan ekonomi : penghasilan, nilai tambah dan sebagainya
- b) Dampak pada proses pembuatan kebijakan: apa yang akan dilakukan pada kebijakan berikutnya
- c) Dampak pada sikap publik : dukungan pada pemerintah, pada program tersebut
- d) Dampak pada kualitas kehidupan individu, kelompok dan masyarakat yang bersifat non ekonomis

Dalam hal ini ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu kebijakan tidak berhubungan dengan dampak yang diharapkan, diantaranya :

- 1) Sumber daya tak memadai
- 2) Cara implementasi tak tepat
- 3) Masalah publik sering disebabkan banyak faktor ttp kebijakan yang dibuat hanya mengatasi satu faktor saja
- 4) Cara menanggapi kebijakan yang justru dapat mengurangi dampak yang diinginkan
- 5) Tujuan-tujuan kebijakan tak sebanding bahkan bertentangan satu sama lain
- 6) Biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar dari masalahnya
- 7) Banyak masalah publik yang tak mungkin dapat diselesaikan
- 8) Timbulnya masalah baru shg mendorong pengalihan perhatian dan tindakan
- 9) Sifat dari masalah yang akan dipecahkan. Anderson (Wahyu 2008:75).

Ada beberapa unit sosial yang berdampak dalam sebuah kebijakan yang dikemukakan oleh Wahyu 2008:80, antara lain:

- 1) Dampak individual : biologis (penyakit, cacat fisik dan sebagainya), fisiologis (stress, depresi, cinta, emosi dan sebagainya), lingkungan hidup (tergusur, pindah rumah dan

- sebagainya), ekonomis (naik turunnya penghasilan, harga, keuntungan dan sebagainya), sosial serta personal
- 2) Dampak organisasional : langsung (terganggu atau terbantunya penc tujuan organisasi), tak langsung (peningkatan semangat kerja, disiplin)
 - 3) Dampak pada masyarakat
 - 4) Dampak pada lembaga dan sistem sosial.

c. Konsep Manajemen Mutu

Mutu merupakan istilah yang banyak diperdebatkan. Beberapa kalangan melihatnya secara relatif seperti keindahan yang tergantung siapa yang melihatnya, sedangkan yang lain meyakini mutu sebagai sifat tertentu yang dapat diidentifikasi secara obyektif. Kata mutu dalam bahasa Inggris *Quality* yang berasal dari kata Latin: *Qualis* yang artinya *what kind of* (seperti apa). Dengan beragam makna dan konotasi (Nigvekar, 1996; Warren et al, 1994; Sallin, 1996), mutu disebut sebagai 'konsep yang licin' (Preffer dan Coote, 1991).

The British Standard Institution (BSI) mendefinisikan kualitas sebagai "totalitas sifat dan karakteristik suatu produk dan layanan yang mampu memuaskan kebutuhan yang diungkapkan atau diharapkan" (BSI, 1991). Green dan Harvey telah mengidentifikasi lima pendekatan yang berbeda dalam mendefinisikan mutu:

1. Dengan menggunakan istilah unggul (melampaui standar tinggi atau yang ditetapkan)
2. Dengan menggunakan istilah konsisten (ditunjukkan oleh 'tidak adanya cacat' dan menjadikan kualitas sebagai budaya)
3. Sebagai kesesuaian terhadap tujuan (produk dan layanan sesuai dengan keinginan, spesifikasi dan kepuasan pelanggan)

4. Sebagai nilai untuk mendapatkan uang (melalui efisiensi dan keefektifan); dan
5. Sebagai transformatif (dalam perubahan kualitatif).

Mutu merupakan konsep yang terus mengalami perkembangan dalam pemaknaannya, menurut Garvin perspektif tentang Konsep mutu mengalami evolusi dan diidentifikasi melalui 5 (lima) alternatif perspektif kualitas yang biasa digunakan, yaitu: *Transcendental Approach* (kualitas yang dapat dirasakan atau diketahui, tetapi sulit didefinisikan dan dioperasionalkan); *Product-based Approach* (kualitas sebagai karakteristik atau atribut yang dapat dikuantifikasikan dan dapat diukur); *User-based Approach* (kualitas tergantung pada orang yang memandangnya, dan produk yang paling memuaskan preferensi seseorang merupakan produk yang berkualitas paling tinggi); *Manufacturing-based Approach* (kualitas adalah standar-standar yang ditetapkan perusahaan, bukan konsumen yang menggunakannya); dan *Value-based Approach* (kualitas bersifat relatif, sehingga produk yang memiliki kualitas paling tinggi belum tentu produk yang paling bernilai. Akan tetapi yang paling bernilai adalah produk atau jasa yang paling tepat dibeli (*best-buy*)).

Definisi yang beragam ini mendorong Gummesson (1990) menyarankan membangun pandangan kualitas yang beragam melalui konsensus sosial daripada sekedar mendefinisikannya.

Dari keseluruhan konsep, mutu memiliki beberapa gagasan pokok yaitu mutu sebagai hal absolut, mutu sebagai hal relatif, mutu sebagai proses dan mutu sebagai budaya. Sebagai sesuatu yang absolut, mutu dilihat sebagai standar yang setinggi mungkin.

Mutu sebagai hal yang relatif dapat diukur dalam spesifikasi tertentu. Sebagai proses, mutu produk dan layanan dicapai melalui persyaratan prosedural. Sedangkan mutu sebagai

budaya menegaskan pentingnya pandangan organisasi tentang mutu sebagai sebuah proses transformasi dimana semua pihak mengakui dan memiliki perhatian terhadap pentingnya mutu. Demikian juga halnya terhadap peningkatan mutu dari sertifikasi dosen yang diharapkan akan mampu mendongkrak (meningkatkan) kualitas pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, sehingga agar lebih dirasakan dengan peningkatan kualitas pelayanan secara signifikan.

2. Sertifikasi Dosen

a. Pengertian dan Konsep Sertifikasi Dosen

Dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (UU 14/2005 Pasal 1 butir 2).

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 39 ayat 2, dinyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik diperguruan tinggi, Hikmat dalam Manajemen Pendidikan (2009:285).

Selain itu juga menurut Hikmat (2009:286), Dosen mempunyai tugas pokok diantaranya :

- a. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan
- b. Membina perkembangan peserta didik secara utuh sebagai makhluk tuhan, individu, dan anggota masyarakat
- c. Melaksanakan tugas profesional lain dan administrasi rutin yang mendukung pelaksanaan dua tugas utama di atas.

Seorang dianggap professional apabila dalam mengerjakan tugasnya, ia selalu berpegang teguh pada etika kerja, independent (bebas dari tekanan pihak luar), cepat (produktif), tepat (efektif), efisien dan inovatif, serta didasarkan pada unsur-unsur :

- a. Ilmu atau teori yang sistematis.
- b. Kewenangan professional yang diakui oleh klien atau peserta didik.
- c. Sanksi dan pengakuan masyarakat akan keabsahan kewenangnya.
- d. Kode etik yang regulative.

Sertifikasi dosen merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas dan kualitas kinerja dosen agar para dosen mampu mengaktualisasikan potensi diri secara lebih optimal sebagaimana tercermin dalam misi tridharma perguruan tinggi (pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat) dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia.

Pelaksanaan sertifikasi dosen adalah respon terhadap UU RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 ayat 2 bahwa “Dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mengajarkan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Sementara itu, Menurut Haryoto Kusnoputranto dalam Sosialisasi dan Penyamaan Persepsi Sertifikasi Dosen Perubahan (2007: 71) ada beberapa Persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dalam Mengajukan Sertifikasi, diantaranya:

1. Dosen Tetap : Dosen PNS Dpk pada PTS atau Dosen Tetap Yayasan (bukan PNS Departemen baik Depdiknas maupun Non Depdiknas)
2. Memiliki Nomor Induk Registrasi Dosen Nasional (NIDN);

3. Dosen yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun di PTS dimana ia bekerja sebagai Dosen PNS DPK /Dosen Tetap Yayasan;
4. Memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor;
5. Memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya lulus S2, dibuktikan dengan Ijazah yang sudah dilegalisir oleh pihak yang berwenang (asli/cap basah);
6. Melaksanakan Tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit 12 SKS pada setiap semester di PTS dimana ia bekerja sebagai Dosen PNS DPK /Dosen Tetap Yayasan;
7. Dosen yang belum memiliki kualifikasi akademik magister (S2)/ setara dapat mengikuti sertifikasi apabila:
 - a) Mencapai usia 60 tahun dan mempunyai pengalaman masa kerja 30 tahun sebagai dosen, atau mempunyai jabatan akademik Lektor Kepala dengan golongan IV/c (Dosen PNS Dpk).
 - b) Memiliki kriteria butir 1 dan 5 di atas
8. PTS pengusul serdos harus memperhatikan rasio dosen

Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan seorang dosen tidak dapat diajukan dalam pengurusan sertifikasi, diantaranya:

- Dosen yang diusulkan tidak sedang melaksanakan Tugas Belajar;
- Batas usia tidak melebihi 64 tahun;
- Tidak sedang diusulkan untuk mendapatkan jabatan akademik Guru Besar (Profesor);
- Tidak sedang menjalani hukuman administrasi tingkat sedang atau berat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dosen merupakan salah satu komponen esensial dalam suatu sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Peran, tugas, dan

tanggungjawab dosen sangat bermakna dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia, meliputi kualitas iman/takwa, akhlak mulia, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab.

Untuk menjalankan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis itu, tentu diperlukan sosok dosen yang profesional dan kompeten dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diamanatkan UU RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, bahwa “Dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mengajarkan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat” (pasal 1 butir 2).

Pada butir berikutnya dijelaskan, profesional dinyatakan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (pasal 1 butir 4). Dalam implementasinya, pelaksanaan Undang-undang dimaksud dilakukan melalui sertifikasi.

Dengan demikian, sertifikasi dosen sesungguhnya merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, kreatifitas dan integritas dosen agar mampu melakukan aktualisasi potensi diri dan tugasnya secara lebih optimal dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran dan kualitas pendidikan secara umum melalui pengembangan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Oleh karenanya, sertifikasi dosen diharapkan mampu menjadi mediasi dalam mewujudkan *quality assurance* (penjaminan mutu) tenaga pendidik (Haryoto Kusnopranto, 2007:78).

(Badan Standar Nasional Pendidikan) yang meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Jadi, sertifikasi dosen bukan sekedar untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan dosen melalui penerimaan tunjangan profesi, akan tetapi juga mengarah pada terwujudnya penjaminan mutu dosen yang kompeten dan profesional. Dosen profesional adalah dosen yang mampu mengaktualisasikan nilai-nilai tridharma perguruan tinggi dalam diri dan pelaksanaan tugasnya. Peningkatan mutu dosen secara akademik juga harus mempertimbangan aspek-aspek pengetahuan yang sangat fundamental dan bersifat universal, antara lain: kemampuan matematika, kemampuan dalam *science* dan teknologi, dan *reading comprehension*. Ketiga aspek ini merupakan aspek utama dalam kehidupan masyarakat sosial dalam menjalani aktifitas sehari-hari, Haryoto Kusnoputranto,(2007: 78)

Kualifikasi akademik dosen dan berbagai aspek unjuk kerja sebagaimana ditetapkan dalam SK Menkowsabngan Nomor 38 Tahun 1999, merupakan salah satu elemen penentu kewenangan dosen mengajar di suatu jenjang pendidikan. Di samping itu,penguasaan kompetensi dosen juga merupakan persyaratan penentu kewenangan mengajar.

Kompetensi tenaga pendidik, khususnya dosen, diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian,kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Tingkat penguasaan kompetensi dosen menentukan kualitas pelaksanaan Tridharma sebagaimana yang ditunjukkan dalam kegiatan profesional dosen.

Dosen yang kompeten untuk melaksanakan tugasnya secara profesional adalah dosen yang memiliki kompetensi pedagogik,

profesional, kepribadian dan sosial yang diperlukan dalam praktek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa, teman sejawat dan atasan dapat menilai secara persepsional terhadap tingkat penguasaan kompetensi dosen. Kualifikasi akademik dan unjuk kerja, tingkat penguasaan kompetensi sebagaimana yang dinilai orang lain dan diri sendiri, dan pernyataan kontribusi dari diri sendiri, secara berasama-sama, akan menentukan profesionalisme dosen.

Profesionalisme seorang dosen dan kewenangan mengajarnya dinyatakan melalui pemberian sertifikat pendidik. Sebagai penghargaan atas profesionalisme dosen, pemerintah menyediakan berbagai tunjangan serta maslahat yang terkait dengan profesionalisme seorang dosen.

b. Dasar Hukum Sertifikasi

Menurut Haryoto Kusnoputranto dalam Sosialisasi dan Penyamaan Persepsi Sertifikasi Dosen Perubahan (2007: 71) Landasan hukum penyelenggaraan sertifikasi dosen antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Standar Dosen
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan khusus Guru dan dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor
- f. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen.

- g. Surat Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya.
- h. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

c. Tujuan serta Sasaran Sertifikasi Dosen

Menilai profesionalisme dosen, guna meningkatkan mutu pendidikan dalam sistem pendidikan tinggi. Pengakuan profesionalisme dinyatakan dalam bentuk pemberian sertifikat. Selain untuk pengakuan keprofesionalisannya, juga dimaksudkan untuk melindungi profesi dosen dan penjaminan kesejahteraannya, Menurut Haryoto Kusnopranto dalam Sosialisasi dan Penyamaan Persepsi Sertifikasi Dosen Perubahan (2007: 71).

Menurut Hikmat (2009:290) dalam bukunya manajemen pendidikan mengatakan bahwa:

“Sertifikasi Dosen mempunyai tujuan antara lain: Sebagaimana telah dikemukakan pada latar belakang, program sertifikasi dosen bertujuan untuk menilai profesionalisme dosen, guna meningkatkan mutu pendidikan dalam sistem pendidikan tinggi”.

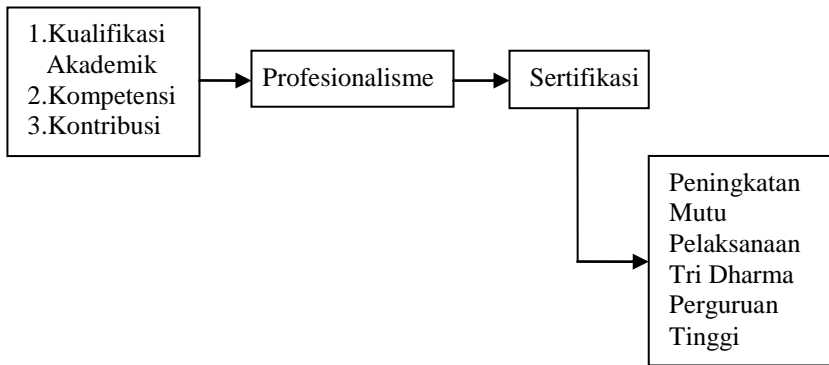
Pengakuan profesionalisme dinyatakan dalam bentuk pemberian sertifikat pendidik kepada dosen yang lulus sertifikasi. Sedangkan sasarannya antara lain Sasaran utama pedoman pelaksanaan ini adalah: (1). Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP) Sertifikasi Dosen, (2). PTN (Perguruan Tinggi Negeri) meliputi Universitas, politeknik serta Institut, (3). PTS (Perguruan Tinggi Swasta) melalui Kopertais (4). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (5). Dosen peserta sertifikasi, dan (5). Pihak-pihak lain yang terkait.

d. Prosedur dan Syarat Sertifikasi Dosen

Syarat sertifikasi dosen menurut Haryoto Kusnopranto (2007: 71) “dalam Sosialisasi dan Penyamaan Persepsi Sertifikasi

Dosen Perubahan antara lain : kualifikasi akademik minimal S2; berpengalaman mengajar sekurang-kurangnya 2 tahun dan telah memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli”.

Selain itu juga dalam memahami sertifikasi bagi dosen ada beberapa konsep-konsep yang berhubungan dengan sertifikasi dosen antara lain:



Gambar 2.2
Konsep Sertifikasi Dosen

Sumber: Website: Error! Hyperlink reference not valid..

Tingkat profesionalisme dosen diukur dengan portofolio untuk menggali bukti-bukti yang terkait dengan:

- a. Kepemilikan kualifikasi akademik dan unjuk kerja dalam pelaksanaan Tridharma (PAK)
- b. kepemilikan kompetensi, sebagaimana yang dipersepsikan oleh diri sendiri dan orang lain (mahasiswa, kolega, dan atasan) (dengan instrumen persepsional)
- c. pernyataan diri dosen tentang kontribusi yang diberikan dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma (dengan instrumen personal).

Penilaian portofolio merupakan penilaian terhadap kumpulan dokumen maupun data yang berupa SK Kenaikan Jabatan terakhir, instrumen persepsional dan personal / deskripsi diri yang telah diisi oleh diri sendiri, mahasiswa, kolega dosen, dan atasan dosen.

Sementara itu Haryoto Kusnopranto (2007:71) mengatakan bahwa dalam penilaian Portofolio ada beberapa macam, antara lain:

1. SK kenaikan jabatan akademik terakhir, yang dilengkapi dengan rincian perolehan angka kredit dalam jabatan (SK Menkowsban gpan nomor 38 tahun 1999).
2. Bukti yang terkait dengan penilaian terhadap empat kompetensi dosen yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian
3. Bukti yang terkait dengan penilaian terhadap empat kompetensi dosen yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian.

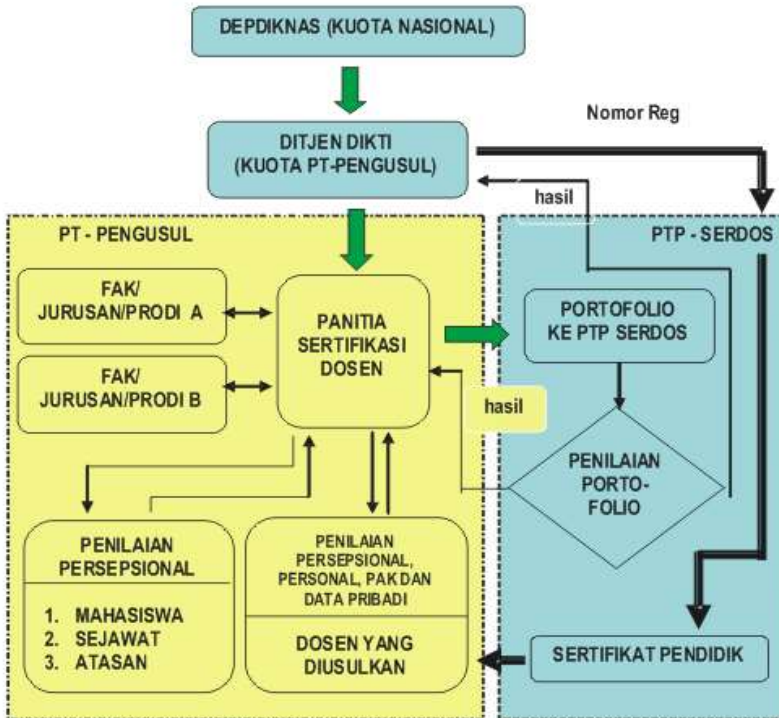
Khusus untuk instrumen Deskripsi Diri, penilaian juga dilakukan oleh asesor.

Sedangkan Penilaian Portofolio antara lain : Melengkapi aspek-aspek penilaian yang belum termuat dalam PAK (Penilaian Angka Kredit), dengan cara :

- a. Penilaian Persepsional oleh diri sendiri, mahasiswa, kolega dan atasan terhadap empat kompetensi dosen
- b. Penilaian Personal yaitu pernyataan dari dosen yang bersangkutan tentang prestasi dan kontribusi yang telah
- c. diberikannya dalam pelaksanaan dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Sementara itu ada beberapa tata cara Instrumen Penilaian terhadap sertifikasi dosen, menurut Haryoto Kusnoprnto dalam Sosialisasi dan Penyamaan Persepsi Sertifikasi Dosen (2007: 71)

1. Penilaian Fungsional
2. Penilaian Kompetensi (atasan, rekan sejawat 3 orang, mahasiswa 5 orang)
3. Penilaian Deskripsi diri (2 orang dari Sertifikator)
4. Penilaian Objektivitas



Sumber: Website: Error! Hyperlink reference not valid.

Gambar 2.3

Prosedur dalam Pelaksanaan Sertifikasi Dosen

Sementara itu prosedur sertifikasi dosen, sesuai dengan Gambar 2.2 di atas dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut:

1. Depdiknas menetapkan kuota nasional (tahun 2008 sejumlah 12.000). Kuota ini kemudian dijabarkan oleh Dirjen Dikti menjadi kuota perguruan tinggi (PT-Pengusul). Khusus untuk perguruan tinggi swasta distribusinya diserahkan kepada Kopertis.

2. Pada PT-Pengusul kuota diproses menjadi daftar calon peserta sertifikasi dosen. PT-Pengusul dalam menangani proses sertifikasi ini disarankan untuk membentuk Panitia Sertifikasi Dosen (PSD) di tingkat PT-Pengusul.
3. Daftar calon peserta sertifikasi dosen di PT Pengusul diurutkan berdasar (1) jabatan akademik, (2) pendidikan terakhir, dan (3) daftar urut kepangkatan atau yang sejenisnya. Rambu-rambu pengurutan ini diberlakukan di tingkat perguruan tinggi.
4. PSD pada PT-Pengusul berkonsultasi dengan fakultas/jurusan/prodi untuk menentukan (1) mahasiswa, (2) teman sejawat, dan (3) atasan dosen yang akan menilai masing-masing calon peserta sertifikasi dosen.
5. PSD kemudian memberikan blangko isian kepada (1) mahasiswa, (2) teman sejawat, (3) atasan dosen yang akan menilai, dan (4) dosen yang diusulkan untuk memberikan penilaian persepsional. Selain penilaian persepsional, dosen yang diusulkan melakukan penilaian personal.
6. Hasil semua penilaian diserahkan kembali ke PSD.
7. PSD mengkompilasi hasil penilaian dan melengkapi dengan persyaratan lain seperti penilaian angka kredit, foto dan lain sebagainya. Hasil pengkompilasian ini menjadi berkas portofolio yang diserahkan oleh PSD di PT-Pengusul kepada perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen (PTP-Serdos).
8. PTP-Serdos menilai portofolio dan hasilnya diserahkan kembali ke PT-Pengusul dan Ditjen Dikti.
9. Berdasarkan hasil ini kemudian Ditjen Dikti menerbitkan nomor registrasi (khusus) bagi yang lulus dan dikirim ke PTP-Serdos untuk penerbitan sertifikat.
10. Bagi yang tidak lulus diserahkan kepada PT-Pengusul untuk pembinaan dan pengusulan kembali, Haryoto Kustranto

dalam Sosialisasi dan Penyamaan Persepsi Sertifikasi Dosen Perubahan (2007: 75).

B. Model Konseptual

Dalam penelitian ini, teori yang menjadi acuan utama dalam pembentukan kerangka berfikir adalah teori Menurut Rossi dan Freeman dalam parson (2006:604), mengatakan penilaian tentang dampak kebijakan adalah:

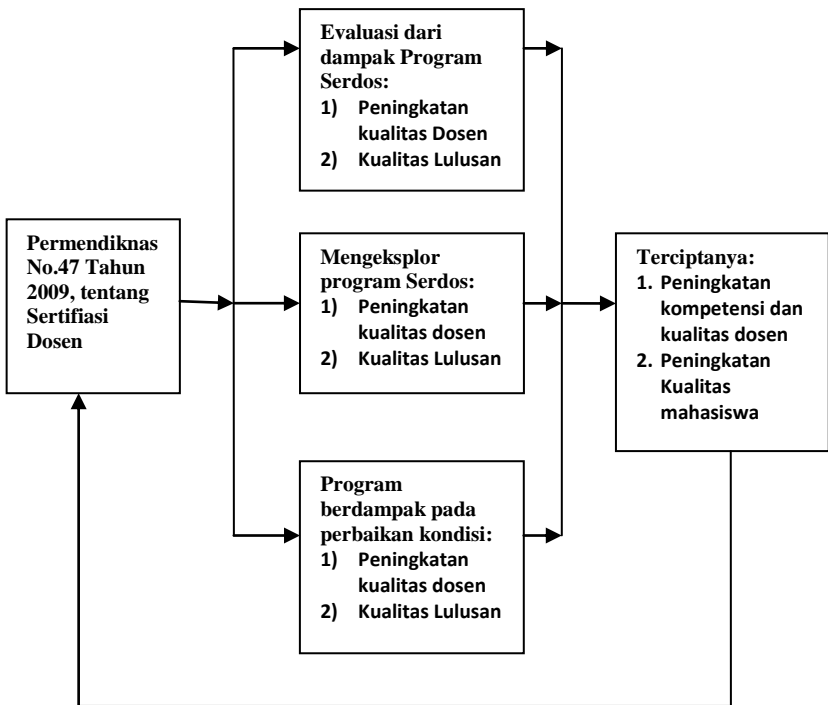
“Untuk memperkirakan apakah intervensi menghasilkan efek yang diharapkan atau tidak. Perkiraan seperti ini tidak menghasilkan jawaban yang pasti tapi hanya beberapa jawaban yang mungkin masuk akal, tujuan dari dasar dari penilaian dampak adalah untuk memperkirakan “efek bersih” dari sebuah intervensi-yakni perkiraan dampak intervensi yang tidak dicampuri oleh pebgaruh dari proses dan kejadian lain yang juga mempengaruhi prilaku atau kondisi yang menjadi sasaran suatu program yang sedang dievaluasi”.

Dengan alasan teori ini mencoba menilai dampak keberhasilan dan nilai efektif serta efesien dari kebijakan sertifikasi bagi dosen, terhadap peningkatan kualitas mahasiwa, dengan harapan kajian yang didapatkan akan lebih luas.

Adapun variabel yang terdapat pada model dampak kebijakan Menurut Rossi dan Freeman dalam parson (2006:604) :

1. Menentukan apakah program telah membawa dampak yang diinginkan terhadap individu, rumah tangga dan lembaga
2. Menilai apakah dampak tersebut berkaitan dengan intervensi program
3. Mengeksplere akibat yang tidak diperkirakan baik positif maupun negatifnya
4. Permasalahan yang disoroti pada bagaimana program mempengaruhi peserta program dan apakah perbaikan

kondisi peserta program betul- betul disebabkan oleh program atautkah faktor lain:



Gambar 2.4
Model Konseptual

C. Pertanyaan Penelitian

1. Apakah Kebijakan Sertifikasi Dosen mampu memberikan dampak terhadap peningkatan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh?
2. Apa Hambatan Dalam Pelaksanaan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi di FISIP Universitas Malikussaleh?
3. Apa upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di FISIP Universitas Malikussaleh ?



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang penulis gunakan adalah Penelitian Kualitatif dengan metode deskriptif yaitu :

Penelitian yang mencoba menelaah atau mengartikulasi tentang permasalahan yang berkaitan dengan penelitian, dimana menggunakan penjelasan dalam bentuk kalimat untuk mengambil kesimpulan penelitian, serta tidak menggunakan interpretasi dalam bentuk angka, tabel maupun grafik, (Moleong:2007).

Sehingga dalam penulisan ini penulis, menggunakan teknik pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptis analisis. Tujuannya supaya permasalahan dalam penulisan dapat terjawab secara menyeluruh dengan penjelasan dalam bentuk kata-kata, kalimat, serta tidak menggunakan dalam bentuk angka, tabel maupun grafik. Selain itu dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, penulis lebih mudah menemukan berbagai informasi dari informan, tentang permasalahan yang menyangkut Dampak Sertifikasi Dosen Dalam Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Langkah yang akan penulis lakukan dalam pendekatan penelitian kualitatif yang berhubungan dengan focus kajian antara lain: Pada pendekatan kualitatif, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan informan, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Pendekatan ini dilakukan dan diarahkan pada latar dan individu secara holistic(utuh).

Neuman(2003) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif digunakan untuk menangkap aspek-aspek dunia sosial yang sulit diukur dengan angka-angka. Menurut Poerwandari (2005) terdapat

beberapa pedoman yang dapat digunakan untuk menentukan kapan suatu penelitian harus menggunakan kualitatif, di antaranya adalah :

1. Bila seseorang tertarik untuk memahami manusia dalam segala kompleksitasnya sebagai makhluk yang subjektif. Pertanyaan penelitian adalah *how* dan *why* yang akan menghasilkan jawaban tentang proses.
2. Bila penelitian tersebut membutuhkan suatu pemahaman yang mendalam dan khusus. Pemahaman ini tidak dapat diperoleh jika menggunakan pendekatan kuantitatif.

Dalam studi kebijakan merupakan suatu bagian penting dalam mencari keabsahan penelitian yang berhubungan dengan penelitian kebijakan. Penggunaan metodologi merupakan suatu langkah yang harus ditempuh, agar hasil-hasil yang sudah terseleksi dapat terjawab secara valid, reliable dan obyektif, dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang administrasi publik.

Selain itu menurut Nugroho (2012) penelitian kebijakan adalah penelitian yang berkenaan dengan perumusan dan rumusan kebijakan serta evaluasi kebijakan.

Sementara itu Meyer & Greenwood (Nugroho:2012) menyebutkan bahwa penelitian kebijakan ialah : Penelitian empirik yang dilakukan untuk mengverifikasikan proposi-proposisi mengenai beberapa aspek hubungan antara alat-tujuan dalam pembuatan kebijakan.

Oleh karena itu, penelitian ini, mengacu pada penggunaan metode penelitian kualitatif, oleh karena itu, menurut David Williams (Moleong:2007) mengungkapkan bahwa penelitian adalah pengumpulan data pada latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau penelitian yang ditarik secara ilmiah.

Selain itu, metode ini diharapkan akan ditemukan makna yang tersembunyi dibalik obyek maupun subyek yang akan diteliti. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu kesatuan konsep keseluruhan (*holistic*) berupaya untuk mengungkapkan rahasia sesuatu, dilakukan dengan menghimpun informasi dalam keadaan sewajarnya (*natural setting*), menggunakan cara kerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan secara kualitatif, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya. Artinya penelitian ini tidak hanya merekam hal-hal yang tampak secara eksplisit saja, melainkan melihat secara keseluruhan fenomena yang terjadi dalam masyarakat (Nawawi, 1994).

Sedangkan menurut Moleong (2007) penelitian kualitatif merupakan:

Penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan penelitian lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata maupun kalimat, pada konteks yang khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Adapun dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologis, mengingat tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam terhadap fenomena yang dijadikan sasaran penelitian, dalam konteks ini masih rendahnya profesionalitas dosen dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi. Dalam memaknai hal tersebut, peneliti akan mencoba menarik berbagai generalisasi atau teori yang dapat digunakan untuk perkembangan ilmu itu sendiri atau untuk dijadikan dasar bagi kepentingan aplikasi teori dalam kehidupan masyarakat.

Selain itu, ada pertimbangan lain yang memungkinkan dijadikan sebagai acuan dasar dalam penentuan metode penelitian kualitatif adalah ilmu administrasi publik merupakan bagian dari

ilmu yang tidak bisa dilepaskan dari aktivitas manusia, sedang manusia merupakan sentral dari kajian ilmu itu sendiri.

Oleh karena itu untuk memahami berbagai fenomena administrasi publik secara mendalam, penelitian terhadap manusia sebagai pelaku kegiatan sosial itu tidak mungkin diabaikan karena manusia sendirilah yang memberikan warna terhadap system administrasi itu sendiri. Berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan tidak terlepas dari pengaruh dari system sosial budaya masyarakatnya. Upaya untuk memahami fenomena sosial budaya inilah yang menjadi salah satu tugas dari para ahli ilmu administrasi Negara dalam mengkaji bidang keilmuannya.

B. Informan Penelitian

Dalam pengumpulan data penelitian ini, digunakan cara studi kepustakaan, penelitian terhadap dokumen-dokumen, observasi dan melakukan wawancara dengan Civitas Akademika Universitas Malikussaleh (FISIP), target group, dan non target group yang relevan dengan penelitian masalah penelitian. Adapun jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui teknik yaitu :

1. Teknik wawancara

a. Jenis informan yang terdiri dari :

- 1) Pembantu Rektor bidang Akademik, Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan
- 2) Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Pembantu Dekan bidang Akademik, serta Kepala Jurusan di setiap prodi di FISIP
- 3) Dosen yang sudah sertifikasi maupun yang belum sertifikasi di lingkungan Fisip Unimal.

Tabel III.1
Instrument Unit Analisis Penelitian

| No. | Subyek | Objek | Jenis data | Ket |
|-----|-------------|----------------------|--------------|--------|
| 1. | PR 1 | PR bidang Akademik | Key Informan | Unimal |
| 2. | Kepala Biro | Kepala Biro Akademik | Key Informan | Unimal |
| 3. | Dekan | Fisip | Key Informan | Unimal |
| 4.. | PD Dekan | Bidang Akademik | Key Informan | Unimal |
| 5. | Dosen | Fisip | Key informan | Unimal |

- b. Prosedur pengambilan informan dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara terhadap informan yang kan di wawancarai.
 - c. Observasi merupakan teknik pengumpulan informasi melalui pengamatan secara langsung ke objek penelitian yang berhubungan dengan focus penelitian.
2. Teknik dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan cara menelaah dukomen dan keperustakaan yang dikumpulkan dari berbagai dokumen seperti : peraturan-peraturan perundang-undangan, arsip, laporan dan dokumen pendukung lainnya yang memuat pendapat para ahli kebijakan sehubungan dengan penelitian.

C. Teknik dan Instrumental Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Moleong (2007:127) menyebutkan bahwa ciri khas dari penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, namun peranan peneliti-lah yang menentukan

keseluruhan skenarionya dan juga peneliti berkedudukan sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, serta yang terakhir menjadi pelopor terhadap hasil penelitian.

Sebagai seorang yang menjadi instrument utama, Guba dan Lincoln (Moleong:2007) menegaskan ciri peneliti sebagai instrument pengumpulan data, yaitu:

- a. Responsive,
- b. Dapat menyesuaikan diri
- c. Menekankan keutuhan
- d. Mendasarkan diri atas perluasan pengetahuan
- e. Memproses data secepatnya
- f. Memanfaatkan kesempatan untuk mengklarifikasikan dan mengikhtisarkan
- g. Memanfaatkan kesempatan untuk mencari respons yang tidak lazim dan idiosinkratic.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

2. Observasi Langsung

Pengamatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini dikategorikan sebagai pengamatan langsung, hal ini memungkinkan peneliti terjun langsung untuk meneliti atau mengamati yang berhubungan dengan permasalahan.

3. Wawancara Secara Mendalam (*In Depth Interview*)

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang paling sering dilakukan oleh peneliti kualitatif. Wawancara dilakukan oleh 2 (dua) belah pihak, yaitu key informan dan informan Biasa. Berdasarkan ciri-ciri pewawancara yang dikemukakan oleh Guba dan Lincoln (Moleong : 2007), maka peneliti berusaha untuk subyek mungkin dalam proses pengumpulan data , sehingga diperlukan pendekatan-pendekatan personal, terutama pada sumber data.

Adapun rencana informan yang akan peneliti wawancarai dapat dilihat sebagai berikut:

Seperti yang di kemukakan oleh Moeloeng (2007), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan penelitian lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks khusus yang dialami dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Dalam melakukan penelitian senantiasa diperlukan suatu metode penelitian yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, guna mendapatkan data dan informasi yang mendukung. Jhon (Nasir. 2009:13) mengemukakan bahwa: "penelitian adalah suatu pencarian data atau fakta menurut metode objektif yang jelas untuk menemukan hubungan antar fakta dan menghasilkan dalil atau hukum".

4. Kajian Dokumentasi

Kajian dokumentasi pada penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dengan cara mempelajari sejumlah dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, buku-buku, jurnal dan bahan-bahan lain yang relevan dengan penelitian dan dianggap dapat dijadikan sebagai sumber data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan berbagai perundang-undangan, diantaranya Permendiknas Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Dosen.

D. Teknik Verifikasi data

Temuan atau hasil penelitian dianggap valid jika tidak terdapat perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Secara umum Creswell (2009:57) menemukan 3 (tiga) strategi dalam uji validitas data penelitian kualitatif, yaitu:

1. *Triangulation of data* (melakukan pelacakan sumber data)
2. *Member cheking* (melakukan pengecekan ulang terhadap anggota informan)
3. *Clarification of research bias* (klarifikasi dari peneliti yang bias)

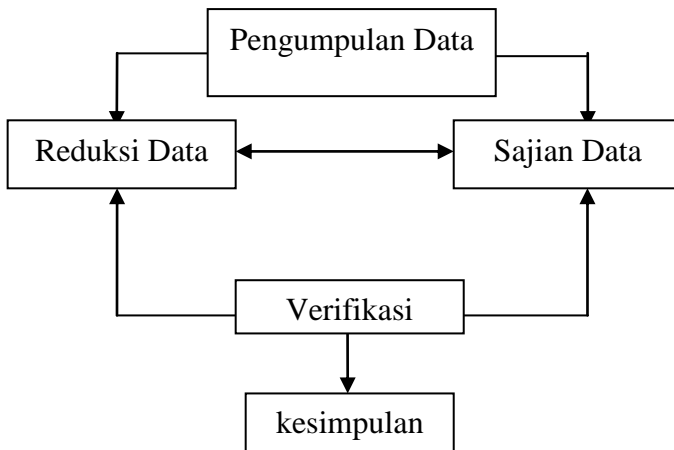
Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan *Triangulation of data*, dimana melakukan pengecekan, kedalaman, dan ketepatan suatu informasi dengan cara mengumpulkan data atau informasi pada waktu/tempat atau kepada individu yang berbeda. Oleh karena itu, peneliti hanya membandingkan hasil wawancara dengan hasil pengamatan dilapangan, seperti tanggapan dari mahasiswa terhadap bentuk pelaksanaan perkuliahan serta ada atau tidaknya peningkatan profesionalisme dosen terhadap pelaksanaan tugas tridarma perguruan tinggi. Selain itu dengan wawancara kepada informan lebih spesifik tentang pokok permasalahan, maka peneliti lebih menemukan data maupun informasi yang lebih mendalam terhadap penelitian ini dilakukan kepada key informan.

E. Prosedur Pengelolaan dan Analisis Data

Proses pengolahan data merupakan tindak lanjut setelah melakukan pengumpulan data. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam proses pengolahan data yaitu bergerak diantara perolehan data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Tahap pengolahan data diawali dari kegiatan sebagai berikut:

- a. *Data reduction* (reduksi data), pada tahap ini data diberi kode, disimpulkan dan dikategorikan menurut aspek-aspek penting dari setiap isu yang telah diteliti. Dengan tahap ini akan membantu juga dalam menentukan data apa diperlukan dan bagaimana serta siapa yang akan member informasi selanjutnya, metode apa yang digunakan untuk menganalisis yang akhirnya akan membawa pada kesimpulan.

- b. *Data organization* (pengorganisasian data), pada tahap ini adalah tahap proses pengumpulan (*assembling*) informasi yang betul-betul penting dan dianggap merupakan tema atau pusat penelitian. Pada tahap ini data-data yang hampir sama atau mirip digabungkan dalam katagori tertentu untuk dijadikan dalam bentuk satu permasalahan saja.
- c. *Interpretation* (interpretasi atau penafsiran) tahap ini meliputi proses mengidentifikasi pola-pola (*patterns*), kecenderungan (*trends*), dan penjelasan (*explanations*) yang akan membawa kepada simpulan yang telah teruji melalui data yang benar-benar lengkap dan tidak ada informasi atau pengertian baru yang terlewatkan.
- d. Kesimpulan dan Verifikasi, tahap akhir dari pengolahan data adalah merumuskan kesimpulan dan verifikasi. Usaha ini dapat dilakukan dengan mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan sebagainya. Secara sistimatis dijelaskan oleh miles dan huberman (Moleong : 2009) dalam model Analisis Interaktif sebagai berikut:



Gambar 3.1
Model Data Interaktif

Analisis data dilakukan dengan menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber atau informasi. Menurut Moleong (2007), analisis data adalah:

“Proses mengorganisasi dan mengurutkan data kedalam pola, katagori dan kesatuan uraian dasar sehingga daapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data. Dengan demikian, data yang telah terkumpul dari hasil wawancara dan studi keperpustakaanatau dokumentasi akan dianalisis dan ditafsirkan untuk mengetahui maksud serta maknanya. Kemudian dihubungkan dengan masalah penelitian. Data yang terkumpul disajikan dalam bentuk narasi kutipan langsung hasil wawancara.”

Prinsip utama dalam analisis data adalah bagaimana menjadikan data atau informasi yang telah terkumpul itu disajikan dalam bentuk uraian, dan sekaligus memberikan makna atau interprestasi sehingga informasi tersebut memiliki signifikasi ilmiah atau teoritis. Dalam penelitian ini, data-data yang sudah penulis dapatkan kemudian dilakukan analisis dengan teknik analisis taksonomis (*taxonomis analysis*), yaitu membentuk analisis yang lebih rinci dan mendalam untuk membahas suatu tema atau pokok permasalahan (Faisal:1990).

Teknik analisis taksonomis terfokus pada dominan-dominan tertentu, kemudian memilih dominan tersebut menjadi sub-sub dominan serta bagian-bagian yang lebih khusus dan terperinci umumnya merupakan rumpun yang memiliki kesamaan. Pemilihan dominan yang akan menjadi focus analisis, ditentukan oleh seberapa besar peran dominan tersebut dapat menjelaskan lebih banyak, tentang penelitian yang sedang dilakukan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Lokus Penelitian

Universitas Malikussaleh didirikan dengan mengambil nama besar Raja Kerajaan Samudera Pasai pertama, yang dilandasi pada semangat estafet kepemimpinan dan pembangunan yang telah diletakkannya melalui sifat kepeloporan, kedinamisan, serta patriotismenya *Sultan Malikussaleh. Kerajaan Islam Samudera Pasai* dalam sejarah tercatat sebagai Kerajaan Islam pertama di Nusantara yang menjadi cikal bakal pusat pengembangan dan penyebaran agama Islam di kawasan Nusantara dan Asia Tenggara.

Ini merupakan pusat Pendidikan Islam dan Ilmu Pengetahuan ternama yang mewariskan semangat pejuang bagi generasi penerusnya dalam mengembangkan agama Islam, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang telah menghasilkan Syech (Dosen Besar) dan ilmuwan lainnya. Sehingga kecemerlangan pemikiran mereka pada saat itu telah memberi dampak besar pada Era Kemakmuran dan Kejayaan (*Welfare State*) "*Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*" suatu Negeri Indah, Adil, dan Makmur yang Diridhai Allah SWT.

Sultan Malikussaleh bukan saja telah mampu meletakkan dasar yang kokoh pada masanya, bahkan *fundament* yang pernah ia tegakkan telah mewarnai watak dan *spirit* bangsa ini hingga sekarang. Meskipun di daerah Aceh Kerajaan Samudera Pasai telah lenyap dan Malikussaleh juga telah wafat, namun semangat kepeloporan, kedinamisan, serta patriotismenya masih tetap terukir di sanubari dan menjadi pendorong perjuangan bangsa ini. Latar belakang sejarah yang dijiwai oleh semangat itulah yang menjadi

tumpuan harapan bagi generasi penerus yang dihasilkan oleh Universitas Malikussaleh. Didukung oleh sumber daya alam yang maha kaya, Universitas Malikussaleh diharapkan mampu memberdayakan sumber daya manusia daerah Aceh Utara khususnya dan Aceh pada umumnya.

Universitas Malikussaleh hingga kini, didukung oleh 5 fakultas yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, serta Program Kesekretariatan. Kecuali Program Kesekretariatan yang D III, 11 program studi lainnya merupakan Strata 1 yaitu Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Administrasi Niaga, Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Industri, Teknik Kimia, Teknik Elektro, Manajemen Perusahaan, Ilmu Hukum, serta Agronomi.

Untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat Aceh kepada Pemerintah Pusat yang berkesinambungan dalam suasana masyarakat Madani, diperlukan adanya usaha untuk melahirkan sebuah Universitas Negeri Kedua setelah Universitas Syiah Kuala yang merupakan dambaan masyarakat Samudera Pasai khususnya dan masyarakat Aceh umumnya. Upaya ini merupakan bagian dari proses penyelesaian konflik Aceh yang menyeluruh sebagai suatu kebijakan strategis politik, mengingat wilayah Samudera Pasai yang terdiri dari Kabupaten Aceh Utara, Bireuen, Pidie, Aceh Timur, Aceh Tengah, dan Aceh Tenggara yang sebahagian wilayahnya merupakan daerah pusat konflik paling bergolak.

Serta paling intensif menentang pemerintah pusat sebagai akibat dari ketidakadilan dan kekeliruan kebijakan Pemerintah Pusat di masa lalu. Disamping itu, di wilayah tersebut juga memiliki *deposit* sumber daya alam yang maha kaya yang dapat diolah bagi kemakmuran masyarakat.

Menteri Pendidikan Nasional dengan keputusannya Nomor : 216/P/2000 tanggal 16 November 2000 membentuk Tim Persiapan Perubahan Status Universitas Malikussaleh Lhokseumawe dari

Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN), selanjutnya disingkat Tim Persiapan. Tim Persiapan bertugas mempersiapkan pelaksanaan pendirian Universitas Negeri Malikussaleh Lhokseumawe secara bertahap sampai terpenuhinya seluruh persyaratan pendirian menjadi universitas negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 004/D/T/2001 Tanggal 2 Januari 2001 kepada Rektor Universitas Malikussaleh mengenai surat Dirjen Pendidikan Tinggi kepada Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 3458/D/T/2000 Tanggal 2 Oktober 2000 tentang kesiapan Universitas Malikussaleh menjadi Perguruan Tinggi Negeri yang telah mendapat disposisi Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 6015/TUM/2000 Tanggal 21 Desember 2000.

Puncak dari upaya yang maksimal untuk meningkatkan status Universitas Malikussaleh yakni ketika Presiden Megawati Soekarno Putri mengeluarkan *Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 95 Tahun 2001*, tanggal 1 Agustus 2001 mengenai Penegerian Universitas Malikussaleh. Dengan dinegerikannya Universitas Malikussaleh berarti di Nanggroe Aceh Darussalam yang berpenduduk sekitar 4,3 juta jiwa tersebut sudah memiliki dua universitas negeri, yakni Universitas Syiah Kuala (*Unsyiah*) Darussalam Banda Aceh dan Universitas Malikussaleh (*Unima*) di Lhokseumawe, Aceh Utara, serta satu Perguruan Tinggi Agama Islam (*IAIN Ar-Raniry*) di Darussalam Banda Aceh.

Akhirnya, dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, pada hari Sabtu Tanggal 8 September 2001 di Lhokseumawe, Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri *meresmikan Pendirian Universitas Malikussaleh sebagai Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Bagi Masyarakat Aceh*, semoga Allah SWT meridhai upaya kita bersama dalam mencerdaskan bangsa. Saat ini Universitas Malikussaleh memiliki singkatan nama UNIMAL.

a. Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh

Cikal bakal lahirnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada dasarnya bermula dari berdirinya Akademi Ilmu Agama (AIA) yang dibawahnya bernaung Jurusan Syariah (tahun 1069), dengan surat keputusan Bupati / kepala Daerah Tingkat II Aceh Utara Nomor : 01/Th/1969 tanggal 12 Juni 1969. Selanjutnya pada tahun 1970 dengan surat keputusan Bupati KDH Tingkat II Aceh Utara Nomor : 1/TH/1970, 15 September 1970 Akademi Ilmu Agama dilengkapi dengan jurusan Ilmu Politik. Usaha pengembangan pendidikan terus dilakukan, dengan Akte Notaris Nomor 15, tanggal 15 Juli 1971 telah dibentuk Yayasan Perguruan Tinggi Islam (YPTI) yaitu badan yang bertanggung jawab terhadap pengembangan Akademi Ilmu Agama.

Kemudian dengan surat keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Islam Nomor : 01/YPTI/1071 tanggal 1 Agustus 1971, Akademi Ilmu Agama diubah namanya menjadi perguruan Tinggi Islam yang di dalamnya bernaung Akademi Syariah, Akademi Ilmu Politik, Akademi Tarbiyah dan Jurusan Dayah Tinggi / Pesantren leluhur. Selanjutnya pada tahun 1972 dengan surat Keputusan Yayasan tanggal 24 Mei 1972 Perguruan Tinggi Islam berubah menjadi Perguruan Tinggi Islam Malikussaleh (PERTIM). Perkembangan selanjutnya pada tahun 1980 Perguruan Tinggi Islam Malikussaleh menjadi Yayasan Universitas Malikussaleh dengan singkatan UNIMA.

Pembenahan dan penyempurnaan Universitas Malikussaleh terus dilakukan, berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0607/0/1984 tanggal 18 Juli 1984 Sekolah Tinggi Administrasi Negara memperoleh status terdaftar, kemudian disusul dengan Sekolah Tehnik memperoleh status terdaftar dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0392/0/1984 tanggal 24 Agustus 1984.

Sesuai dengan surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0584/0/1989 tanggal 11 September 1989 Universitas Malikussaleh terdiri dari Fakultas Ilmu Administrasi (FIA), Fakultas Teknik, Petanian, Ekonomi, Hukum dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sedangkan Fakultas Ilmu Administrasi pada saat itu terdiri dari Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Niaga dan Program Studi D3 Kesekretariatan.

Dengan memperhatikan kondisi daerah terus menerus dilanda konflik, perubahan paradigma pemerintah daerah, persoalan pembangunan sosial dan politik maka tergugah untuk membuka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Malikussaleh. Maka pada tanggal 12 Desember 2000, Rektor Universitas Malikussaleh mengusulkan kepada Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia melalui surat Nomor : 640/Unima.H/2000. Perubahan nama Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. yang di bawahnya masih bernaung 3 jurusan / prodi yaitu Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi Niaga dan Prodi PDPK / Kesekretariatan. Selanjutnya pada tahun 2001 terjadinya peralihan Jurusan Niaga dan PDPK/D3 Kesekretariatan ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.

Seiring dengan kemajuan zaman, masyarakat Aceh juga semakin merasakan pentingnya pendidikan yang dapat diakses untuk masyarakat luas dalam rangka peningkatan sumber daya manusia, sehingga tuntutan masyarakat Aceh Utara khususnya dan masyarakat Aceh umumnya tentang perlu keberadaan Universitas Negeri ke dua di Aceh setelah Universitas Syiah Kuala dan IAIN Ar-Raniry di Darussalam Banda Aceh. Harapan masyarakat Aceh dapat terjawab, dengan adanya surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 216/P/2000 tanggal 16 November 2000 tentang pembentukan Tim Persiapan Perubahan Status Universitas

Malikussaleh Lhokseumawe dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Tim ini terus mempersiapkan pelaksanaan pendirian Malikussaleh Lhokseumawe secara bertahap sesuai dengan persyaratan dan aturan-aturan / ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan, dengan pembinaan DIKTI.

Pernyataan Rektor dalam surat Nomor 540/UNIMA/H/2001 tanggal 28 April 2001 menjelaskan bahwa program penergian Universitas Malikussaleh adalah aspirasi dan permintaan masyarakat Aceh Utara khususnya dan masyarakat Aceh umumnya dalam rangka menjawab surat Dikti tanggal 24 April 2001 Nomor 1252/D/T/2001 tentang kepastian status Universitas Malikussaleh. Akhirnya harapan masyarakat Aceh terjawab dengan keluarnya surat keputusan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri Nomor 95 Tahun 2001 tanggal 1 Agustus 2001 mengenai penergian Universitas Malikussaleh dan puncaknya pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2001 di Lhokseumawe , dengan rahmat Allah Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri meresmikan pendirian Universitas Malikussaleh sebagai Universitas Negeri. Semoga keberadaannya dapat mewujudkan tujuan pendidikan yaitu mencerdaskan bangsa. Dan Universitas Malikussaleh dapat menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia bagi masyarakat Aceh.

Berdasarkan Keppres No 95 Tahun 2001, maka Universitas Malikussaleh menjadi Universitas Negeri ke tiga di Aceh setelah Universitas Syiah Kuala dan IAIN AR-Raniry. Seiring dengan perubahan status Universitas Malikussaleh dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tersebut, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melakukan pembenahan dan pengembangan diri. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Selanjutnya pada tahun 2001 tersebut Dekan mengusulkan peralihan Jurusan Niaga dan PDPK ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Malikussaleh dan merencanakan ingin membuka beberapa program studi baru.

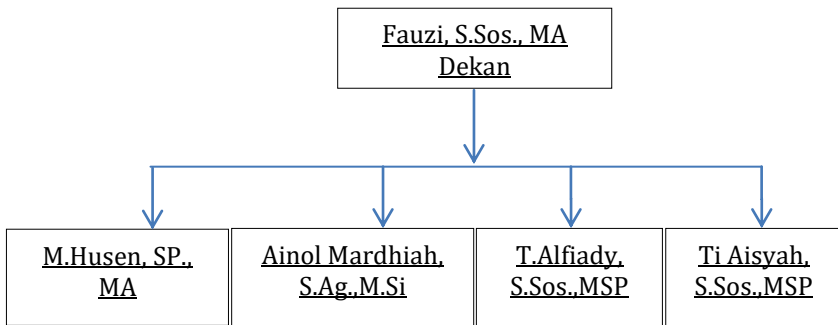
Pengembangan prodi baru diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi fakultas ISIP khususnya dan bagi universitas dan daerah pada umumnya. Kemudian pada tahun 2003 Dekan telah mengusulkan pembukaan beberapa program studi baru diantaranya Program studi Ilmu Komunikasi, program studi Ilmu Politik, Antropologi, dan Sosiologi.

Kemudian pada tanggal 5 September 2003 mendapat ijin Menteri melalui surat Nomor: 2289/D/T/2003 tentang penyelenggaraan program-program studi baru, maka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik memiliki 5 jurusan / prodi yang terdiri Jurusan Ilmu Administrasi Negara, program studi Ilmu Komunikasi, Ilmu Politik, Antropologi dan Sosiologi. Pengembangan prodi baru ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Dalam rangka meningkatkan kualitas output mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik telah mengarahkan penyelenggaraan pendidikan dengan kurikulum berbasis kompetensi, di Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan Program studi Sosiologi telah menerapkannya sejak tahun 2008, kemudian disusul program studi Ilmu Komunikasi, Ilmu Politik dan Antropologi pada tahun 2012.

b. Struktur Organisasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh

Struktur organisasi Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik terdiri dari Dekan, para Pembantu Dekan, Bagian Tata Usaha, Jurusan, Kelompok Pengajar, Laboratorium, dan Perpustakaan. Secara lebih lanjut bisa dilihat dari bagan struktur di bawah ini:



Gambar. 4.1
Struktur Organisasi FISIP Universitas Malikussaleh

Dekan : Fauzi,S.Sos,MA
Pembantu Dekan I : M.Husen,MR.,SP.,MA
Pembantu Dekan II : Ainol Mardhiah, S.Ag, M.Si
Pembantu Dekan III : T.Alfiady, S.Sos, MSP
Pembantu Dekan IV : Ti Aisyah,S. Sos, MSP

Ketua Jurusan Ilmu
Administrasi Negara : Maryam,S.Sos, MSP
Sekretaris Jurusan : Nurhafni,S.Sos,MPA

Ketua Prodi
Ilmu Politik : DR. Muhammad Bin Abubakar
Sekretaris Prodi : Alfian, S.HI, MA

Ketua Prodi
Ilmu Komunikasi : Dedy Sastria P., S,Sos, M.Si
Sekretaris Komunikas : Ade Muana Husniati, S.Sos, M.Si

Ketua Prodi Sosiologi : Fajri, S.Pdi, M.Soc, Sc

Sekretaris

Prodi Sosiologi : Dr.Alwi, S.Sos,M.Si

Ketua Prodi

Antropologi : Agung Utama Lubis,S.Sos, M.Si

Sekretaris

Prodi Antropologi : Amiruddin Ketaren, S.Sos, M.Sc

Kepala Lab. Jurusan

Ilmu Adm Negara : Mauludi,S.Sos, MSP

Kepala Lab Komputer : -

Kepala Lab.

Prodi Ilmu Komunikasi : Anismar

Kepala Lab.

Prodi Ilmu Politik : Taufik Abdullah, S.Ag, M.Si

Kepala Lab.

Studi Sosiologi : Ahmad Yani, S.Sos. M.Si

Ketua Jurnal SUWA : M. Husen. MR, SP., MA

Kepala Perpustakaan : Jamaluddin, S.Sos

Kabag. TU : Lisa Abidin, SE

Kasubbag.

Akademik & Kemhs : Elvi Linda, SE

Kasubbag.

Umum, Keu. & Kepeg. : Eva Yanti, SH

Bendahara : Saiful Arianto, ST

Sekretaris Dekan : Suryani.S.Sos

c. Tenaga Pendidik

Jumlah tenaga pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik semuanya berjumlah 64 orang dengan berkualifikasi jenjang pendidikan S2 dan S3, jumlah dosen yang memiliki kualifikasi pendidikan S3 sebanyak 8 orang dan S2 50 orang dan S1 9 orang. Jumlah dosen yang telah memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala sebanyak 10 orang, jabatan fungsional Lektor sebanyak 26 orang, memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli sebanyak 23 orang dan selebihnya sebanyak 8 orang dengan jabatan non fungsional. Beberapa dosen yang belum memiliki fungsional dikarenakan dosen tersebut sedang melanjutkan studi belum mengurus fungsional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam meningkatkan SDM, bagi dosen yang masih bergelar S2 diupayakan dapat melanjutkan studi S3, sedangkan dosen yang sedang melanjutkan studi S3 sebanyak 13 orang.

Hingga saat ini Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu politik memiliki tenaga administrasi semuanya berjumlah 24 orang , terdiri dari 17 orang berstatus PNS, dan 7 orang masih honorer. Mayoritas tenaga kependidikan berijazah sarjana (S1) yaitu S1 sebanyak 16 orang, Diploma 2 orang, SMA 6 orang.

d. Mahasiswa

Menurut data Tahun 2012/2013 jumlah keseluruhan mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebanyak 1692 orang. Jumlah mahasiswa per jurusan / prodi sebagai berikut; jumlah mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara sebanyak 636 mahasiswa, prodi komunikasi sebanyak 372 mahasiswa, prodi Ilmu politik sebanyak 210 mahasiswa, prodi Sosiologi sebanyak 321 mahasiswa, dan prodi Antropologi sebanyak 153 mahasiswa.

Perkembangan masa studi mahasiswa untuk tiga tahun terakhir tahun 2010 -2013 berkisar /rata-rata masa studi mahasiswa adalah 4,8 tahun. Umumnya dikarenakan keterlambatan

dan kelalaian mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir dan kurangnya motivasi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya tepat waktu, disamping sarana prasarana pembelajaran yang masih terbatas. Dalam hal ini perlu ditingkatkan pembimbingan dan motivasi kepada mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir/studi tepat waktu dan penyediaan sarana prasarana pembelajan yang memadai.

Rata-rata IPK mahasiswa untuk tiga tahun terakhir yaitu tahun 2010-2013 menunjukkan hasil yang memuaskan dengan rata-rata IPK di atas 3 diantaranya; Rata-rata IPK Tahun 2013 adalah sebagai berikut : mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara rata-rata IPK sebesar, 3,18, Prodi Komunikasi rata IPK mahasiswa sebesar 3,19, Mahasiswa Sosiologi rata-rata IPK mahasiswa sebesar 3,10, Mahasiswa Ilmu Politik rata-rata IPK mahasiswa sebesar 3,21 dan Mahasiswa Antropologi rata-rata IPK mahasiswa berkisar 3,07 sehingga menjadi rata-rata pada tingkat Fakultas adalah 3.15.

e. Alumni

Perkembangan jumlah alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sejak berstatus Perguruan Tinggi Negeri pada tahun 2001 sampai dengan sekarang sudah berjumlah orang 944, dengan rincian sebagai berikut ; jurusan Ilmu Administrasi Negara sebanyak 657 orang, prodi Ilmu Komunikasi berjumlah 102 orang, Ilmu Politik berjumlah 44 orang, Prodi Sosiologi berjumlah 82 orang dan prodi Antropologi sebanyak 59 orang.

f. Rasio Dosen, Pegawai dan Mahasiswa

Saat ini rasio jumlah dosen dan mahasiswa secara keseluruhan adalah 1:26. Rasio jumlah dosen dan mahasiswa di masing-masing prodi adalah: S-1 Ilmu Administrasi Negara adalah 1:27, S-1 Komunikasi 1:31, S1 Ilmu Politik 1:21, S-1 Sosiologi 1:27 dan S-1 Antropologi adalah 1:26 Rasio yang tidak proporsional di

mayoritas prodi ini tentu saja membawa dampak inefisiensi dan berkurangnya kesempatan dosen untuk terlibat secara optimal dalam proses belajar mengajar. Bagi dosen ini tentunya akan memperlambat perkembangan karir fungsional dan mengurangi kesempatan untuk memperoleh manfaat lainnya dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Langkah yang perlu diambil ke depan untuk mengatasi masalah ini dapat berupa peningkatan jumlah mahasiswa dan pembatasan penerimaan tenaga pengajar, setidaknya untuk beberapa tahun mendatang. Peningkatan jumlah mahasiswa tentunya harus didukung oleh upaya membangun reputasi dan citra lembaga serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.

g. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Secara keseluruhan penelitian dosen, dan kegiatan pengabdian masyarakat di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang sumber dana dari hibah Dikti masih rendah, dikarenakan motivasi dosen untuk berkompetisi untuk memperoleh dana tersebut masih sangat rendah. Namun masih banyak kegiatan penelitian yang dilakukan dosen dengan sumber dana mandiri. Membuat artikel ilmiah, menyadur buku atau prosedur dalam hal memenuhi persyaratan kinerja dosen. Buku yang dihasilkan dosen juga masih sangat minim. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam hal untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan dosen untuk melaksanakan penelitian akan dibekali metodologi penelitian, dan tehnik penulisan karya ilmiah, penulisan buku yang lebih profesional dan memotivasi dosen untuk meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, menulis buku dan artikel ilmiah.

h. Sarana dan Prasarana

Secara umum sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sudah memadai untuk mendukung proses pembelajaran atau kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi, namun kondisi sarana masih belum representatif. Dalam hal ini Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik akan terus mengembangkan sarana prasarana pendidikan yang lebih representatif, mengembangkan alat atau bahan laboratorium, pengadaan buku yang lebih memadai, mengembangkan pusat studi, pengembangan laboratorium komputer dan komunikasi, pengembangan laboratorium jurusan atau prodi. Pengembangan fasilitas pembelajaran seperti LCD dan Laptop. Meningkatkan jumlah artikel, jurnal dan bahan bacaan lainnya di perpustakaan Fisip dan mengembangkan ruang perpustakaan yang representatif.

B. Hasil Penelitian

1. Kebijakan Sertifikasi Dosen mampu memberikan Dampak terhadap peningkatan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh

a. Pelaksanaan bentuk pengajaran di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh dilaksanakan pada setiap awal semester dengan mata kuliah yang telah ditentukan melalui jadwal mata kuliah yang telah ditetapkan oleh Fakultas.

Berkenaan dengan bentuk pengajaran, penulis mewawancarai Dekan FISIP Universitas Malikussaleh, kepada penulis mengatakan:

“ Bentuk pengajaran yang dilaksanakan di FISIP Unimal saat ini mengacu kepada ketentuan dan aturan yang berlaku. Seperti setiap awal semester atau awal ajaran baru, setiap dosen harus menyiapkan SAP yang nantinya akan di ajarkan kepada mahasiswa. Ini sangat penting di perhatikan karena jangan sampai dosen yang mengajar kepada mahasiswa tidak menggunakan SAP, selain itu

juga dosen yang bersangkutan juga harus menyerahkan SAP yang telah dibuatnya kepada Jurusan, karena dengan demikian akan mudah pihak jurusan untuk mengimput data yang nantinya juga akan berhubungan dengan salah satu syarat persiapan pembuatan Sertifikasi jurusan yang dilaksanakan setiap 4 tahun sekali, (wawancara, 25 september 2013)".

Selain itu juga di FISIP Universitas Malikussaleh, dari sisi peningkatan jumlah mahasiswa terus mengalami peningkatan.

Pembantu Dekan I Bidang Akademik FISIP Unimal kepada penulis mengatakan bahwa:

" Perkembangan jumlah mahasiswa FISIP terus mengalami peningkatan, ini terjadi karena sudah mulai banyaknya partisipasi mahasiswa yang memilih FISIP sebagai fakultas yang dipilihnya sebagai tempat pendidikan. Akan tetapi bila dilihat dari Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa tidak mengalami peningkatan yang signifikan, ini dikarenakan masih rendahnya kesadaran mahasiswa dalam belajar. Faktor ini disebabkan oleh masih rendahnya keinginan mahasiswa dalam mengikuti proses belajar mengajar, selain itu juga belum ada kesadaran mahasiswa untuk mendalami setiap mata kuliah diluar jam belajar mengajar, jadi semata hanya mengandalkan jam pertemuan dalam sesi tiap-tiap pertemuan dengan dosen. Untuk jumlah lulusan di FISIP Unimal saat ini juga belum terlihat peningkatan yang berarti, ini mungkin disebabkan karena masih rendahnya kemampuan dan minat belajar dari kalangan mahasiswa, (wawancara, 25 september 2013)".

Sementara itu untuk mahasiswa dropout di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, mengalami penurunan yang cukup berarti dari setiap tahunnya, ini bisa dilihat dari grafik terlihat di bawah ini :

Berkenaan dengan mengalami penurunan angka mahasiswa yang dropout, maka penulis mewawancarai Pembantu Dekan I Bidang Akademik, kepada penulis menjelaskan:

" Penurunan angka mahasiswa yang di dropout ini merupakan suatu usaha dari mahasiswa itu sendiri, yang belajar secara serius, untuk tidak sampai dikeluarkan dari Kampus. Untuk saat ini sudah mulai ada usaha dari mahasiswa untuk belajar secara sungguh-sungguh dalam menyelesaikan pendidikan di FISIP Universitas Malikussaleh. Seperti mengikuti perkuliahan, menyelesaikan segala tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, sehingga nilai IPK yang

diperoleh meningkat ditiap-tiap semester, (wawancara, 25 september 2013)".

Selanjutnya penulis mewawancarai Pembantu Dekan I bidang Akademik, mengatakan kepada penulis:

" Selama ini pelaksanaan pengajaran yang dilakukan oleh tiap-tiap dosen di seluruh jurusan yang ada di Fisip, berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan. sehingga dosen yang bersangkutan yang mempunyai keahlian dibidangnya (baik di S2 maupun yang S3), masing-masing akan mendapatkan mata kuliah yang akan di asuh di semester berjalan, (wawancara, 25 september 2013)".

Sementara itu penulis juga mewawancarai salah satu dosen di Fisip Unimal, mengatakan bahwa:

" Pelaksanaan pengajaran yang dilakukan oleh dosen di Fisip selama ini sudah berjalan sesuai dengan mekanisme aturan yang ditetapkan oleh Fakultas. Sementara itu juga banyak dosen yang di berikan mata kuliah sesuai dengan kosentarasasi maupun kemampuan yang dimiliki oleh dosen yang bersangkutan (baik di Master maupun yang Doktor). Namun saya melihat masih perlu adanya suatu penyesuaian mata kuliah yang relevan dengan kurikulum sekarang. Artinya bahwa mata kuliah yang akan diajarkan kepada mahasiswa hendaknya se sesuai dengan perkembangan zaman serta menjawab kebutuhan pangsa pasar pekerjaan, baik di dunia Pemerintah, maupun swasta, (wawancara, 25 september 2013)".

Dari data di atas dapat terlihat bahwa masih perlunya penyusunan kurikulum yang berhubungan dengan mata kuliah yang sesuai dengan perkembangan dan bursa kerja saat ini.

Pada kesempatan yang sama kepada penulis menjelaskan bahwa:

" Penyesuaian kurikulum diperlukan saat ini, dikarenakan persaingan dunia kerja sangat terasa, setiap mata kuliah harus disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja. Selain itu juga dalam penyusunan kurikulum juga harus mengacu pada kearifan lokal yang mestinya harus ditingkatkan. Seperti setiap mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa harus punya relevansi dengan kondisi Sosial di suatu daerah, dengan demikian mutu lulusan yakni mahasiswa juga memahami kondisi kearifan lokal di suatu daerah tersebut, (wawancara, 27 september 2013)

Pada kesempatan yang berbeda juga penulis mewawancarai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unimal, mengatakan kepada penulis:

“ Fakultas saat ini sangat gencar memantau atau mengawasi pelaksanaan perkuliahan (pengajaran) yang dilaksanakan oleh dosen kepada mahasiswa. Ini dilakukan untuk melihat bagaimana kinerja dosen dalam melaksanakan tugasnya dalam bentuk pengajaran, seperti melasanakan melakukan absensi dosen, meminta kepada dosen yang telah ditentukan mata kuliah yang diasuh berupa GBPP dan SAP yang diminta di awal semester oleh tiap-tiap jurusan, agar pelaksanaan pengajaran dapat berjalan dengan baik dan sebagian bahan dalam persiapan pembuatan boring maupun evaluasi diri untuk sertifikasi jurusan di FISIP Universitas Malikussaleh (wawancara, 27 september 2013)”.

Sertifikasi dosen merupakan bentuk penjelmaan dari amanat konstitusi dari UUD 1945 dibidang pendidikan, begitu juga di FISIP Universitas Malikussaleh pelaksanaan sertifikasi sudah berjalan semenjak ditetapkan menjadi kebijakan pemerintah.

Dalam hal ini penulis mewawancarai Pembantu Rektor bidang Akademik Universitas Malikussaleh Veri ST., MT:

“ Memang secara filosofi bahwa Sertifikasi Dosen itu sangat berdampak terhadap peningkatan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya di FISIP Unimal, namun bila dilihat secara keseluruhan masih ada beberapa kendala atau problem dalam pelaksanaan sertifikasi dosen di FISIP Universitas Malikussaleh, seperti dalam pelaksanaan sertifikasi saat ini dilakukan secara Online dimana dosen yang masih kurang memahami dalam melakukan verifikasi secara langsung ke Dikti. Sehingga cara pendaftaran maupun syarat-syarat yang harus dilengkapi tidak dipenuhi oleh sebagian dosen (kurang dalam penguasaan IT). Yang pada akhirnya merupakan sebuah kendala dalam pelaksanaan sertifikasi yang dirasakan oleh dosen di FISIP khususnya di Universitas Malikussaleh (wawancara, 20 Agustus 2013)”.

Sementara itu penulis juga mewawancarai Kepala Biro bidang Akademik Universitas Malikussaleh, M. Arief Rahman., SH., MH:

“ Sertifikasi dosen yang sudah berjalan selama ini di FISIP Unimal memang sudah berjalan dengan baik, namun bila di kaji secara mendalam masih terdapat hal-hal yang masih perlu ada perbaikan kinerja dosen, apalagi bila di hubungkan dengan adanya sertifikasi dosen, maksudnya bagi dosen harus mampu menempatkan diri

sebagai agent perubahan dalam peningkatan kualitas mahasiswa dalam hal intelektualitas akademik yang tertuang dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, seperti pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Selain itu juga dosen diharapkan untuk konsisten dalam melaksanakan segala tugasnya baik dalam peningkatan kedisiplinan, integritas dan kualitasnya (*wawancara, 20 Agustus 2013*)”.

Apresiasi yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga pendidik khususnya dosen, merupakan penjelmaan yang yang harus disekapi secara baik demi peningkatan kualitas pendidikan. Sementara itu Dekan FISIP Unimal, mengatakan kepada penulis:

“ Pelaksanaan sertifikasi dosen di FISIP Unimal sudah berjalan dengan baik,saat ini dosen yang sudah bersertifikasi di FISIP berjumlah 38 orang yang terbagi atas beberapa jurusan, (*wawancara, 20 Agustus 2013*)”.

Pada kesempatan yang sama Dekan FISIP Unimal, juga mengatakan kepada penulis:

“ Pelaksanaan Kebijakan Sertifikasi Dosen memang sudah berjalan saat ini, bisa dibilang sudah agak ada perubahan terutama terhadap peningkatan kualitas dosen dalam hal pembelajaran dan pengajaran.Namun bila di kaji secara mendalam, masih ada juga persoalan yang dirasakan tidak mestinya harus dipahami oleh dosen itu sendiri.Seperti kita ketahui bahwa Dosen merupakan profesi pendidik yang selalu mendapat sorotan dari mahasiswa maupun masyarakat luas. Sudah sepatutnya dengan perhatian yang dirasakan saat ini oleh masyarakat, khususnya dosen FISIP Unimal harus mulai untuk mempersiapkan peningkatan profesionalitas terutama dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga terciptanya suatu perubahan kondisi penidikan kearah lebih baik lagi terutama di Fisip Unimal, (*wawancara, 25 Agustus 2013*)”.

Selain itu juga dalam kesempatan yang sama, penulis juga mewawancari Pembantu Dekan Bidang Akademik FISIP Unimal, M.Husen MR.,SP., MA :

“Dengan adanya sertifikasi dosen diharapkan prestasi maupun kinerja dosen semestinya harus maksimal, karena Serdos (serifikasi dosen) merupakan kebijakan pemerintah yang memberikan apresiasi kepada dosen untuk meningkatkan kinerja maupun indek prestasi yang maksimal, karena dengan Serdos proses penilaian terhadap dosen dilakukan secara objektif melalui

penilaian Portofolio, dengan itu juga pemerintah memberikan bentuk penghargaan untuk peningkatan kesejahteraan dosen (wawancara, 25 Agustus 2013”.

Selain itu juga penulis mewawancarai salah satu dosen yang sudah sertifikasi, kepada penulis dia mengatakan :

“ Memang sudah sangat jelas terlihat dengan adanya sertifikasi dosen diharapkan terdapat perubahan kearah yang lebih baik, terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Perguruan tinggi. Sudah sepatutnya bagi para dosen untuk lebih serius dan konsisten dalam mengajar. Sehingga tugas utama selaku pendidik dapat terwujudkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, (wawancara, 25 Agustus 2013)”.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa, perlu adanya sikap yang serius dan konsisten dari dosen untuk melaksanakan tugas pelaksanaan atau pencapaian Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dari pengajaran. Sehingga dosen benar-benar meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dalam peningkatan kualitas mahasiswa. Apalagi pemerintah telah memberlakukan suatu kebijakan yang mendongkrak atau merangsang kinerja Dosen melalui Sertifikasi, yang diharapkan mebangkitkan semangat dari tenaga professional dalam melaksanakan tugasnya melalui pengajaran.

Selain itu juga berdasarkan studi dokumentasi peneliti di FISIP Universitas Malikussaleh, terjadi peningkatan yang cukup baik dalam hal pengajaran.

Dalam hal peningkatan kinerja dan prestasi dosen dalam proses belajar mengajar, penulis juga mewawancarai salah seorang dosen di FISIP Universitas Malikussaleh, kepada penulis mengatakan bahwa:

“ Untuk kinerja dan prestasi dalam mengajar dosen di Fisip Unimal saat ini dapat dilihat dari pencapaian SAP dalam setiap pengajaran yang diasuhnya. SAP yang disajikan kepada mahasiswa saat ini dari segi kualitasnya masih perlu ditingkatkan lagi, saat ini saya melihat masih lemahnya materi yang dibuat dalam SAP oleh dosen –dosen di FISIP Unimal. Contohnya saja materi yang diberikan masih menggunakan SAP yang 3 tahun yang lalu atau dengan kata lain

masih menggunakan SAP yang tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Sehingga saat ini saya menilai bahwa pencapaian SAP dosen dalam setiap semester baru mencapai 68%, (wawancara 27 september 2013).”

Pada kesempatan yang berbeda, penulis juga mewawancarai Pembantu Dekan I bidang Akademik, kepada penulis mengatakan bahwa:

“Faktor penyebab rendahnya pencapaian kinerja dosen dalam mengajar ini terletak pada individu dosen sendiri. Masih ada sebagian dosen yang menempatkan dirinya bukan pendidik yang professional, mengajar dijadikan sebagai beban tugas semata tidak dijadikan sebagai tutun profesi yang semestinya dilaksanakan dengan sesungguhnya dan sebaiknya. Padahal di Fisip Unimal saat ini untuk dosen yang sudah tersertifikasi mencapai 70 %, akan tetapi bila dilihat dari kinerja dosen untuk mengajar masih sangat rendah prestasi yang dicapai oleh dosen, (wawancara 29 September 2013).”

Dari data di atas, terlihat bahwa penyebab rendahnya kinerja dosen FISIP Universitas Malikussaleh itu karena sebagian dosen menempatkan dirinya bukan sebagai jiwa pendidik yang professional, maksudnya adalah setiap dosen harus bisa mendidikasikan jiwa dan pemikirannya semata-mata sebagai pendidik yang seutuhnya.

Berdasarkan Grafik di atas dapat terlihat semenjak diberlakukan kebijakan Sertifikasi Dosen, maka juga merangsang atau meningkatkan kemampuan dan kualitas dosen dalam mengajar. Ini bisa dilihat melalui indek kumulatif dari pencapaian dari tahun 2008, yang dulu untuk 1,serta pencapaian SAP dalam setiap semester 15% Akan tetapi pada tahun 2012 terjadi peningkatan yang sangat signifikan, dimana untuk tahun 2012 IPK(Indek Kumulatif Mahasiswa) sudah mencapai 5.2% serta pencapaian SAP dosen dalam setiap mengajar/semester 5.8 ini menunjukkan suatu pengaruh yang positif terhadap bentuk pengajaran dengan adanya Sertifikasi Dosen saat ini.

Peningkatan IPK mahasiswa FISIP Universitas Malikussaleh dari tahun 2008 sampai 2013 ini disebabkan dari keseriusan dari mahasiswa untuk belajar mendalami dari setiap mata kuliah yang diberikan oleh dosen yang bersangkutan. Selain itu disebabkan sudah banyak dosen yang mengajar di tiap mata kuliah yang diasuh berdasarkan keahlian atau spesialisasi yang diambil melalui S2 maupun S3 baik dalam negeri maupun luar negeri.

Sementara itu peningkatan pencapaian dosen dalam mengajar dengan menggunakan SAP di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh juga mengalami peningkatan yang berarti mulai dari tahun 2008 hanya 20 % akan tetapi pada tahun 2013 mencapai 68 %, ini disebabkan dari sudah ada kesadaran dosen dalam mengajar mengaktualisasi setiap materi yang diajarnya dengan menggunakan SAP, sehingga materi yang disusun melalui SAP dapat direalisasi dalam setiap pertemuan. Namun ini hanya sebatas sebagian dosen saja yang mempunyai kesadaran dalam mengajar, masih ada sebagian dosen yang mengajar tanpa menggunakan SAP dalam mengajar, sehingga mahasiswa tidak mengetahui materi apa yang akan diberikan dalam tiap-tiap sesi pertemuan materi kuliah.

b. Penelitian merupakan salah satu tugas dari pada dosen yang tertuang dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga sudah selayaknya para dosen untuk lebih memainkan perannya melalui Penelitian. Diharapkan dengan penelitian yang dilakukan oleh para dosen Di Universitas Malikussaleh, khususnya di FISIP mampu memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan sehingga kualitas

Pendidikan dapat tercapai banyak sarana maupun sumber-sumber penelitian yang bisa diikuti oleh dosen dalam melakukan penelitian sumber penelitian yang bisa diikuti oleh dosen dalam melakukan penelitian.

Dalam hal penelitian untuk dosen, maka di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jumlah penelitian yang telah dilakukan akan terlihat berdasarkan data tabel di bawah:

Seperti yang dijelaskan oleh Pembantu Dekan I Bidang Akademik kepada penulis:

“ Saat ini banyak sumber yang bisa dimanfaatkan oleh para dosen Di fisip Unimal, seperti penelitian dosen muda, penelitian hibah bersaing, penelitian mandiri dan lain-lain. Kami dari pimpinan fakultas ISIP Universitas Malikussaleh meng harapkan teman-teman untuk berpartisipasi dalam berbagai penelitian yang, pada akhirnya dapat memberikan sumbangsih pemikiran oleh para dosen dalam peningkatan kualitas pendidikan, (wawancara, 25 Agustus 2013)”.

Pada kesempatan yang sama penulis juga mewawancarai salah satu dosen di FISIP Universitas Malikussaleh, antara lain:

“ Penelitian merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan kan oleh seorang dosen, sehingga dari itu sudah sepatutnya dosen untuk ikut serta dalam peneliti, sehingga keselarasan tugas dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat dilaksanakan secara bersama, jadi tidak saja dalam pengajaran saja tapi, harus sering terlibat baik dalam penelitian maupun pengabdian masyarakat, (wawancara, 25 Agustus 2013)”.

Sementara pada kesempatan yang berbeda, penulis juga mewawancarai Pembantu Dekan I Bidang Akademik, mengatakan bahwa:

“ Kondisi saat ini di FISIP Unimal, hanya sebagian dosen yang tertarik untuk melakukan penelitian. Hal ini disebabkan oleh masih ada sebagian dosen hanya memfokuskan tugasnya hanya mengajar saja. Tetapi ada juga permasalahan yang disebabkan, mengapa masih rendahnya keinginan dari pada dosen untuk melakukan penelitian adalah tidak tersediannya informasi maupun biaya yang didapatkan oleh dosen untuk melakukan penelitian, untuk hal pembiayaan ada anggapan dari sebagian dosen yang merasa dana yang didapatkan oleh dosen kalau penelitiannya dimenangkan, harus dipotong oleh LPPM universitas. Padahal pemotongan biaya tersebut merupakan ketentuan dalam aturan. Sehingga ini menjadi alasan mengapa kurang keinginan dosen meneliti khususnya di FISIP Universitas Malikussaleh (wawancara 26 Agustus 2013)” .

Berdasarkan data di atas terlihat, bahwa ada berbagai permasalahan yang dijumpai di FISIP Unimal, dalam hal Penelitian bagi dosen. Permasalahannya antara lain masih kurangnya informasi tentang peluang mengikuti penelitian, selain itu juga masih kurangnya dana penelitian yang didapatkan oleh dosen, sehingga dosen hanya memorsirkan tugasnya dalam mengajar saja tanpa ikut serta dalam berbagai penelitian.

Akan tetapi pada saat Kebijakan tentang Sertifikasi Dosen diberlakukan khususnya di FISIP Unimal. Adanya suatu peningkatan dan kompetensi yang rasakan oleh dosen dalam hal penelitian. Berdasarkan hal tersebut penulis mewawancarai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Malikussaleh, kepada penulis menjelaskan bahwa:

“Peningkatan penelitian yang ada di FISIP Unimal saat ini yang berhubungan dengan pelaksanaan sertifikasi dosen, sudah mulai banyak keinginan dari dosen khususnya di Fisip Unimal melakukan berbagai bentuk penelitian. Akan tetapi bila dilihat dari spesifik secara mendalam bahwa ketertarikan dosen melakukan berbagai bentuk penelitian itu, bukan atas dedikasi atau keinginan dari dosen itu sendiri. Masih ada sebagian dosen kita yang melakukan penelitian sebagai prasyarat untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi, bukan menjadikan bentuk penelitian merupakan tugas utama yang harus dilakukan oleh dosen sebagai implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam dunia pendidikan (wawancara 26 Agustus 2013)”.

Pada kesempatan yang sama penulis juga mewawancarai Pembantu Dekan I Bidang Akademik, kepada penulis menjelaskan bahwa :

“ Masih rendahnya Keinginan dari dosen FISIP Unimal dalam melakukan berbagai bentuk penelitian yang di sediakan oleh DIKTI melalui Lembaga LPPM. Disini saya melihat kurangnya koordinasi yang ada antara Fakultas FISIP Unimal dengan LPPM Universitas. Permasalahan ini terjadi karena tidak ada komunikasi dan lemahnya koordinasi yang ada, maksudnya adalah berbagai informasi informasi yang hendaknya diberikan kepada Fakultas. Selain itu juga kita jangan menyalahkan LPPM universitas, justru semestinya juga dosen FISIP juga harus mencari sendiri berbagai informasi yang berhubungan dengan berbagai bentuk penelitian.

Sehingga dengan hubungan timbal balik antara dosen di Fakultas dengan LPPM universitas yang baik, maka diharapkan akan lahirnya banyak bentuk-bentuk penelitian yang bagus dan bermutu, (wawancara 26 Agustus 2013)".

Berdasarkan grafik di atas terlihat jelas bahwa adanya suatu peningkatan yang sangat signifikan terjadi dari tahun 2008 sampai 2012. Peningkatan yang signifikan ini terjadi untuk jenis penelitian dosen muda, penelitian mandiri sampai jenis penelitian hibah bersaing, sehingga dapat terlihat bahwa semenjak Sertifikasi Dosen di FISIP Unimal, adanya peningkatan terhadap dosen untuk melakukan penelitian, dikarenakan dalam Sertifikasi Dosen dituntut supaya dosen lebih kompetitif maupun inovatif dalam melaksanakan tugas Tri Dharma Pengajaran Tinggi.

c. Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan butir ke tiga yang tertuang dalam tri dharma perguruan tinggi, yang menjadi kewajiban bagi setiap dosen dalam melaksanakan tuntutan tugasnya sebagai tenaga profesional.

Sebagaimana hubungan dengan Pengabdian Kepada Masyarakat, penulis mewawancarai Dekan FISIP Universitas Malikussaleh, kepada penulis mengatakan:

" Selama ini Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), khusus untuk dosen dilakukan melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilakukan bersama-sama dengan mahasiswa, yang terlebih dahulu ditentukan oleh LPPM Universitas Malikussaleh. Dalam hal ini dosen menjadi Superrvasioer dalam kegiatan KKN mahasiswa. Selain itu juga pengabdian yang dilaksanakan oleh dosen melalui kegiatan Eksternal kampus atau diluar jam ngajar, yang dilakukan oleh atau diprakarsai oleh dosen yang bersangkutan untuk kenaikan angka kredit, dengan ketentuan yang telah diatur dalam aturan Fakultas Universitas, (wawancara 27 Agustus 2013)".

Menurut penjelasan Pembantu Dekan III Bidang kemahasiswaan FISIP Universitas Malikussaleh mengatakan kepada penulis:

" Untuk pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang merupakan unsur dalam Tri dharma Perguruan Tinggi dilakukan secara

bersama-sama dengan melibatkan dosen sebagai fasilitator dari pelaksanaan KKN. Selama ini bentuk pengabdian dosen terhadap masyarakat diwujudkan melalui KKN dan hal yang berhubungan kegiatan diluar dari kegiatan internal kampus. Seperti memberikan penyuluhan dan bimbingan yang sifatnya formal maupun dengan nonformal. Karena kita ketahui bersama bahwa dosen merupakan fasilitator perubahan di tengah-tengah masyarakat melalui kemampuan ilmu yang dimilikinya, (wawancara 29 Agustus 2013)".

Dari penjelasan Pembantu dekan Bidang Kemahasiswaan, terlihat bahwa kegiatan pengabdian dosen selama ini di FISIP Universitas Malikussaleh, dilakukan melalui pelaksanaan KKN maupun hal atau kegiatan diluar kegiatan kampus yang berhubungan dengan Pengabdian Kepada masyarakat.

Untuk hal pengabdian masyarakat dosen Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu politik, Universitas Malikussaleh, selama adanya sertifikasi banyak mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat signifikan.

Selama ini Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, khususnya dosen dalam hal Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai beberapa tugas utama diantaranya, dapat di jelaskan melalui tabel sebagai berikut:

Pembantu Dekan I Bidang Akademik FISIP Universitas Malikussaleh, mengatakan kepada penulis:

“ Berbagai bentuk pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen FISIP saat ini, baru hanya dalam hal Menduduki jabatan pimpinan dalam lembaga Pemerintah/Pejabat Daerah dibebaskan dari jabatan organiknya, Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, Memberilatihan/penyuluhan/penataran pada masyarakat, Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan, Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat saja. Kami dari unsur pimpinan sangat mengharapkan keseriusan dan partisipasi dari rekan-rekan dosen untuk lebih proaktif dalam berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Dengan cara dosen di FISIP harus berkoordinasi langsung dengan LPPM Universitas untuk mencari berbagai informasi yang berhubungan dengan pengabdian kepada masyarakat. Saya mengharapkan dengan demikian akan ada lebih banyak lagi

berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen FISIP Universitas Malikussaleh (wawancara 29 Agustus 2013)".

Dari penjelasan tabel di atas, jelas terlihat bahwa selama ini dalam hal pengabdian kepada masyarakat Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, membagi atas 5 tugas utama yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen untuk ikut serta dalam tugas-tugas yang telah ditetapkan dalam aturan.

Seperti Menduduki jabatan pimpinan dalam lembaga Pemerintahan/Pejabat Negara maupun daerah harus dibebaskan dari jabatan organiknya, Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, Memberi latihan/penyuluhan/penataran pada masyarakat, Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan,serta Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.

Pada kesempatan yang berbeda Dekan FISIP Universitas Malikussaleh, mengatakan kepada penulis:

“ Menyangkut masih rendahnya keinginan sebagian dosen FISIP untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, ini disebabkan karena sebagian mereka menganggap melaksanakan pengabdian kepada masyarakat hanya sebatas memenuhi kewajiban dan syarat untuk mendapatkan sertifikasi saja, bukan atas kerelaan hati dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Selain itu juga menurut saya (Dekan FISIP Universitas Malikussaleh), mengatakan masih ada dosen di sini hanya mengajar saja, karena dengan demikian maka waktu luang yang didapatkan oleh sebagian dosen cukup banyak, ada sebagian dosen yang memanfaatkan situasi seperti ini untuk hal-hal yang lain, seperti: mengajar ditempat lain, berwiraswasta, bahkan ada sebagian dosen yang hanya datang ke kampus pada saat jam ngajar saja, sehingga kalau ada sebagian mahasiswa yang ingin konsultasi skripsi, harus membuat janji terlebih dahulu dengan dosen yang bersangkutan diluar jam tugas di kampus, (wawancara 29 Agustus 2013)".

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa ada beberapa penyebab mengapa sebagian dosen FISIP Universitas Malikussaleh kurang tertarik melakukan berbagai pengabdian kepada masyarakat.

Sementara itu dalam memahami model konseptual dalam penelitian ini ada beberapa aspek yang dikaji diantaranya:

a. Dalam hal ini ada beberapa dampak penilaian terhadap program sertifikasi dosen dalam berbagai aspek kegiatan di Civitas Akademika FISIP Universitas Malikussaleh saat ini, seperti aspek kemampuan dosen dalam mengajar, aspek kinerja dosen, keterlibatan dosen dalam berbagai kegiatan, serta kegiatan dosen dalam pengabdian kepada masyarakat.

Dari penjelasan tabel di atas terlihat bahwa, dampak penilaian program sertifikasi dosen untuk FISIP Universitas Malikussaleh dapat terlihat dari kemampuan dosen dalam mengajar, khusus penguasaan teori 65% dan pembuatan SAP 60 %. Khusus untuk penguasaan teori dosen dalam mengajar saat ini masih sangat rendah, ini disebabkan karena keseriusan dosen rendah terhadap penguasaan teori dalam memberikan materi kuliah kepada mahasiswa. Selain itu juga sumber-sumber referensi yang digunakan baik dari buku dan artikel masih menggunakan referensi yang lama yang memang harus diperbaharui sehingga sesuai dengan kondisi sekarang dan perkembangan zaman.

Untuk pembuatan SAP bagi dosen di FISIP di Universitas Malikussaleh masih rendah kesadarannya, ini bisa dilihat masih adanya sebagian dosen yang belum membuat SAP di awal semester berjalan yang nantinya akan diberikan kepada mahasiswa. Selain itu uga masih ada sebagian dosen yang belum menyerahkan SAP diawal semester kepada jurusan untuk pelaporan secara priodik.

Dalam hal kehadiran dosen untuk mengajar masih rendah kesadarannya, ini disebabkan karena masih adanya dosen yang jarang masuk dalam mengajar dengan berbagai alasan, seperti kesibukan

ditempat kerja lain, sehingga dosen yang bersangkutan menyuruh asisten dosen yang dari mahasiswa yang sudah selesai kuliahnya untuk mengajar mata kuliah tersebut. Selain itu dalam hal ketepatan waktu dosen masuk mengajar juga masih agak rendah, masih ada sebagian dosen yang masuk kuliahagak molor atau telat dari waktu yang telah ditentukan. Seperti masuk kuliah pagi, dalam aturan jam 08.00WIB, akan tetapi masih ada sebagian dosen yang masuk sudah jam 08.30 bahkan ada jam 09..00 WIB.

Dalam hal kehadiran dosen untuk mengajar masih rendah kesadaranya, ini disebabkan karena masih ada dosen yang jarang masuk dalam mengajar dengan berbagai alasan, seperti kesibukan ditempat kerja lain, sehingga dosen yang bersangkutan menyuruh Asisten dosen yang dari kalangan mahasiswa sudah selesai pendidikanya untuk mengajar mata kuliah yang diajarkan. Selain itu juga dalam hal ketepatan waktu dosen masuk mengajar juga masih agak rendah, masih ada sebagian dosen yang masuk kuliah agak molor dari waktu yang telah ditetapkan. Seperti masuk kuliah pagi, dalam aturan jam 08.00WIB, akan tetapi masih ada sebagian dosen yang masuk sudah jam 08.30 bahkan ada 09.00WIB.

Keterlibatan dosen dalam berbagai bentuk penelitian khususnya di FISIP Universitas Malikussaleh, saat ini masih sangat rendah. Ini bisa dilihat dari jumlah penelitian yang telah dicapai oleh dosen fisip Unimal masih kecil jumlahnya. Ini disebabkan karena masih ada sebagian dosen yang enggan melakukan penelitian, kerana akan menyita waktu saja, selain itu juga masih ada sebagian dosen yang kurang tertarik meneliti dikarenakan dana yang tersedia untuk meneliti dirasa tidak mencukupi, selain itu juga keterbatasan berbagai informasi yang didapatkan oleh dosen FISIP yang berhubungan dengan berbagai penelitian dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Universitas Malikussaleh.

Dalam hal keterlibat dalam pengabdian kepada masyarakat, khususnya dosen Fisip Universitas Malikussaleh juga masih rendah.

Ini bisa dilihat dari sebagian dosen Unimal yang terlibat dari berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Ini disebabkan oleh tidak maunya dosen disibukkan dengan hal pengabdian, jadi sebagian dosen lebih memilih untuk mengajar saja ketimbang untuk terjun aktif dari berbagai hal pengabdian kepada masyarakat. Untuk saat ini pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen FISIP universitas malikussaleh cuma dalam kegiatan pelaksanaan KKN mahasiswa serta pelaksanaan sosialisasi pemberdayaan masyarakat.

Dalam menilai dari dampak Sertifikasi Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh saat ini sudah berjalan dengan baik, semenjak kebijakan serifikasi di tetapkan oleh pemerintah dan sudah ada perubahan yang sangat signifikan ini dapat terlihat.

c. Perjalanan Sertifikasi Dosen di Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik sedah lama berjalan, banyak perubahan yang dirasakan dalam segala kegiatan Civitas Akademika, seperti pelaksanaan proses belajar mengajar, pelaksanaan penelitian bagi dosen serta Pengabdian kepada masyarakat. Sementara itu juga dalam perjalan sertifikasi dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh tidak mengalami permasalahan yang berarti dalam dampak keberadaan sertifikasi selama ini.

Untuk itu dalam mengeksplor dari segala program serifikasi dosen maka penulis membagi atas indikator yang juga elemen dasar Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu:

1) Bentuk kegiatan penelitian di Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Malikissaleh sudah berjalan dengan baik ini bisa dilahat dari berbagai pencapaian yang ditunjukkan baik dalam keterlibatan penelitian, akan tetapi berbagai bentuk penelitian yang dilakukan oleh dosen FISIP belum mampu menunjukkan pengaruh yang signifikan. Ini terbukti dengan jumlah penelitian yang diikuti

oleh dosen masih sedikit, ini bisa terlihat dalam data sebagai berikut:

Berhubungan dengan masih lemahnya penelitian yang dilakukan oleh dosen FISIP Universitas Malikussaleh, peneliti mewawancarai Ketua LPPM Universitas Malikussaleh, kepada penulis mengatakan:

“Selama ini Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat universitas malikussaleh telah melakukan koordinasi dengan berbagai fakultas terutama FISIP, memang kita akui masih lemahnya koordinasi yang kita bangun terutama kepada fakultas, akan tetapi LPPM selama ini telah memberikan informasi kepada seluruh dosen di fakultas terutama ke Fakultas FISIP tentang berbagai penelitian, sehingga dosen di fakultas mengetahui berbagai penelitian. Tidak cukup dari itu juga kita LPPM universitas malikussaleh juga telah ada web. Yang disediakan supaya dosen di fakultas dapat mengakses berbagai informasi tentang penelitian secara online (wawancara 1 September 2013)”.

Pada kesempatan yang sama, penulis juga mewawancarai Staf di bagian LPPM Universitas Malikussaleh, kepada penulis mengatakan:

“ Kita dari LPPM Universitas sudah sering memberikan informasi ke seluruh fakultas terutama sekali FISIP berupa dalam bentuk surat, sehingga seluruh informasi penelitian dari LPPM Universitas dapat di ketahui oleh dosen di fakultas. Akan tetapi selama ini yang saya rasakan agak kurang partisipasi atau umpan balik dari dosen di fakultas untuk menanyakan atau membutuhkan informasi dari LPPM, hanya sebagian dosen saja yang sering menanyakan informasi kepada kami tentang penelitian (wawancara 1 September 2013)”.

Dari jumlah tabel di atas terlihat jelas bahwa berbagai bentuk penelitian yang sudah dilakukan atau dicapai oleh dosen Fisip Universitas Malikussaleh saat ini. Walaupun masih belum terlalu banyak penelitian yang telah dilakukan oleh dosen FISIP Universitas Malikussaleh, namun dari angka yang ditunjukkan oleh data sudah ada perubahan kearah yang lebih baik dalam bentuk penelitian.

Pada kesempatan yang berbeda, penulis mewawancarai Pembantu Dekan I Bidang Akademik, kepada penulis mengatakan bahwa:

“ Kurangnya partisipasi yang ditunjukkan oleh sebagian dosen di FISIP untuk terlibat dalam penelitian, ini dikarenakan masih menganggap bahwa melakukan penelitian hanya sebatas memenuhi prasyarat untuk kenaikan pangkat atau mendapatkan sertifikasi. Ini merupakan sebuah hal yang keliru karena penelitian merupakan suatu kewajiban yang mutlak yang harus dilakukan oleh seorang dosen, sehingga dengan adanya sertifikasi dosen lebih memacu semangat dan konsistensi dosen untuk meningkatkan kualitas dosen tidak hanya melalui pengajaran saja bahkan lebih juga kepada penelitian dan pengabdian masyarakat (wawancara 1 September 2013)”.

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa untuk sementara memang sangat terbatasnya jumlah maupun kualitas penelitian di FISIP Universitas Malikussaleh, ini sebuah fenomena yang terjadi saat ini di FISIP Universitas Malikussaleh saat ini.

2) Untuk jenis program sertifikasi dosen yang kedua adalah pengabdian masyarakat, dalam hal ini di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Malikussaleh telah melakukan berbagai pengabdian masyarakat, yang tergabung dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Malikussaleh.

Dalam jenis pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen FISIP Unimal antara lain: untuk kegiatan Kuliah keja Nyata (KKN) seperti menjadi Supervisor berjumlah 30 orang untuk tahun 2013 ini, dimana untuk kegiatan KKN tahun ini diadakan di 3 kabupaten antara lain: Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bireuen. Secara seksama

Berkenaan dengan itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, menjelaskan kepada penulis:

“ Keterlibatan hanya sebagian dosen FISIP dalam berbagai pengabdian kepada masyarakat, ini terjadi karena mereka belum memahami dari implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, sebenarnya bila dihayati Secara seksama pengabdian kepada

masyarakat merupakan tugas pokok selain mengajar dan melakukan penelitian. Akan tetapi di sini saya melihat masih kurangnya partisipasi dan keseriusan dari dosen kita untuk melakukan pengabdian masyarakat, sebagian mereka beralasan dengan mengikuti pengabdian kepada masyarakat, maka sebagian waktu luang mereka akan tersita, dan tidak memberikan nilai kontribusi bagi finansial sebagian dosen, (wawancara, 7 September 2013)".

c. Setelah mengeksplor dari berbagai kegiatan Sertifikasi Dosen seperti Penelitian dan Pengabdian Masyarakat khususnya di Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, maka terlihat suatu bentuk yang berhubungan dengan sertifikasi dosen. Untuk itu yang menjadi indikator dalam perbaikan kondisi di Civitas Akademika khususnya di FISIP Universitas Malikussaleh.

Dampak sertifikasi dosen terhadap perbaikan kondisi civitas akademika FISIP Unimal dapat di bagi dari berbagai bentuk seperti pengajaran, untuk sisi pengajaran pelaksanaan proses belajar mengajar belum berjalan dengan baik karena ada sebagian dosen yang mengajar tanpa SAP. Untuk penelitian terdapat sebagian dosen yang tidak tertarik melakukan penelitian, sehingga terdapat sedikit jumlah penelitian yang di buat oleh dosen FISIP Universitas Malikussaleh, sebagian dari itu kualitas penelitian juga masih kurang berkualitas, sehingga perlu adanya pemberian pengetahuan tentang bagaimana pembuatan penelitian yang baik dan benar. Untuk jumlah pengabdian masyarakat sangat terbatas yang diikuti oleh dosen FISIP, untuk sementara bentuk pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen FISIP masih sebatas pelaksanaan kegiatan KKN dan pemberian materi tentang pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat.

Berkenaan dengan dampak program sertifikasi dosen, penulis mewawancarai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, mengatakan kepada penulis:

" Dampak sertifikasi dosen yang dirasakan di FISIP Universitas Malikussaleh saat ini sudah mengarah pada perbaikan kondisi yang

dinamis di Fakultas, walaupun masih belum maksimal. Dilihat dari sisi pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Khususnya untuk penelitian masih kurang adanya motivasi dari dosen untuk melakukan penelitian, sehingga jumlah penelitian juga masih sedikit yang di capai oleh dosen FISIP, masih ada anggapan dari sebagian dosen melakukan penelitian hanya untuk memenuhi kewajiban atau prasyarat kenaikan pangkat saja, (wawancara, 7 September 2013)".

Sementara itu seorang dosen FISIP Universitas Malikussaleh mengatakan kepada penulis:

" Pelaksanaan sertifikasi dosen memang sudah berjalan, akan tetapi masih ada sebagian dosen yang melakukan penelitian bukan karena kemauan dalam diri dosen itu sendiri,akan tetapi karena merupakan syarat kenaikan pangkat atau syarat sertifikasi. Namun bila kita pahami bersama, sertifikasi dosen merupakan usaha apresiasi di berikan kepada dosen untuk meningkatkan kesejahteraan, akan tetapi dibalik itu yang paling penting dengan sertifikasi dosen juga meningkatkan kualitas dan kinerjanya (wawancara, 9 September 2013)".



Sumber: Akademik FISIP Unimal, 2013

2. Hambatan Dalam Pelaksanaan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi di FISIP Universitas Malikussaleh.

a. Dalam pencapaian pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya di FISIP Universitas Malikussaleh, masih terdapat berbagai hambatan yang dijumpai, sehingga dari pada itu penulis mewawancarai Dekan FISIP Unimal:

“ Untuk mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi di FISIP yang lebih baik memang tidak mudah, memang ada berbagai permasalahan yang di jumpai salah satunya antara lain dari dosen maupun mahasiswa. Saya melihat masih adanya dosen yang belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik yang baik, ini bisa dilihat masih adanya dosen yang mengajar tidak konsisten, seperti kedisiplinan dalam waktu mengajar maupun kualitas materi yang disajikan kepada mahasiswa tidak bersifat *Up To Date*. Selain itu juga untuk mahasiswa, saya melihat masih rendahnya pemahaman dan keseriusan mahasiswa dalam mengajar. Mahasiswa masih menganggap jam kuliah merupakan satu-satunya wahana sebagai media belajar, sehingga mahasiswa tidak menggali sendiri materi yang disadurkan oleh dosen. Yang pada akhirnya kita dapat melihat masih kurangnya kualitas maupun baik secara kompetitif maupun secara inovatif yang dimiliki oleh mahasiswa khususnya FISIP Unimal, (wawancara, 27 Agustus 2013)”.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa masih rendahnya kesadaran sebagian dosen di FISIP Universitas Malikussaleh dalam melaksanakan perkuliahan, seperti tidak konsistennya dosen dalam mengajar yang berhubungan dengan disiplin waktu dosen dalam proses belajar mengajar.

Pada kesempatan yang sama, penulis juga mewawancarai Pembantu Dekan Bidang akademik, mengatakan kepada bahwa:

“ Hambatan dan permasalahan yang di jumpai dalam pencapaian pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, salah satunya individu dosen itu sendiri dalam melaksanakan tugas baik dalam mengajar, penelitian, maupun melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Sehingga disini diperlukan keseriusan dan itikad baik dari dosen dalam melaksanakan tugasnya, (wawancara, 27 Agustus 2013)”.

Memang sudah sepatutnya dalam pelaksanaan atau pencapaian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, memang sangat dibutuhkan keseriusan dari dosen dalam melaksanakan tugasnya, sementara pada kesempatan yang berbeda penulis juga mewawancarai salah satu dosen yang belum tersertifikasi di FISIP Unimal, mengatakan bahwa:

“ Untuk saat ini saya belum tersertifikasi, namun saya tetap konsisten dalam mengajar, saya terus mencoba untuk menyampaikan materi-materi yang actual, dan ini saya sesuaikan dalam SAP(satuan ajaran pembelajaran) pada tiap semesternya.Selain itu juga saya melihat, belum ada bentuk perbedaan yang sangat signifikan antara dosen yang sudah tersertifikasi dengan yang belum di FISIP Unimal.Semestinya bila dilihat dari filosofi keberadaan sertifikasi dosen, itu merupakan apresiasi pemerintah kepada dosen dalam peningkatan kesejateraan maupun peningkatan nilai kompetitif dalam pencapaian nilai profesionalisme, (wawancara, 2 September 2013)”

Sementara itu Dekan Fakultas dan Ilmu sosial dan Ilmu politik Universitas Malikussaleh, mengatakan kepada penulis:

“ Hambatan dalam pencapaian pelaksanaan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya di FISIP Unimal saat ini, bukan saja terhadap kinerja profesionalisme kemampuan dosen dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, tapi ada factor-faktor lain seperti kemampuan dan keseriusan mahasiswa dalam memahami materi yang diberikan oleh dosen pada saat mengajar,(wawancara, 2 September 2013)”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat bahwa terdapat berbagai permasalahan yang dijumpai dalam pencapaian pelaksanaan tri dharama Perguruan tinggi di Fisip Unimal. Salah satu dari permasalahan adalah konsisten maupun itikad dari dosen dalam melaksanakan tugasnya, baik dalam mengajar, penelitian, maupun dalam pengabdian kepada masyarakat.

b. Dalam hal kurang tertariknya dosen dalam hal penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, maka penulis mewawancarai salah satu dosen di FISIP Universitas Malikussaleh, Muhammad Ali, S.Sos.,MA, mengatakan penulis:

“ Kalau menurut saya, ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi salah satunya masih ada sebagian dosen di FISIP yang hanya mengejar saja tanpa ingin terlibat dalam berbagai penelitian maupun pengabdian. Ada beberapa penyebab kenapa sebagian dosen FISIP tidak ingin melakukan penelitian, antara lain; ada sebagian dosen yang tidak mengrespon tentang penelitian karena hanya melihat melakukan penelitian sebatas tugas atau prasyarat dalam kenaikan pangkat dan hal lain-lain bukan karena panggilan jiwa atau ketulusan hati karena ingin meneliti. Selanjutnya ada sebagian dosen di FISIP yang kurang ingin meneliti karena setiap penelitian yang dibuat tidak pernah di terima (lolos verifikasi), seperti penelitian Hibah bersaing dari DIKTI. Selanjutnya ada juga sebagian dosen yang tidak ingin melakukan penelitian karena ada pemotongan dana penelitian sehingga sebagian dosen enggan melakukan penelitian, (wawancara, 2 September 2013)".

Sehingga dari penjelasan wawancara di atas terlihat bahwa salah satu hambatan yang dirasakan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fisip Universitas Malikussaleh selain factor sarana dan prasaran, kurangnya tenaga pengajar S2 maupun S3 saat ini, juga yang paling signifikan adalah kurang minat sebagian dosen yang ingin melakukan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat.

c. Dalam hal kurangnya sarana dan prasarana di FISIP Universitas Malikussaleh, maka penulis mewawancarai salah satu dosen di FISIP Universitas Malikussaleh, kepada penulis mengatakan bahwa:

“Selama ini mengalami hambatan dalam pencapaian Tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam proses belajar mengajar, ini dikarenakan sarana dan prasarana yang tersedia di ruang belajar sangat minim. Seperti ruangan belajar tidak dilengkapi dengan Infocus, sehingga materi yang hendak kami sajikan tidak bisa ditampilkan kepada mahasiswa, (wawancara, 2 September 2013)".

Selain itu penulis mewawancarai Pembantu Dekan Bidang Keuangan dan Administrasi Umum, kepada penulis menjelaskan bahwa:

Sudah 3 tahun terakhir ini perkuliahan di FISIP Unimal saat ini berjalan diruangan yang tidak mendukung dalam hal proses belajar mengajar. Sebenarnya ruang kuliah yang selama ini di tempati oleh mahasiswa adalah perumahan dosen yang di sulap menjadi ruang belajar.karena gedung Fakultas Fisip belum selesai dibangun dikampus. Sehingga komplek perumahan dosen yang di hibah oleh perusahaan Exxon Mobil kepada Universitas Malikusaleh di peruntukkan untuk ruang belajar mahasiswa FISIP Universitas Malikussaleh, (wawancara, 2 September 2013)".

Terlihat bahwa dalam hal sarana dan prasara perkuliahan di FISIP Universitas memang sangat tidak mendukung, ini bisa dilihat ruang belajar yang tidak memenuhi standar ruang perkuliahan. Selain itu juga ruang belajar yang selama ini digunakan tidak dilengkapi dengan fasilitas infokus maupun jaringan listrik, sehingga tidak memepuat proses belajar mengajar merasa nyaman bagi dosen maupun mahasiswa.

Dari penjelasan di atas tentang hambatan dalam pencapain Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik.

Berkenaan dengan masih sangat minimnya sarana dan prasarana yang ada di FISIP Universitas Malikussaleh, Dekan FISIP Unimal menjelaskan kepada penulis:

"Kita saat ini menyadari dari sisi sarana dan prasarana merupakan suatu kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dengan lancar, secara keseluruhan yang kita rasakan sekarang ini banyak ruangan belajar tidak ada infocus yang memadai, sehingga para dosen dalam mengajar mengalami kendala, ini sangat berdampak pada peningkatan kinerja dosen dan kualitas dosen. Permasalahan kurangnya sarana dan prasarana yang dirasakan memang tidak berhubungan langsung dengan sertifikasi dosen, akan tetapi bila di hubungkan dengan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, mengalami kendala karena berhubungan dengan bentuk pengajaran yang dilaksanakan oleh dosen. Permasalahan klasik seperti ini tidak saja dirasakan oleh Fisip saja, akan tetapi fakultas Ekonomi dan Hukum juga merasakan dampak yang sama, (wawancara, 2 September 2013)".

3. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di FISIP Universitas Malikussaleh

Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya di FISIP Universitas Malikussaleh saat ini, sudah berjalan dengan baik akan tetapi belum maksimal. Ini disebabkan oleh adanya berbagai masalah yang dihadapi, seperti lemahnya minat sebagian dosen untuk melakukan penelitian, kurang tertariknya sebagian dosen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat, serta belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan perkuliahan di FISIP Universitas Malikussaleh.

Untuk itu dalam menghadapi permasalahan ini, diperlukan berbagai upaya-upaya dalam mengatasi hambatan dalam pencapaian pelaksanaan Tri Dharama Perguruan Tinggi, dalam hal ini penulis mewawancarai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas malikussaleh, kepada penulis mengatakan bahwa:

“ Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan pencapaian Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya di FISIP Universitas Malikussaleh memang sangat kompleks. Maksudnya kita harus membedakan permasalahannya, seperti masih rendahnya minat sebagian dosen dalam melakukan penelitian. Ini harus dilakukan melalui upaya yang serius, ini semua harus berangkat dari individu dosen itu sendiri. Karena tanpa keseriusan dan kemauan dari dosen tersebut, sangat sulit untuk menggalakkan penelitian bagi para dosen khususnya di FISIP Universitas Malikussaleh. Selanjutnya menurut saya harus ada stimulus atau rangsangan diberikan kepada dosen seperti informasi yang cukup terhadap berbagai bentuk penelitian. Ini bisa terwujud melalui koordinasi yang baik antara LPPM Universitas malikussaleh dengan dosen di Fakultas ISIP (wawancara, 2 September 2013)”.

Pada kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, mengatakan kepada penulis:

“ Koodinasi disini maksudnya adalah harus ada hubungan timbal balik antara LPPM dengan Dosen di FISIP, tujuannya agar semua atau berbagai informasi yang berhubungan dengan penelitian dosen Fisip dan mengaksesnya secara langsung. Selanjutnya LPPM juga harus menyediakan fasilitas penunjang berbagai informasi

tentang penelitian, kalau perlu setiap informasi tentang penelitian dosen dapat mengakses secara online kapan saja, (wawancara, 2 September 2013)".

Pada kesempatan yang berbeda, ketua LPPM Universitas Malikussaleh, mengatakan kepada penulis:

" Kami dari pihak LPPM Universitas telah melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan penelitian bagi para dosen di seluruh fakultas yang ada di UNIMAL. Kegiatan tersebut seperti penyuluhan atau sosialisasi pembuatan proposal penelitian, acara ini ditujukan kepada seluruh dosen yang ada di fakultas agar tahu atau memahami bagaimana membuat penelitian yang baik dan benar. Akan tetapi dari jumlah peserta yang mengikuti memang tidak semua dosen yang hadir, ini memang saat disayangkan karena acara ini memberikan pemahaman bagi dosen dalam membuat penelitian (wawancara 3 September 2013)".



Keterangan: Ketua LPPM Universitas Malikussaleh membuka Pelatihan Proposal Penelitian

Sumber: LPPM Universitas Malikussaleh, 3013.

Dari hasil dokumentasi di atas terlihat bahwa masih ada juga dosen yang tidak mengikuti pembekalan atau sosialisasi pembuatan penelitian yang di adakan oleh LPPM Universitas Malikussaleh, hal ini merupakan fenomena yang terjadi di universitas malikussaleh tentang partisipasi dosen yang kurang tertarik mendalami atau

mengetahui bagaimana pembuatan penelitian yang baik dan benar. Kondisi seperti ini juga di alami oleh sebagian dosen FISIP tidak hadir dalam acara pembekalan pembuatan proposal penelitian yang di adakan oleh LPPM Unimal.



Keterangan : Ketua LPPM Universitas Malikussaleh membuka Pelatihan Proposal Penelitian

Sumber: LPPM Universitas Malikussaleh, 3013.

Dari penjelasan dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, terlihat bahwa perlu ada suatu keseriusan dan kemauan yang harus dimiliki oleh dosen khususnya FISIP Universitas Malikussaleh supaya dosen termotifasi untuk melakukan penelitian. Selain itu juga perlu ada suatu koordinasi yang baik antara LPPM Universitas dengan dosen FISIP universitas malikussaleh agar berbagai informasi yang dibutuhkan oleh dosen FISIP dapat di akses bahkan melalui online.

Selain itu pada kesempatan yang berbeda, penulis juga mewawancarai Pembantu Dekan IV Bidang Sistem Informasi dan Kerjasama, kepada penulis menjelaskan:

“ Menyangkut masih rendahnya minat pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen FISIP Universitas

Malikussaleh, maka kami dari unsur pimpinan Fakultas mencoba untuk mencari solusinya dengan cara meroling atau mengilir setiap bentuk pengabdian kepada masyarakat, khusus dari pelaksanaan KKN Mahasiswa, untuk menjadi Supervisor. Dalam hal ini baru sebatas pelaksanaan KKN saja, sehingga dengan cara seperti itu diharapkan setiap dosen di FISIP terbiasa dengan pengabdian masyarakat. Walaupun cara seperti ini baru sebatas pelaksanaan KKN, namun dengan cara seperti ini akan mendorong dosen kita terlibat langsung dengan pengabdian (wawancara, 4 September 2013)".

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen FIIP saat ini hanya sebatas pelaksanaan kegiatan KKN mahasiswa yang menjadi Supervisor, akan tetapi pimpinan fakultas melakukan roling atau penyamarataan semua dosen untuk terlibat dalam pelaksanaan KKN. Di bawah ini akan penulis tampilkan dokumentasi pembekalan mahasiswa KKN beserta supervisor dalam hal ini dosen, daerah yang menjadi agenda pelaksanaan KKN tahun 2013 ini di Aceh Tengah, dokumentasi pembekalan mahasiswa KKN dapat di lihat di bawah ini :



Keterangan: Rektor Universitas Malikussaleh melepas peserta KKN 2013
Sumber: LPPM Unimal 2013, Pembekalan mahasiswa KKN ke Aceh Tengah.

Selanjutnya dalam hal pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen FISIP Universitas Malikussaleh, penulis mewawancarai salah satu dosen FISIP Universitas Malikussaleh, kepada penulis mengatakan:

“ Memang diakui bahwa ada sebagian dosen yang kurang tertarik dalam berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Bila dikaji secara mendalam ketidak tertarikan dosen dalam pengabdian kepada masyarakat ada berbagai macam permasalahan, yakni ada yang gak mau menyita waktu sehingga sebagian dosen hanya mengajar saja, selebihnya dia bisa lebih banyak waktu dengan keluarganya. Ada sebagian lagi yang memang hanya mengajar, selebih waktunya di gunakan untuk berbagai hal seperti berwiraswasta dan kegiatan-kegiatan lain. Sehingga untuk melihat situasi seperti ini, menurut saya harus ada tindakan yang tegas dari pimpinan Fakultas maupun Universitas bagi setiap dosen yang kurang tertarik melakukan pengabdian, seperti memberikan surat peringatan sampai sanksi Adiministrasi bagi dosen tidak pernah melakukan pengabdian kepada masyarakat. Sehingga secara langsung maupun tidak langsung dosen tersebut terlibat dalam berbagai bentuk penelitian (wawancara, 4 September 2013)”.



Keterangan: Rektor Universitas Malikussaleh melepas peserta KKN 2013

Sumber: LPPM Unimal 2013, Pembekalan mahasiswa KKN ke Aceh Tengah.

Dari penjelasan di atas terlihat, bahwa harus ada upaya dalam bentuk suatu tindakan yang tegas dari pimpinan fakultas maupun universitas, kepada dosen FISIP Universitas Malikussaleh yang tidak sama sekali tertarik maupun enggan terlibat aktif dalam berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Sehingga secara langsung maupun tidak langsung Dosen FISIP Universitas Malikussaleh akan terlibat dalam berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Tindakan tegas dari pimpinan itu berupa surat peringatan dan sanksi Administrasi yang di berlakukan kepada dosen yang kurang tertarik melakukan pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian dosen FISIP Unimal akan melakukan pengabdian.



Sumber: Dokumentasi FISIP,2013

C. Pembahasan

- 1. Kebijakan Sertifikasi Dosen mampu memberikan Dampak terhadap peningkatan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.**

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas profesionalnya dan sekaligus sebagai ilmuwan, dosen harus memiliki seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap-perilaku yang harus dihayati dan dikuasai. Di samping memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap-perilaku, sebagai pendidik profesional dan ilmuwan, dosen harus memiliki kompetensi dalam menjalankan tugasnya

Bila dihubungkan dengan Sertifikasi Dosen, dosen juga mempunyai tugas utama yaitu : melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan/ pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kualitas pendidikan (mahasiswa) di perguruan Tinggi serta pemberdayaan masyarakat.

1. Pengajaran merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap dosen pada jenjang strata 1. Dosen yang sudah meraih jabatan akademik tertinggi sebagai guru besar atau profesor tetap harus melakukan tugas pendidikan dan pengajaran pada jenjang Strata 1. Dalam menjalankan tugas pendidikan dan pengajaran, secara khusus dosen wajib menunaikan beban kerja pada pendidikan dan pengajaran dengan bobot – bersama-sama dengan dharma penelitian dan pengembangan ilmu se-kurang-kurangnya 9 (sembilan) SKS setiap semester pada jenjang Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), maupun strata 3 (S3), pada perguruan tinggi tempat bertugas.

Berdasarkan dari hasil penelitian bentuk pengajaran atau proses belajar mengajar Selama ini di Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh berjalan secara efektif, namun masih terdapat beberapa kendala seperti masih ada dosen yang masih

malas atau jarang masuk waktu mengajar, selain itu masih ada dosen yang mengajar masih menggunakan SAP yang tidak direvisi ditiap-tiap semesternya, sehingga materi yang disampaikan oleh sebagian dosen masih menggunakan SAP yang lama atau tidak up to date. Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis mencoba membahas permasalahan tersebut, yang berhubungan dengan pengajaran.

Pengajaran merupakan tugas utama yang harus dilakukan oleh dosen tidak terlepas juga bagi dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, menindak lanjuti masih rendahnya kesadaran sebagian dosen FISIP Universitas Malikussaleh mengajar, maka penulis mencoba memberikan sebuah bahasan menyangkut rendahnya kesadaran sebagian dosen Fisip melaksanakan pelaksanaan tugas mengajar. Untuk itu diperlukan sebuah komitmen dari dosen itu sendiri untuk melaksanakan tugas mengajar, karena perlu dipahami oleh dosen di Fisip bahwa profesionalitas seorang dosen itu diukur sejauh mana kemampuan atau kepakaran yang dimiliki dalam sebuah spesialisasi keilmuan sehingga mampu mentransformasikan ilmu yang dimilikinya kepada peserta didik dalam hal ini mahasiswa. Dalam kemampuan pengajaran dosen di Fisip semestinya harus memberikan materi-materi kepada mahasiswa sesuai dengan SAP (Satuan Acuan Pembelajaran). Hal ini sangat diperlukan karena dengan SAP yang jelas maka pencapaian pemberian materi kepada mahasiswa dapat tercapai sesuai dengan SAP yang telah dibuat oleh dosen yang bersangkutan.

Dalam hal ini juga perlu dipahami konsistensi dosen didalam pengajaran tidak saja menguasai atau memahami keilmuan yang dimilikinya yang akan di transformasikan kepada mahasiswa, akan tetapi yang paling penting adalah pembentukan karakter dari dosen itu sendiri terhadap kedisiplinan dalam mengajar. Penulis melihat masih rendahnya tingkat kedisiplinan sebagian dosen di Fisip di Universitas Malikussaleh, dalam hal ini diperlukan sebuah bentuk pengawasan terhadap dosen yang melaksanakan pengajaran. Selama

ini absensi yang ada di Fisip dilakukan secara manual terhadap dosen yang masuk mengajar. Maka untuk itu diperlukan alat absensi digital (elektronik). Alat ini mendeteksi kehadiran dosen ke kampus atau mengajar setiap hari. Alat ini sangat penting dikarenakan di Fisip Unimal menggunakan absensi secara manual, hal ini memberikan peluang terhadap manipulasi absensi yang dilakukan sebagian dosen sehingga mempengaruhi tingkat kehadiran dosen melaksanakan tugas pengajarannya.

Selain itu dosen Fisip Universitas Malikussaleh dalam melaksanakan proses belajar mengajar dosen harus disiplin, karena selama ini penulis melihat tingkat kedisiplinan dosen disana masih kurang, ada sebagian dosen yang melaksanakan perkuliahan tidak tepat waktu, sehingga mempengaruhi jalannya perkuliahan. Ada sebagian dosen yang masuk kuliah, seperti jam pertama yang mestinya jam 08.00 WIB, ada sebagian dosen masuk jam 8.30 WIB. Sehingga dari itu diperlukan kedisiplinan yang harus ditingkat, sehingga kinerja dosen Fisip Universitas malikussaleh meningkat dalam hal perkuliahan. Menurut penulis cara untuk meningkatkan kedisiplinan harus dilakukan pengawasan oleh pimpinan fakultas, melalui mengevaluasi absensi yang menyangkut kehadiran dosen, selain itu juga harus ada tindakan yang tegas dari pimpinan terhadap dosen yang masih telat melaksanakan perkuliahan.

Tindakan dari pimpinan fakultas bisa berupa, teguran secara lisan maupun sanksi administrasi terhadap sebagian dosen yang masih telat atau tidak disiplin melaksanakan perkuliahan. Selain itu juga menurut penulis untuk dalam kelancaran perkuliahan antusias dari mahasiswa juga harus diperhatikan, maksudnya adalah mahasiswa juga harus serius mengikuti perkuliahan dengan tingkat disiplin yang baik. Mahasiswa harus datang masuk perkuliahan secara tepat waktu, selain itu juga dosen juga harus memberikan sanksi yang tegas kepada mahasiswa sendaainya ada mahasiswa yang

telah masuk jam kuliah, seperti tidak meizinkan masuk perkuliahan sendainya mahasiswa yang bersangkutan telat masuk kuliah.

Selain itu menurut penulis untuk meningkatkan kinerja dosen dalam perkuliah, dosen di FISIP Universitas Malikussaleh harus di evaluasi kinerjanya, saat ini berdasarkan pantauan penulis di FISIP Universitas Malikussaleh, pelaksanaan evaluasinya dilakukan melalui BKD (Beban Kineja Dosen). Namun pelaksanaannya masih mengalami kendala, dimana menyangkut tugas mengajar ada sebagian dosen yang menginput data melalui BKD dengan cara manual, menurut penulis cara seperti ini akan ada ada rekayasa atau manipulasi data absensi, sehingga kinerja dosen dalam melaksanakan perkuliahan diragukan kehadirannya.

Selain itu menurut penulis dengan adanya kebijakan sertifikasi dosen, memang sangat berdampak fositif terhadap proses pengajaran. Akan tetapi dampak itu terasa pada tahun 2013, dikarenakan sekarang ini sendainya dosen dalam BKD (Beban Kinerja Dosen) tersebut tidak mencukupi dari persyaratan yang telah ditentukan maka dosen tidak dibayar sertifikasinya, sehingga dengan adanya sertifikasi ini dosen dituntut untut lebih konsisten terhadap tugas pengajaran terhadap mahasiswa. Sehingga secara langsung akan mempengaruhi kinerja dan loyalitas dosen dalam proses belajar mengajar. Seperti kita ketahui melalui sertifikasi yang dilaksanakan di tiap-tiap Universitas diharapkan dosen di Fisip Universitas Malikussaleh dalam pengajaran harus mampu melaksanakan perkuliah secara baik dan lancar, selain itu juga dosen harus memberikan materi perkuliahan yang diberikan kepada mahasiswa harus *uptodate* dengan kondisi sekarang, bahkan harus ditambahkan materi kearifan lokal yang mampu memberikan pemahaman terhadap sosial budaya kepada mahasiswa.

Disamping itu juga dosen harus bisa menjembatani segala permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa, seperti mahasiswa mengalami permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, disini

dituntut dosen harus peka terhadap psikologis mahasiswa yang berhubungan dengan kehidupan mahasiswa itu sendiri. Kerena menurut penulis kalau dosen mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa, maka secara tidak langsung maupun langsung perkuliahan akan mudah dipahami atau dicerna oleh mahasiswa terhadap transformasi ilmu yang di berikan oleh dosen. Sebab mahasiswa berada di dalam lokal tidak terbebani dengan berbagai permasalahan sehari-hari atau dibawah tekanan kehidupan. Sehingga mahasiswa siap menerima materi yang disampaikan dalam perkuliahan, yang pada akhirnya tujuan pendidikan akan tercapai hasilnya kepada mahasiswa dengan baik.

2. Tugas penelitian merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh dosen, baik secara perorangan maupun berkelompok, dibiayai secara mandiri maupun oleh Lembaga. Dosen wajib menjalankan dharma penelitian bersama-sama dengan dharma pendidikan dan pengajaran dengan bobot sekurang-kurangnya 9 (sembilan) SKS setiap semester. Tugas penelitian dan pengembangan ilmu yang wajib dilakukan dosen dengan bentuk kegiatan sebagaimana berikut:

Menghasilkan karya penelitian, Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah, Mengedit atau menyunting karya ilmiah, Membuat rancangan, karya teknologi, dan karya seni, Menyampaikan orasi ilmiah, dan pembicara seminar.

Dalam hal ini Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Malikussaleh, saat ini masih sangat rendahnya kesadaran dari sebagian dosen terutama sekali dosen yang sudah tersertifikasi untuk melakukan penelitian, maka untuk itu penulis membahas sebagai berikut: penelitian merupakan penjelmaan tugas dari tri dharma perguruan tinggi juga merupakan tujuan akhir dari tujuan sertifikasi bagi dosen. Dengan sertifikasi diharapkan dosen untuk

lebih pro aktif terlibat dari berbagai penelitian yang harus diikuti oleh dosen terutama oleh dosen FISIP Universitas Malikussaleh.

Rendahnya kesadaran yang dimiliki oleh sebagian dosen di FISIP Universitas malikussaleh untuk melakukan penelitian, disebabkan sering gagalnya kompetisi yang diikuti oleh dosen tersebut, maksudnya disini adalah karena sering gagalnya penelitian yang diikuti oleh maka, ada sebagian yang mengurungkan niatnya untuk ikut penelitian pada kesempatan selanjutnya. Untuk itu harus dipahami oleh dosen Fisip Universitas Malikussaleh, bahwa kegagalan atau tidak menangnya kompetisi penelitian yang diikuti dikarenakan karena sebahagian dosen Fisip tidak memahami tentang bagaimana seharusnya penelitian yang baik dan berkualitas. Untuk itu harus ada pelatihan atau bimbingan yang seharusnya diberikan oleh Fakultas atau disediakan oleh LPPM Universitas terhadap dosen yang berhubungan dengan penelitian. Dengan demikian akan memberikan gambaran dan pemahaman yang baik tentang bagaimana pembuatan penelitian yang benar, sehingga kompetisi penelitian yang akan diikuti oleh dosen Fisip akan mendapat nilai yang baik serta dapat dimenangkan, yang pada akhirnya akan meningkatkan minat serta partisipasi dosen dalam melakukan penelitian.

Selain itu juga selama ini ada isu yang berkembang di FISIP Universitas Malikussaleh, bahwa sistem “urut kacang” terjadi disana. Maksudnya adalah bagi dosen yang telah memenangkan penelitian, maka dosen tersebut harus menunggu kesempatan selanjutnya seandainya dosen yang lain sudah memenangkan penelitian, sehingga secara langsung dengan cara seperti ini akan mengurangi semangat yang ada pada sebahagian dosen untuk melakukan penelitian. Untuk itu menurut penulis, diperlukan suatu manajemen yang jelas terhadap kesempatan dosen untuk mengikuti kompetisi penelitian. LPPM universitas Malikussaleh seharusnya harus membuat suatu pola yang baik atau system yang baik, sehingga tidak

ada lagi sistem “urut kacang” yang terjadi atau yang berkembang di fakultas terhadap dosen yang ingin melakukan atau mengikuti kompetisi penelitian yang diselenggarakan oleh Dikti melalui LPPM. Pada akhirnya akan meningkatkan juga keinginan dan partisipasi dosen khususnya di Fisip Universitas Malikussaleh.

Terhadap masih ada sebagian dosen yang kurang tertarik untuk melakukan penelitian, maka seharusnya Universitas dalam hal ini Rektor, harus menyediakan berbagai penyediaan dana baik dari APBN maupun dari APBD terhadap berbagai bentuk penelitian. Pimpinan universitas harus sering-sering menyinggung akan pentingnya penelitian yang harus diikuti oleh dosen, bahkan pimpinan harus mengalokasikan dana bahkan memprioritaskan dana buat dana penelitian dalam penyusunan anggaran belanja universitas di tiap-tiap tahunnya. Agar menyemangati oleh sebagian dosen untuk mengikuti berbagai bentuk penelitian, sehingga dosen berkesempatan untuk menang dan membuat penelitian yang berkontribusi pada dunia pendidikan.

Selain itu juga diperlukan peran serta pengawasan dari Pimpinan Universitas maupun Pimpinan Fakultas, untuk mengawasi dosen yang kurang tertarik melakukan penelitian, selama ini yang terjadi di FISIP Universitas Malikussaleh. Untuk itu diperlukan pengawasan yang melekat terhadap dosen yang kurang tertarik untuk melakukan penelitian, pengawasan itu bisa berupa mengevaluasi setiap kinerja dosen yang berhubungan dengan penelitian. Seandainya ada dosen yang hanya mengajar saja, tanpa ikut berpartisipasi dalam penelitian maka pimpinan universitas maupun fakultas berhak menegur secara lisan maupun tulisan terhadap dosen terhadap dosen yang bersangkutan.

Hal ini sangat penting dilakukan karena untuk meminimalisir rendahnya jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen terutama di FISIP Universitas Malikussaleh. Walaupun saat ini sudah ada sedikit perubahan yang terjadi di Fisip Unimal, maksudnya adalah bagi

dosen yang tidak membuat penelitian minimal satu tahun satu buah penelitian maka, dosen yang bersangkutan tidak akan dibayar tunjangan sertifikasinya. Kalau dihubungkan dengan keadaan seperti itu, berarti sebagian dosen yang melakukan penelitian hanya sebatas melengkapi prasyarat untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi. Menurut penulis, pola pikir seperti itu kalau tidak profesional, dikarenakan penelitian merupakan termasuk tugas yang harus dilakukan secara berbarengan dengan pengajaran maupun pengabdian masyarakat. Seorang dosen terutama di Fisip semestinya harus bisa menempatkan diri sebagai seorang ilmuwan yang mempunyai kepakaran yang memang harus juga ditransformasikan melalui penelitian, sehingga dengan penelitian itu mempunyai nilai kontribusi terhadap peningkatan keilmuan dan kemasyarakatan masyarakat.

Selain itu juga menurut penulis saat ini, harus ada koordinasi yang baik antara LPPM Universitas dengan Dosen di Fakultas terhadap berbagai informasi yang dibutuh menyangkut penelitian. Sehingga hal tersebut dapat ditempuh dengan LPPM universitas harus menyediakan berbagai informasi yang mudah diakses oleh dosen Fisip Universitas Malikussaleh terhadap berbagai penelitian, bahkan penyediaan akses informasi menyangkut penelitian harus dilakukan secara online oleh dosen di fakultas termasuk Fisip universitas malikussaleh. Selain itu juga perlukan metode seperti gayung bersambut, maksudnya adalah dosen terutama di Fisip begitu penyediaan informasi penelitian sudah diakses oleh dosen dengan cara online, maka sangat dibutuhkan partisipasi timbal balik, untuk mencari bahkan mengeksplor berbagai informasi tentang penelitian di situs resmi LPPM. Sehingga dengan cara seperti itu maka akan menumbuhkan minat dan keinginan dosen untuk melakukan penelitian, sehingga akan melahirkan semakin banyak penelitian yang berkualitas bahkan berguna bagi dunia pendidikan maupun masyarakat.

3. Tugas pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan oleh setiap dosen tidak terkecuali oleh dosen Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Malikussaleh, melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan akan adanya berbagai kontribusi yang positif terhadap masyarakat dari ilmu maupun kepakaran yang dimiliki oleh dosen. Dalam Tugas pengabdian yang dilakukan oleh dosen, wajib dilakukan dengan berbagai bentuk kegiatan seperti : Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, Memberi latihan penataran, penyuluhan, ceramah kepada masyarakat, Memberi pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan serta Membuat atau menulis karya pengabdian kepada masyarakat.

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen selama ini di Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh belum terlalu banyak jumlah maupun kualitasnya, sehingga dari fenomena semacam ini maka, menurut penulis harus ada suatu bentuk usaha yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pemahaman yang harus dimengerti oleh dosen Fisip Universitas Malikussaleh terhadap bentuk pengabdian masyarakat itu merupakan kewajiban yang memang harus dilakukan oleh dosen Fisip terhadap profesionalitas yang dimiliki oleh dosen, bukan karena faktor lain. Karena selama ini yang terjadi di Fisip Unimal sangat sedikit sekali dosen yang terlibat dalam berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Untuk itu harus ada suatu terobosan yang harus dilakukan oleh fakultas maupun pihak universitas terhadap pola sebagian dosen yang jarang sekali terlibat dalam pengabdian masyarakat. Terobosan tersebut harus dilakukan seperti: memberikan informasi maupun apresiasi terhadap dosen yang ingin melakukan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu juga harus ada bentuk

pelatihan yang diberikan kepada dosen terutama sekali dosen Fisip Universitas Malikussaleh terhadap bentuk pengabdian kepada masyarakat. Dengan mengundang pakar yang mengerti tentang pengabdian masyarakat. Karena selama ini dosen Fisip hanya mengenal bentuk pengabdian sebatas terlibat dari kegiatan KKN maupun penyampaian materi atau dalam bentuk sosialisasi saja. Masih banyak bentuk pengabdian yang bisa diikuti oleh dosen Fisip seperti : kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat yang sifatnya peningkatan taraf ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan masyarakat dengan aksi mengajak masyarakat untuk bercocok tanam yang bisa dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari atau tanaman untuk bahan kelengkapan dapur rumah tangga serta berbagai bentuk kegiatan lainnya yang mempunyai nilai kontribusi secara langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Selain itu juga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik harus melakukan kerjasama dengan lembaga terkait, seperti dinas Sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Dengan cara seperti ini maka secara langsung dosen di Fisip akan mengetahui secara banyak tentang berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat yang mempunyai nilai positif bagi masyarakat. Kerjasama dengan pihak terkait seperti Pemerintah sangat penting dilakukan, karena pemerintah mengetahui secara teknis tentang kondisi yang dialami di suatu daerah terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Kerjasama yang dilakukan oleh Fakultas Ilmu sosial dan ilmu politik dengan pemerintah, itu harus dilakukan secara berkesinambungan, supaya pemberdayaan dan pembangunan di suatu daerah yang memerlukan partisipasi pengabdian yang dilakukan oleh dosen (Akademisi) dapat berjalan secara lama,

sehingga berdampak terhadap perubahan suatu daerah, yang bermanfaat bagi masyarakat.

Sementara itu dalam meningkatkan semangat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, maka menurut penulis harus dilakukan evaluasi atau pemantauan terhadap keterlibatan dosen yang tidak sama sekali terlibat dalam berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Bagi dosen yang memang tidak sama sekali terlibat dalam pengabdian, maka seharusnya Pimpinan fakultas maupun universitas harus melakukan upaya, seperti surat peringatan terhadap dosen yang bersangkutan. ini sangat penting dilakukan karena dengan seperti ini, maka dosen yang lain akan terpacu atau setidaknya-tidaknya akan merasa takut menerima surat peringatan dari pimpinan fakultas maupun universitas terhadap sebagian dosen yang kurang terlibat dalam berbagai penelitian.

Diharapkan dengan cara tersebut, maka akan memacu keinginan atau keterlibatan sebagian dosen yang tidak sama sekali melakukan pengabdian kepada masyarakat. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dengan adanya sertifikasi dosen, diharapkan juga dosen dapat melakukan tugas ketiganya dalam makna tri dharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat. Jadi seorang dosen di Perguruan Tinggi selain mengajar mahasiswa, dia juga harus terus mengembangkan keilmunya melalui penelitian, dan menerapkan hasil penelitian tersebut melalui pengabdian pada masyarakat.



Gambar 4.1
Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi
Di FISIP Universitas Malikussaleh

Dengan demikian maka akan ada suatu nilai kontribusi yang positif terhadap keberadaan dosen, terutama dosen Fisip universitas malikussaleh ditengah masyarakat Aceh pada khususnya. Maka dengan demikian peran dosen dalam pengabdian akan tercapai sesuai dengan makna tridharma perguruan tinggi, sekaligus tujuan akhir dari sertifikasi dosen yang selama ini diterapkan kepada seluruh dosen diIndonesia dapat terlaksana dengan baik. Karena keberadaan dosen dalam peran sertanya untuk pembangunan dan pemberdayaan msyarakat sangat dibutuhkan, karena tidak hanya dibebankan pada Pemerintah tapi peran akademisi juga sangat diperlukan.

Sementara itu dalam hubungannya dengan konseptual penelitian maka, ada beberapa hal yang dikaji diantaranya :

a. Dalam menilai dampak pelaksanaan sertifikasi dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka berdasarkan pengamatan penulis pelaksanaan sertifikasi dosen di Fisip Universitas

Malikussaleh belum terlalu berdampak secara baik, ini bisa terlihat dari masih rendahnya kinerja dosen dalam hal mengajar, masih rendahnya jumlah maupun kualitas penelitian, serta masih minimnya jumlah pengabdian masyarakat yang dilakukn oleh dosen terhadap bentuk pengabdian

Untuk itu menurut penulis, harus segera dilakukan upaya pembenahan kearah yang lebih baik terhadap masih belum berdampak secara signifikannya sertifikasi dosen di Fisip Universitas Malikussaleh. Upaya tersebut dengan cara melakukan pengevaluasian terhadap kinerja dosen yang masih lemah atau rendah secara berkala yang dilakukan oleh pimpinan baik Fakultas Maupun Universitas, kinerja tersebut bisa berupa bentuk pengajaran yang di lakukan oleh sebagian dosen di Fisip unimal. Dalam hal bentuk pengajaran sebaiknya dosen harus dievaluasi absensi kehadiran maupun materi yang disampaikan kepada mahasiswa, apakah semua materi yang disampaikan kepada mahasiswa tercapai melalui SAP yang baik dan benar.

Selanjutnya dalam hal tugas penelitian yang dilakukan oleh dosen masih minim dari sisi jumlah maupun kualitas, harus dilakukan dengan membuka akses seluas-luasnya berupa informasi yang diperlukan oleh dosen Fisip Universitas malikussaleh pada khususnya supaya usaha melakukan penelitian dapat dilaksanakan oleh dosen Fisip. Seterusnya harus ada suatu apresiasi atau penghargaan yang dinerikan kepada peneliti yang sering melakukan penelitian supaya termotifasi sebagian dosen yang lain yang masih kurang melakukan penelitian.

Dalam hal pengabdian kepada masyarakat di Fisip universitas malikussaleh, penulis menilai masih rendahnya keinginan dari sebagian dosen Fisip Unimal untuk terlibat dalam berbagai bentuk pengabdian masyarakat, maka menurut penulis harus dilakukan berbagai upaya dengan cara menggalakan minat dosen untuk melakukan pengabdian masyarakat dengan memberikan berbagai

informasi tentang pentingnya pengabdian masyarakat. Selain itu juga dosen Fisip universitas malikussaleh harus merubah pola pikir yang salah selama ini berkembang di FISIP Unimal, bahwa tugas dosen hanya semata-mata mengajar saja, akan tetapi masih ada tugas lain yang berhubungan dengan tri dharma perguruan tinggi, yaitu penelitian maupun pengabdian masyarakat. Sehingga dengan demikian maka, secara langsung akan menumbuh kembangkan minat dan kemampuan dosen untuk terlibat dalam berbagai kegiatan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat yang pada akhirnya memberikan makna positif bagi masyarakat.

b. Dalam hal mengeksplor dari program sertifikasi dosen di FISIP Universitas Malikussaleh, maka penulis meklasifikasi dari sisi Pengajaran. Untuk sisi pengajaran di FISIP Universitas Malikussaleh, maka menurut penulis program sertifikasi dalam bidang ini mempunyai kendala terhadap seperti masih rendahnya kesadaran maupun kedisiplinan yang dimiliki oleh dosen Fisip, selanjutnya target pencapaian materi dalam setiap materi perkuliah tidak sesuai dengan SAP yang telah direncanakan. Untuk itu menurut penulis harus dilakukan suatu bentuk tindakan yang tegas terhadap sebagian dosen yang tidak konsisten atau tidak disiplinnya dosen dalam melakukan pengajaran kepada mahasiswa. Tingkat kedisiplinan dosen dalam mengajar juga harus dievaluasi lagi, sehingga pimpinan dapat mengetahui permasalahan dari tidak disiplinnya sebagian dosen Fisip melaksanakan pengajaran bagi mahasiswa.

Sementara itu harus sanksi yang tegas terhadap dosen yang sering tidak masuk jam mengajar. Karena hal semacam ini sangat berdampak terhadap kelancaran proses belajar mengajar. Selama ini menurut penulis absensi dosen yang direkap oleh fakultas tidak benar, karena menggunakan sistem manual, sehingga ada sebagian dosen yang datang langsung mendatangi sekaligus absensi

kehadiran dosen. Tidak dilakukan secara perhari, sehingga dengan kondisi seperti ini, dimanfaatkan oleh dosen untuk memanipulasi data absensi kehadiran dosen di FISIP Universitas Malikussaleh. Untuk itu menurut penulis harus ada absensi secara elektronik (sidik jari) sehingga dosen yang tidak sering datang dalam mengajar atau ke kampus tidak bisa memanipulasi absensi kehadiran. Sehingga dengan cara seperti ini akan menunjukkan angka kehadiran dosen dalam melaksanakan tugasnya dalam hal pengajaran.

Untuk itu diperlukan sanksi yang tegas dari pimpinan Fakultas dalam hal ini dari Dekan Fisip Universitas Malikussaleh terhadap dosen yang tidak hadir melaksanakan tugas mengajar. Saksi yang tegas itu bisa berupa surat peringatan maupun sanksi Administrasi bagi dosen yang bersangkutan.

Selain itu untuk sisi penelitian selama ini yang penulis lihat, memang sangat minimnya jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen Fisip Universitas Malikussaleh, sehingga dari itu menurut penulis harus ada suatu tindakan yang tegas terhadap dosen yang tidak tertarik dalam melakukan penelitian, tinadakan tegas ini harus diterapkan oleh pimpinan supaya sebagian dosen yang tidak tertarik melakukan penelitian akan terpacu untuk terlibat dalam penelitian. Selain itu juga menurut peneliti, pimpinan universitas maupun fakultas harus memberikan suatu apresiasi atau penghargaan terhadap dosen yang sering melakukan penelitian, supaya dosen yang kurang tertarik melakukan penelitian akan terbiasa atau meningkat minatnya untuk meneliti. Selain dari pada itu juga pimpinan universitas maupun fakultas juga harus sering-sering menyampaikan kepada dosen akan pentingnya melakukan penelitian, sehingga dosen yang merasa kurang tertarik melakukan penelitian akan termotifasi untuk membuat penelitian.

Untuk hal pengabdian kepada masyarakat juga menurut penulis, masih sangat terbatasnya bentuk pengabdian kemasyarakat yang dilakukan oleh dosen Fisip Universitas Malikussaleh. Untuk itu

menurut penulis yang harus dilakukan adalah membuka pola pikir kepada dosen atau meroba pola pikir dosen yang selama ini mengagap bahwa pengabdian kepada masyarakat hanya sebatas prasyarat untuk melengkapi sertifikasi dosen atau kenaikan angka kredit dosen. Akan tetapi lebih dari pada itu bahwa pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dosen FISIP Universitas Malikussaleh merupakan suatu tuntutan profesi yang mestinya wajib dilakukan oleh dosen tidak ada tawar menawar atau dengan kata lain kewajiban selain mengajar serta penelitian.

Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, masih mengagap bahwa dengan melakukan pengabdian, maka waktu bersama dengan keluarga akan tersita atau terbuang begitu saja. Ini merupakan pemahaman yang salah, dan menurut penulis merupakan pola pikir yang cukup keliru. Pengabdian masyarakat merupakan prasyarat dalam tri dharama perguruan tinggi, tanpa pengabdian kepada masyarakat, maka tugas seorang dosen belum sempurna ditengah masyarakat, dosen harus bisa menempatkan kepakaran yang dimilikinya sebagai kewajiban mutlak untuk ditransformasikan baik kepada mahasiswa maupun masyarakat. Untuk itu harus menepi anggapan dengan melakukan pengabdian kepada masyarakat akan menyita waktu bersama keluarga atau dosen bisa mencari nafkah dibidang yanga lain. Itu merupakan anggapan yang salah karena dengan kesungguhan untuk melakukan pengabdian masyarakat akan banyak manfaat yang diperoleh dosen yang bersangkutan selain pengalaman di pengabdian maupun finansial yang didapatkan oleh dosen terutama dosen FISIP universitas Malikussaleh. Karena seperti kita ketahui bahwa dengan sertifikasi dosen yang ada saat ini, secara otomatis telah memberikan dampak yang sangat positif bagi dosen itu sendiri, untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitasnya demi terwujudnya kemajuan didunia pendidikan saat ini. Ini tidak lain karena dengan sertifikasi dosen

dilaksanakan saat ini, maka secara langsung taraf kesejahteraan dosen dapat meningkat, dengan dibarengi meningkatkan kinerja dosen.

c. Melihat dari hasil penelitian di Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas malikussaleh, maka program sertifikasi belum berdampak pada perbaikan kondisi yang baik di Fisip universitas malikussaleh. Ini dilihat dari bentuk pengajar, penelitian maupun pengabdian masyarakat.

Dari sisi pengajaran dampak sertifikasi dosen baru terlihat pada awal tahun 2014, ini berdasarkan aturan yang mengatur tentang tunjangan sertifikasi dosen. Maksudnya bila seorang dosen tidak mengajar dalam tiap semester minimal 9 Sks dan membuat penelitian minimal 1 penelitian/tahun serta melaksanakan pengabdian masyarakat yang ditunjukkan melalui SK kepanitiaan. Seandainya dosen tidak memenuhi prasyarat tersebut, maka dosen yang bersangkutan tidak akan dibayar tunjangan sertifikasinya. Setelah ada pelaksanaan aturan ini baru ada sedikit perubahan dari sikap sebagian dosen khususnya di FISIP Universitas Malikussaleh. Menurut peneliti aturan seperti ini merupakan suatu cambuk atau dalam kata lain suatu pengajakan yang sangat halus di buat oleh pemerintah, melalui aturan tersebut. Karena mengingat selama ini masih adanya dosen di Fisip Unimal yang tidak melaksanakan pelaksanaan Tri dharma perguruan Tinggi seperti yang diamanatkan dalam aturan.

Dengan demikian terlihat bahwa dampak sertifikasi dosen di Fisip Unimal baru bejalan secara efektif pada tahun 2014 ini, selebihnya pelaksanaan serifikasi dosen berjalan ditempat atau tidak berdampak signifikan khususnya di Fisip universitas malikussaleh. Ini merupakan suatu aturan yang cukup bagus untuk meningkatkan kompetensi seorang dosen dalam melaksanakan pelaksanaan tri dhrama perguruan tinggi. Sehingga dengan demikian maka dosen yang sudah sertifikasi saat ini tidak bisa lagi bermalas-malas dalam

melaksanakan tugas sebagai pendidik profesional terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sementara itu dari sisi penelitian dan pengembangan kepada masyarakat, juga baru terlihat sejak tahun 2014 peran serta dosen yang terlibat dalam bentuk kegiatan tersebut, selebihnya pada tahun sebelumnya dampak pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi khususnya di Fisip universitas malikussaleh tidak berdampak secara signifikan terhadap peningkatan kinerja dosen.

2. Hambatan Dalam Pelaksanaan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi di FISIP Universitas Malikussaleh.

a. Masih rendahnya kesadaran sebagian dosen Fisip Universitas Malikussaleh dalam melaksanakan tugas pengajaran selama ini, maka menurut penulis harus ada berbagai tindakan yang tegas yang harus diambil oleh pimpinan Universitas maupun Fakultas tentang keadaan seperti ini. Karena dengan kondisi seperti ini akan sangat berdampak terhadap lancarnya proses pembelajaran bagi mahasiswa. Menurut penulis Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik harus melakukan pengawasan secara melekat terhadap bentuk pengajaran yang dilakukan oleh dosen Fisip terhadap aktifitas pengajaran kepada mahasiswa.

Pengawasan yang melekat disini menurut peneliti harus dilakukan secara langsung, untuk melihat bagaimana dosen Fisip unimal dalam mengajar kepada mahasiswa. Tingkat kedisiplinan dosen Fisip harus dievaluasi kembali secara cermat, karena sangat berhubungan dengan nilai efektifitas yang didapatkan oleh mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. Pimpinan fakultas dalam hal ini harus menindak lanjuti setiap pelanggaran yang dilakukan oleh dosen yang terlambat atau memang tidak sama sekali memberikan perkuliahan bagi mahasiswa. Tidakan yang tegas dari pimpinan seperti mengnegur secara lisan, maupun surat peringatan

terhadap dosen yang sering mangkir melaksanakan perkuliahan merupakan cara yang paling tepat untuk merubah keadaan yang masih rendahnya kesadaran sebagian dosen Fisip universitas Malikussaleh melaksanakan pengajaran.

Selanjutnya menurut penulis di FISIP Universitas Malikussaleh harus ada sebuah alat absensi elektronik (Sidik jari) dalam mengevaluasi kehadiran dosen Fisip. Menurut penulis selama ini absensi di Fisip dilakukan secara manual, diman tingkat manipulasi absensi cukup besar terjadi. Ada seorang dosen yang mengabsen secara penuh walaupun pada kenyataannya dia hadir di kampus tidak sesuai dengan absen yang ditanda tangannya. Kalau menggunakan absensbi elektronik maka akan menggambarkan keadaan seadanya, tanpa ada manipulasi data absensi yang dilakukan sebagian dosen Fisip saat ini.

Pimpinan Fakultas dalam hal ini Dekan, juga dalam berbagai kesempatan civitas akademika di Fakultas harus sering menyampaikan kepada dosen akan pentingnya kedisiplinan dari dosen dalam mengajar, karena dengan demikian akan ada suatu perubahan dalam diri seorang dosen Fisip untuk melakukan perubahan, sehingga kedisiplinan dosen dapat meningkat. Selain itu juga menurut peneliti pimpinan fakultas dalam hal ini Dekan juga harus memberikan Apresiasi atau penghargaan kepada dosen yang disiplin melaksanakan tugas mengajar dengan dedikasi yang baik. Apresiasi ini harus diberikan kepada dosen yang secara sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya dengan baik dan penghargaan ini harus diberikan sepanjang tahun kepada dosen yang disiplin melaksanakan tugas pengajaran kepada mahasiswa.

Selain penekanan kedisiplian yang harus diterapkan di Fisip universitas malikussaleh kepada dosennya, ada lagi yang harus ditekankan selain itu yaitu penyempurnaan SAP yang harus dilakukan oleh dosen Fisip universitas malikussaleh dalam tiap semester. Ini sangat penting, karena dengan kesempurnaan SAP yang

disiapkan oleh dosen Fisip, maka akan berpengaruh kepada segala materi yang ingin disampaikan kepada mahasiswa. Sebaiknya materi-materi yang hendak disampaikan kepada mahasiswa itu harus uptodate atau dengan kata lain lebih kompetitif yang memuat segala kondisi sosial, ekonomi, budaya dan politik. Karena menurut pengamatan penulis selama ini SAP yang di buat oleh sebagian dosen Fisip, menggunakan SAP yang lama, bahkan ada juga dosen yang mengajar kepada mahasiswa tidak melengkapi SAP, sehingga mahasiswa tidak mengetahui apa saja materi yang akan disampaikan oleh dosen pada tiap-tiap pertemuan.

Kalau dibiarkan dengan kondisi seperti ini, menurut penulis akan berdampak kepada tidak efektifnya pengajaran yang terjadi di Fisip Universitas Malikussaleh, selain itu juga akan mempengaruhi kinerja dosen dalam melakukan pengajaran kepada mahasiswa. Untuk itu menurut penulis harus ada suatu pemberitahuan kepada setiap dosen yang mengajar harus menyerahkan SAP ke jurusan diawal semester, sebagai bukti kesiapan dosen yang bersangkutan melaksanakan proses belajar mengajar di Fakultas ilmu sosial dan Ilmu poltik universitas malikussaleh.

b. Untuk permasalahan masih lemahnya atau kurangnya keinginan sebagian dosen FISIP Universitas Malikussaleh melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, menurut penulis harus dilakukan stimulus atau rangsangan kepada dosen agar tertarik untuk meneliti. Jangan dijadikan penelitian atau pengabdian masyarakat hanya sebatas kewajiban yang harus dipenuhi dalam kenaikan pangkat atau kelengkapan sertifikasi, akan tetapi harus dijadikan sebagai keharusan atau kewajiban yang semestinya dilakukan oleh dosen itu sendiri terutama dosen Fisip Universitas Malikussaleh.

Sehingga dari itu menurut penulis, harus ada perubahan pola pikir yang harus dimiliki oleh seorang dosen khususnya dosen

Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik. Selain itu juga dosen FISIP Universitas malikussaleh harus membuat kelompok kecil atau kelompok rangsangan terhadap dosen yang kurang ingin meneliti atau terlibat dalam pengabdian masyarakat. Agar dosen-dosen yang kurang keinginan untuk meneliti, tertarik untuk melakukan penelitian dan terlibat dalam pengabdian masyarakat.

Universitas atau Fakultas juga harus memberikan kemudahan atau pendanaan terhadap penelitian yang akan diikuti oleh dosen di Fisip. Pendanaan itu bisa berupa dari dana APBN atau APBD yang dimiliki oleh universitas maupun fakultas. Sehingga dosen yang ingin melakukan penelitian terpacu karena tersedianya dana yang dapat dimanfaatkan oleh dosen Fisip Universiats Malikussale, jadi hanya mengandalkan dana penelitian dari Dikti saja. Dengan demikian maka secara langsung akan memotifasi sebagian dosen yang jarang untuk meneliti untuk melakukan penelitian, karena banyaknya dana penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh dosen di FISIP Universitas Malikussaleh. Selanjutnya dosen FISIP Universitas Malikussaleh juga harus lebih konsisten dalam mencari berbagai bentuk-bentuk penelitian yang di selenggarakan baik dari DIKTI maupun lembaga-lembaga terkait, yang berguna bagi dunia pendidikan maupun pengabdian kepada masyarakat.

Selanjutnya juga dosen Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik juga harus menjalin koordinasi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Malikussaleh, agar semua informasi yang berhubungan dengan berbagai bentuk penelitian dan pengabdian masyarakat diketahui oleh dosen FISIP. Bahkan semua informasi yang dibutuhkan oleh dosen Fisip harus bisa diakses secara online untuk mempermudah mendapatkan informasi.

Sehingga dari pada itu keberadaan sertifikasi dosen dapat mendongkrak peningkatan kualitas pendidikan melalui pencapaian Tri Dharma perguruan Tinggi saat ini. Karena mengingat kebijakan

Sertifikasi Dosen merupakan unsur yang terpenting untuk meningkatkan profesionalitas dan kemampuan dosen dalam melaksanakan tugas Tri dharma Perguruan Tinggi.

c. Memang bila dihubungkan secara langsung tidak ada keterkaitan antara sertifikasi dengan sarana dan prasarana terutama di FISIP Universitas Malikussaleh. Akan tetapi menurut penulis selama melakukan penelitian, penulis melihat dosen di Fisip universitas malikussaleh mengalami kendala atau hambatan dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, seperti dalam bidang pengajaran. Salah satu indikator berhasilnya pengajaran yang dilakukan oleh dosen yaitu terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan efisien terhadap kegiatan perkuliahan. Dalam hal ini adanya suatu kenyamanan dan lancarnya proses belajar mengajar yang diselenggarakan, akan tetapi di Fisip Universitas Malikussaleh penulis melihat hal tersebut tidak ada. Contohnya masih banyak ruangan hanya satu yang dilengkapi infokus dalam proses belajar mengajar diruangan, dari keseluruhan 15 lokal belajar Fisip universitas malikussaleh.

Ini menjelaskan kepada kita memang sangat terbatasnya sarana dan prasaran yang ada di Fisip Universitas malikussaleh. Ini sangat tidak relevan terhadap kenyamanan belajar mengajar di Fisip. Karena seperti yang kita ketahui bersama, bahwa proses belajar mengajar sekarang sudah mestinya dilengkapi dengan LCD atau infokus dalam ruang kuliah mahasiswa, dengan demikian mahasiswa dapat mengamati atau memahami setiap materi yang diberikan oleh dosen. Sehingga target belajar dalam perkuliahan dapat terlaksana.

Bila kita berkaca dengan fenomena yang terjadi dan berdasarkan pengamatan penulis, bahwa ruang belajar mahasiswa FISIP sekarang merupakan kompleks perumahan dosen, akan tetapi mengingat Fisip belum ada gedung yang permanen dikampus induk, sehingga Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik harus menempati

komplek tersebut dalam kegiatan proses belajar mengajar saat ini. Bila bercermin dengan keadaan sekarang memang sangat mustahil sekali menciptakan kenyamanan dalam perkuliahan untuk mahasiswa. Sehingga untuk itu sudah sepatutnya pihak Universitas harus mengalokasikan dana untuk pembangunan gedung perkuliahan Fakultas ISIP. Hal seperti ini jika dirasakan berlarut-larut akan berdampak ketidaknyamanan dosen dalam melaksanakan proses belajar mengajar

Menurut penulis dana untuk pembangunan gedung perkuliahan pihak universitas harus mengalokasikan dana dari APBN maupun APBD yang didapatkan oleh Universitas Malikussaleh. Universitas Malikussaleh harus lebih serius melihat kondisi seperti ini, maksud penulis jika kampus belajar mahasiswa tidak berada disatu tempat, maka akan berdampak kepada efektifitas dan efisiensi yang tidak didapati oleh mahasiswa maupun dosen itu sendiri. Maksudnya adalah jika setiap urusan yang hendak diurus oleh dosen maupun mahasiswa sekarang ini terpisah dengan biro rector, yang memang berbeda tempat dengan kampus atau Fakultas ISIP Universitas Malikussaleh. Selain itu juga penulis melihat belum adanya sarana yang dilengkapi di ruang perkuliahan saat ini, contohnya saja jaringan listrik saja belum memadai, sehingga sangat-sangat berpengaruh terhadap kenyamanan proses belajar mengajar saat ini di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Selain itu juga menurut penulis, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, saat ini belum dilengkapi dengan jaringan internet atau jaringan free wifi, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan secara online yang dibutuhkan oleh mahasiswa maupun dosen tidak bisa dipenuhi. Untuk menurut penulis pihak fakultas harus bisa melakukan pengadaan perangkat lunak terhadap pengadaan jaringan internet di fakultas, sehingga dengan demikian akan mempermudah segala sesuatu yang berhubungan dengan IT atau jaringan internet. Seperti yang kita ketahui bersama untuk saat

ini manfaat internet sangat dibutuhkan, contoh seperti bimbingan skripsi mahasiswa, selama ini dilakukan secara hardcopy dengan adanya internet maka bisa dilakukan dengan email, bisa juga untuk penyajian segala tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa, bisa dikumpulkan tugas tersebut lewat email, sehingga bisa menghemat kertas secara fisik, sehingga azas penghematan dalam proses belajar mengajar dapat dirasakan.

Sementara itu juga, menurut penulis harus ada pengadaan alat absensi elektronik yang bisa di pasang di fakultas sehingga dosen yang jarang hadir ke kampus dapat dievaluasi oleh pimpinan, sehingga dosen tidak bisa memanipulasi absensi yang selama ini terjadi di fakultas ISIP Universitas Malikussaleh. Sehingga pimpinan fakultas dapat mengambil langkah yang tegas kepada dosen yang sering mangkir dalam pelaksanaan belajar mengajar di kampus FISIP.

Selain itu juga dengan adanya sarana internet di kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, maka sebagian dosen yang ingin melakukan atau melengkapi segala persyaratan yang berhubungan dengan sertifikasi dosen bisa dilakukan secara online. Karena saat ini segala pendaftaran maupun melengkapi segala prasyarat tentang sertifikasi dilakukan dengan cara online tanpa perantara dari siapapun. Selain itu juga manfaat yang sangat banyak dirasakan oleh dosen jika adanya jaringan internet di kampus FISIP adalah akan mempermudah dosen dalam mengakses segala informasi yang berhubungan dengan pengajaran maupun segala informasi yang berhubungan dengan penelitian maupun pengabdian masyarakat. Karena saat ini LPPM Universitas Malikussaleh sebagai lembaga di universitas malikussaleh yang menyelenggarakan berbagai bentuk penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Sehingga LPPM universitas malikussaleh sudah mempunyai web resmi, sehingga dosen khususnya FISIP Unimal dapat mengakses segala informasi secara online yang berhubungan dengan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat.

Sehingga dari itu sangat jelas terlihat bahwa sarana dan prasarana memang sangat dibutuhkan sekarang ini di fakultas Ilmu Sosial dan ilmu politik Universitas Malikussaleh, untuk terciptanya segala kegiatan tri dharama perguruan tinggi, seperti pengajaran maupun penelitian dan pengabdian masyarakat. Sehingga pelaksanaan tri dharama perguruan tinggi yang termaktup dalam undang-undang kependidikan akan dapat terlaksana, juga bisa membawa pengaruh dampak positif terhadap pelaksanaan sertifikasi dosen khususnya di FISIP universitas malikussaleh.

d. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di FISIP Universitas Malikussaleh

1) Upaya yang harus dilakukan oleh pimpinan fakultas maupun universitas terhadap dosen yang jarang melaksanakan perkuliahan yang selama ini terjadi di FISIP Universitas malikussaleh adalah sanksi yang tegas yang harus diberikan kepada dosen yang jarang ke kampus, seperti teguran secara lisan maupun surat peringatan diberikan kepada dosen yang jarang melaksanakan perkuliahan. Selain itu juga di Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik harus ada alat absensi secara elektronik, sehingga dosen dapat melakukan absensi secara jelas terhadap kehadirannya ke kampus atau melaksanakan perkuliahan secara kontinyu sesuai jadwal perkuliahan. Selain itu juga dengan kehadiran dosen setiap hari ke kampus selain jam mengajar juga keharusan yang harus dilaksanakan oleh seorang dosen. Karena penulis melihat saat ini di FISIP universitas malikussaleh, dosen yang tidak mengajar atau tidak ada jadwal mengajar sering tidak hadir ke kampus.

Menurut penulis seorang dosen dalam melaksanakan segala tugas di kampus tidak hanya mengajar saja, akan tetapi dia juga harus membimbing mahasiswa, mengikuti siding proposal mahasiswa, maupun kegiatan lainya yang berhubungan dengan

kegiatan civitas akademika. Sehingga jam tugas dosen itu harus terpenuhi secara jelas dan terarah. Akan tetapi penulis melihat selama ini di FISIP Universitas Malikussaleh hampir sebagian dosen tidak hadir ke kampus, jadi yang hadir hanya dosen yang menduduki jabatan struktural saja di jurusan maupun di fakultas. Menurut penulis kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan oleh pimpinan, pimpinan fakultas harus mengambil tindakan tegas terhadap sebagian dosen yang kinerjanya sangat buruk sekali di FISIP Universitas Malikussaleh. Kalau kondisi ini dibiarkan maka sama halnya, sebagian dosen di FISIP Universitas Malikussaleh tidak konsisten dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik yang profesional.

Pimpinan Fakultas dalam hal ini Dekan, juga dalam berbagai kesempatan civitas akademika di Fakultas harus sering menyampaikan kepada dosen akan pentingnya kedisiplinan dari dosen dalam mengajar, karena dengan demikian akan ada suatu perubahan dalam diri seorang dosen Fisip untuk melakukan perubahan, sehingga kedisiplinan dosen dapat meningkat. Selain itu juga menurut peneliti pimpinan fakultas dalam hal ini Dekan juga harus memberikan Apresiasi atau penghargaan kepada dosen yang disiplin melaksanakan tugas mengajar dengan dedikasi yang baik. Apresiasi ini harus diberikan kepada dosen yang secara sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya dengan baik dan penghargaan ini harus diberikan sepanjang tahun kepada dosen yang disiplin melaksanakan tugas pengajaran kepada mahasiswa.

Selain penekanan kedisiplinan yang harus diterapkan di Fisip universitas malikussaleh kepada dosennya, ada lagi yang harus ditekankan selain itu yaitu penyempurnaan SAP yang harus dilakukan oleh dosen Fisip universitas malikussaleh dalam tiap semester. Ini sangat penting, karena dengan kesempurnaan SAP yang disiapkan oleh dosen Fisip, maka akan berpengaruh kepada segala materi yang ingin disampaikan kepada mahasiswa. Sebaiknya materi-materi yang hendak disampaikan kepada mahasiswa itu

harus uptodate atau dengan kata lain lebih kompetitif yang memuat segala kondisi sosial, ekonomi, budaya dan politik. Karena menurut pengamatan penulis selama ini SAP yang di buat oleh sebagian dosen Fisip, menggunakan SAP yang lama, bahkan ada juga dosen yang mengajar kepada mahasiswa tidak melengkapi SAP, sehingga mahasiswa tidak mengetahui apa saja materi yang akan disampaikan oleh dosen pada tiap-tiap pertemuan.

Kalau dibiarkan dengan kondisi seperti ini, menurut penulis akan berdampak kepada tidak efektifnya pengajaran yang terjadi di Fisip Universitas Malikussaleh, selain itu juga akan mempengaruhi kinerja dosen dalam melakukan pengajaran kepada mahasiswa. Untuk itu menurut penulis harus ada suatu pemberitahuan kepada setiap dosen yang mengajar harus menyerahkan SAP ke jurusan diawal semester, sebagai bukti kesiapan dosen yang bersangkutan melaksanakan proses belajar mengajar di Fakultas ilmu sosial dan Ilmu politik universitas malikussaleh. Kalau hal seeperti ini dilakuakn diawala semester maka akan sangat bermanfaat juga terhadap penyiapan bahan kelengkapan pada saat penyusunan akreditasi jurusan yang dilakukan untuk mendapatkan legalitas jurusan yang di berikan oleh DIKTI.

2) Pelaksanan Tri dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, juga mengalami berbagai permasalahan. Diantaranya masih lemahnya keinginan dari sebagian dosen untuk melakukan penelitian, selain itu keterlibatan dosen terhadap bentuk pengabdian kepada masyarakat juga masih kurang serta masih kurangnya semangat mengajar secara professional oleh sebageian dosen di FISIP Universitas Malikussaleh.

Menyangkut masih lemahnya keinginan sebagian dosen untuk melakukan penelitian, menurut penulis harus dilakukan suatu aturan yang jelas atau tindakan yang tegas terhadap dosen yang tidak punya keingian atau kemauan untuk melakukan penelitian. Ini

sanangat penting dilakukan karena dengan aturan dan tidakan yang jelas di tetapkan di FISIP Universitas Malikussaleh maka akan ada keinginan atau keseriusan dosen untuk malakukan berbagai bentuk penelitian.

Sementara itu diperlukan suatu koordinasi yang baik antara LPPM Universitras dengan Fakultas ISIP Universitas Malikussaleh, dimaksudkan supaya dengan adanya koordinasi yang baik, maka informasi yang berkenaan denga berbagai bentuk penelitanan dan pengabdian masyarakat dapat di ketahui oleh seluruh dosen yang di Fakultas khususnya FISIP Malikussaleh.

Selain itu juga harus ada suatu bentuk pengawasan yang melekat terhadap seluruh dosen yang ada di fakultas terhadap kinerjanya yang berhubungan dengan pelaksanan sertifikasi dosen, seperti Pengajaran, Penelitian maupun Pengabdian Kepada Masyarakat. Dengan pengawasan yang melekat yang dilakukan oleh pimpinan fakultas maupun universitas maka akan memotivasi khususnya dosen yang kurang tertarik untuk melakukan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat.

Dalam hal ini masih lemahnya keinginan sebagian dosen FISIP Unimal melakuakan penelitian maka harus adanya kelompok kecil yang mampu mempengaruhi sebagian dosen yang kurang tertarik untuk melakukan penelitian di FISIP. Kelompok kecil ini harus mampu mempengaruhi serta mampu merubah maindset atau pola pikir dosen yang jarang melakukan penelitian atau sama sekali tidak melakuakn penelitian untuk tergerak melakukan penelitian. Karena mealakukan penelitian juga merupakan tugas pelaksanaan tri dharama perguruan tinggi yang itu juga merupakan tujuan akhir dari sertifikasi dosen dalam meningkatkan kemampuan dan kulitas dalam penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.

Keterlibatan dosen dalam berbagai bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga merupakan tugas yang harus di emban oleh seorang dosen. Bila di kaitkan dengan kebijakan

sertifikasi dosen yang di keluarkan pemerintah melalui kementerian pendidikan, mengisyaratkan kepada seluruh dosen untuk lebih kompetitif meningkatkan kualitasnya dalam persaingan pendidikan. Caranya tidak lain dengan mengasah kemampuan mahasiswa serta berkontribusi terhadap masyarakat umum dengan kemampuan akademisi yang dimilikinya. Dalam pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen juga harus menjalin koordinasi atau kolaborasi dengan Pemerintah, ini harus dilakukan karena akademisi merupakan mitra pemerintah dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

Untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran di suatu daerah maka kerjasama pemerintah, swasta, masyarakat serta yang paling penting adalah keterlibatan akademisi dalam berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan disuatu daerah. Jgan ada ruang atau termarjinalkan akademisi dengan pemerintah, dalam hal ini pengabdian dosen FISIP Universitas Malikussaleh harus bisa bersenerji dengan pemerintah Aceh dalam kegiatan pemberdayaan dan pembangunan khususnya di Aceh.

Khususnya untuk loyalitas dosen FISIP Universitas Malikussaleh yang masih lemah dalam bentuk proses belajar mengajar, maka perlu dilakukan suatu manajemen pengelolaan absensi yang baik, terhadap bentuk pengajar dosen kepada mahasiswa. Sehingga dosen yang mengajar lebih konsisten terhadap tugas utama seorang dosen secara professional, baik itu ketepatan waktu masuk kuliah maupun kehadiran dosen dalam memberikan kuliah kepada mahasiswa.

Sementara itu perlu ada suatu bentuk pembelajaran atau pelatihan kepada dosen khususnya sebagian dosen FISIP Universitas Malikussaleh yang belum mengerti tentang dosen yang ingin melakukan pendaftaran atau melengkapi persyaratan tentang sertifikasi dosen. Karena saat ini pendaftaran atau melengkapi syarat sertifikasi dosen dilakukan secara online ke DIKTI, sehingga dosen di

tuntut untuk mampu menguasai IT atau teknik informatika. Untuk itu masih ada sebagian dosen yang hendak melakukan pendaftaran maupun melengkapi persyaratan itu masih melalui bagaian kepegawaian Universitas Malikussaleh.

Untuk itu harus ada sebuah panitia yang dibuat oleh fakultas maupun universitas untuk melatih para dosen yang kurang memahami tentang penguasaan IT yang berhubungan dengan tata cara pendaftaran maupun melengkapi sertifikasi dosen khususnya di Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu politik setra pada umumnya dosen di Universitas Malikussaleh. Diharapkan dengan ada panitian yang di buat ini diharapkan akan melatih bagi dosen yang belum memahami penguasaan IT, karena saat ini segala kegiatan yang berhubungan dengan sertifikasi dosen dilakukan secara online tidak lagi dilakukan secara manual, ini sangat menguntungkan karena akan menghemat waktu, tenaga serta biaya yang harus dikeluarkan oleh dosen itu sendiri.

3). Upaya yang harus dilakukan oleh pihak terkait dalam hal ini Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu politik yaitu Dekan harus bisa menyediakan atau memfasilitasi penyempurnaan sarana dan prasarana di fakultas dengan segera. Karena seandainya kondisi seperti ini berlarut-larut dialami di fakultas, maka sangat berdampak negative terhadap dosen maupun mahasiswa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di fakultas Fisip universitas malikussaleh. Untuk itu berbagai upaya dan partisipasi oleh pimpinan fakultas harus juga didukung oleh dosen maupun mahasiswa untuk menjawab segala keterbatasan sarana dan prasaran yang di alami oleh FISIP saat ini.

Menurut penulis kekurangan fasilitas sarana dan prasarana merupakan factor yang sangat berdapak langsung terhadap pelaksanaan tri dharam perguruan tinggi, karena bagaimana mengharapkan kinerja dari dosen sendainya sarana penunjang

kinerja dosen tidak ada atau tidak tersedia. Contoh seperti infokus maupun LCD yang dimiliki di setiap ruangan perkuliaan, sehingga sangat mempersulit bagi dosen untuk mengtransferkan ilmu atau kepakaran yang dimilikinya kepada mahasiswa atau kepada peserta didik. Sehingga dari itu menurut penulis upaya yang semetinya harus dilengkapai oleh pimpinan fakultas adalah dengan segera berupaya untuk menyediakan atau melengkapi saran penunjang kegiatan perkuliaan atau penyediaan layanan lainnya guna peningkatan kinerja dosen baik dalam pengajaran, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat.

Bila kita berkaca dengan fenomena yang terjadi dan berdasarkan pengamatan penulis, bahwa ruang belajar mahasiswa FISIP sekarang merupakan komplek perumahan dosen, akan tetapi mengingat Fisip belum ada gedung yang permanen dikampus induk, sehingga Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik harus menempati komplek tersebut dalam kegiatan proses belajar mengajar saat ini. Bila bercermin dengan keadaan sekarang memang sangat mustahil sekali menciptakan kenyamanan dalam perkuliahan untuk mahasiswa. Sehingga untuk itu sudah sepatutnya pihak Universitas harus mealokasikan dana untuk pembangunan gedung perkuliahan Fakultas ISIP. Hal seperti ini jika dirasakan berlarut-larut akan berdampak ketidak nyaman dosen dalam melaksanakan proses belajar mengajar

Menurut penulis dana untuk pembangunan gedung perkuliahan pihak universitas harus mengalokasikan dana dari APBN maupun APBD yang didapatkan oleh Universitas Malikussaleh. Universitas Malikussaleh harus lebih serius melihat kondisi seperti ini, maksud penulis jika kampus belajar mahasiwa tidak berada disatu tempat, maka akan berdampak kepada efektifitas dan efesiensi yang tidak didapati oleh mahasiswa maupun dosen itu sendiri. Maksudnya adalah jika setiap urusan yang hendak diurus oleh dosen maupun mahasiswa sekarang ini terpisah dengan biro

rector, yang memang berbeda tempat dengan kampus atau Fakultas ISIP Universitas Malikussaleh. Selain itu juga penulis melihat belum adanya sarana yang dilengkapi di ruang perkuliahan saat ini, contohnya saja jaringan listrik saja belum memadai, sehingga sangat-sangat berpengaruh terhadap kenyamanan proses belajar mengajar saat ini di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Selain itu juga menurut penulis, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, saat ini belum dilengkapi dengan jaringan internet atau jaringan *free wifi*, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan secara online yang dibutuhkan oleh mahasiswa maupun dosen tidak bisa dipenuhi. Untuk menurut penulis penulis pihak fakultas harus bisa melakukan pengadaan perangkat lunak terhadap pengadaan jaringan internet di fakultas, sehingga dengan demikian akan mempermudah segala sesuatu yang berhubungan dengan IT atau jaringan internet. Seperti yang kita ketahui bersama untuk saat ini manfaat internet sangat dibutuhkan, contoh seperti bimbingan skripsi mahasiswa, selama ini dilakukan secara hardcopy dengan adanya internet maka bisa dilakukan dengan email, bisa juga untuk penyajian segala tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa, bisa dikumpulkan tugas tersebut lewat email, sehingga bisa menghemat kertas secara fisik, sehingga azas penghematan dalam proses belajar mengajar dapat dirasakan.

Sementara itu juga, menurut penulis harus ada pengadaan alat absensi elektronik yang bisa di pasang di fakultas sehingga dosen yang jarang hadir ke kampus dapat dievaluasi oleh pimpinan, sehingga dosen tidak bisa memanipulasi absensi yang selama ini terjadi di fakultas ISIP Universitas Malikussaleh. Sehingga pimpinan fakultas dapat mengambil langkah yang tegas kepada dosen yang sering mangkir dalam pelaksanaan belajar mengajar di kampus FISIP.

Selain itu juga dengan adanya sarana internet di kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, maka sebagian dosen yang ingin melakukan atau melengkapi segala

persyaratan yang berhubungan dengan sertifikasi dosen bisa dilakukan secara online. Karena saat ini segala pendaftaran maupun melengkapi segala prasyarat tentang sertifikasi dilakuk dengan cara online tanpa perantara dari siapapun. Selain itu juga manfaat yang sangat banyak dirasakan oleh dosen jika adanya jaringan internet di kampus FISIP adalah akan mempermudah dosen dalam mengakses segala informasi yang berhubungan dengan pengajaran maupun segala informasi yang berhubungan dengan penelitian maupun pengabdian masyarakat. Karena saat ini LPPM Universitas Malikussaleh sebagai lembaga di universiats malikussaleh yang menyelenggarakan berbagai bentuk penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Sehingga LPPM universitas malikussaleh sudah mempunyai web resmi, sehingga dosen khususnya FISIP Unimal dapat mengakses segala informasi secara online yang berhubungan dengan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat.

Sehingga dari itu sangat jelas terlihat bahwa sarana dan prasarana memang sangat dibutuhkan sekarang ini di fakultas Ilmu Sosial dan ilmu politik Universiats Malikussaleh, untuk terciptanya segala kegiatan tri dharama perguruan tinggi, seperti pengajaran maupun penelitian dan pengabdian masyarakat. Sehingga pelaksanaan tri dharama perguruan tinggi yang termaktup dalam undang-undang kependidikan akan dapat terlaksana, juga bisa membawa pengaruh dampak fositif terhadap pelaksanaan sertifikasi dosen khususnya di FISIP Universitas Malikussaleh.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan Sertifikasi Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, tidak terlalu berdampak positif terhadap kinerja dosen, ini bisa dilihat dari aspek pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dimana dalam hal Penelitian dan pengabdian masyarakat masih ada sebagian dosen yang kurang tertarik atau yang terlibat langsung terhadap berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Sehingga ada sebagian dosen yang menganggap melakukan penelitian maupun terlibat dalam pengabdian masyarakat, hanya sebagai rutinitas, kewajiban atau prasyarat kenaikan pangkat atau syarat memenuhi sertifikasi.
2. Hambatan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di FISIP Unimal yaitu Rendahnya kesadaran dosen dalam mengajar, seperti masih ada dosen FISIP Unimal yang tidak konsisten atau tidak disiplin dalam pelaksanaan tugas dalam pengajaran, seperti hal pengajaran adanya sebagian dosen yang mengajar di awal semester tidak dilengkapi SAP. Kurangnya minat penelitian maupun pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh sebagian dosen FISIP Universitas malikussaleh, seperti dalam hal penelitian masih ada sebagian dosen yang kurang tertarik untuk melakukan riset atau penelitian. Ada sebagian dosen yang hanya mengajar saja, sehingga tidak tertarik atau terlibat dalam berbagai hal pengabdian kepada masyarakat. Selain itu juga kurangnya sarana dan prasaranan penunjang kegiatan perkuliaan di FISIP Universitas Malikussaleh.

3. Upaya dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan tri Dharama Perguruan tinggi yaitu Pimpinan Fakultas maupun Universitas belum tegas untuk menindak dosen yang tidak disiplin dalam mengajar serta tidak melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara benar, seperti dalam bentuk pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Ini merupakan upaya dalam mengatasi permasalahan pelaksanaan Tri Dharam perguruan Tinggi di FISIP Universitas Malikussaleh.

B. Saran

1. Dengan bertambah jumlah dosen yang sudah tersertifikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, maka harus adanya suatu perubahan kearah yang lebih baik seperti peningkatan kinerja kemampuan profesionalisme dosen (peningkatan mutu kinerja) dalam pelaksanaan pencapaian Tri Dharma Perguruan Tinggi, baik dalam pengajaran, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Caranya antara lain dosen FISIP unimal harus meningkatkan kedisiplinan dan profesionalitasnya pengajaran (materi perkuliahan yang uptode dan berkualitas dengan perkembangan zaman), selain itu mampu melahirkan berbagai penelitian yang berkualitas serta terlibat aktif dalam berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.
2. Perlu adanya suatu pembenahan terhadap keseriusan dan konsistensi dosen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, dengan cara mengawasi, melaporkan dan mengevaluasi secara periodik kepada Pimpinan Universitas dan Fakultas.
3. Perlu adanya peningkatan budaya kinerja yang baik dikalangan dosen di FISIP Universitas Malikussaleh, seperti peningkatan kedisiplinan dalam mengajar, penyempurnaan materi-materi ajar kepada mahasiswa sesuai dengan situasi kondisi serta kearifan lokal, sehingga mutu pembelajaran dapat dicapai lebih

dengan baik. Selain itu juga perlu adanya kelompok kecil yang mampu merangsang kepada dosen yang kurang melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat, sehingga akan bertambah jumlah serta kualitas penelitian serta pengabdian masyarakat di Fisip Universitas Malikussaleh, dengan memberikan pemahaman akan pentingnya penelitian dan pengabdian masyarakat yang menjadi kewajiban dari dosen selain mengajar.

4. Upaya dalam mengatasi hambatan tersebut melalui keseriusan dari seluruh komponen civitas akademika terutama pimpinan fakultas ISIP Unimal, untuk menindak secara tegas dosen yang tidak disiplin mengajar, selain itu pimpinan fakultas juga harus proaktif mencari peluang untuk dosen melakukan penelitian, seperti penyediaan dana atau hibah penelitian selain dari Dikti , supaya dosen Fisip tertarik melakukan penelitian dan pengabdian. Selain itu juga pimpinan fakultas juga harus menjamin supaya tersedianya sarana dan prasarana pendidikan di Fisip supaya pelaksanaan tri dhrama dapat berjalan dengan baik.
5. Perlu Membangun budaya belajar, sehingga *knowledge* dan proses *learning* organisasi tercipta dengan baik untuk kalangan pendidik, agar lebih tertarik untuk meneliti dan terlibat dalam berbagai kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.
6. Perlu adanya koordinasi yang baik antara dosen FISIP dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Malikussaleh agar semua informasi yang berkenaan dengan penelitian dan pengabdian masyarakat, sehingga kegiatan Tri dharma perguruan tinggi dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, khususnya penelitian dan pengabdian masyarakat di FISIP Universitas Malikussaleh.

Pedoman Wawancara

A. Hasil Evaluasi Kebijakan Sertifikasi Dosen mampu memberikan input terhadap peningkatan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.

1. Bagaimana pelaksanaan Sertifikasi Dosen di FISIP Unimal?
2. Apakah dengan Sedos yang sudah berjalan, memberikan suatu perubahan kearah yang lebih baik terhadap peningkatan kualitas dosen di FISIP Unimal?
3. Bagaiman indek prestasi dosen di Fisip Unimal sebelum dan sesudah pelaksanaan Serdos?
4. Ada beberapa orang lagi dosen di Fisip unimal yang belum Serdos serta berapa jumlah dosen yang sudah Serdos di Fisip?
5. Bagaimana Pak Dekan melihat kemampuan dosen di Fisip unimal setelah kebijakan Sedos ini berjalan
6. Apa ada kendala yang Bapak hadapi dalam proses pengurusan Serdos bagi dosen Fisip Unimal?
7. Menyangkut tentang persyaratan pengurusan Serdos, apa ada kendala yang dihadapi oleh dosen yang ingin mengikuti serdos tersebut (pertanyaan di tujukan kepada Dosen yang belum Serdos)?
8. Bagaimana Pak Dekan, proses pengurusan Serdos yang biasa dilalui oleh dosen Fisip Unimal dalam mendapatkan sertifikasi?
9. Apak dengan adanya kebijakan serdos ini, ada perubahan yang dirasakan oleh dosen sendiri di fisip, sehingga meningkatkan kinerja serta tanggung jawab dalam melaksanakan Tridarama perguruan tinggi?

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di FISIP Universitas Malikussaleh.

1. Melihat Kebijakan Sedos sudah berjalan dari beberapa tahun, bagaimana dampak yang di rasakan bagi peningkatan kemampuan mahasiswa khususnya di Fisip Unimal?
2. Langkah apa yang harus dilakukan oleh Fisip unimal dalam hal ini guna meningkatkan kualitas kemampuan mahasiswa, selain dari kebijakan Serdo yang sudah berjalan selama ini?
3. Kendala apa yang dihadapi oleh para dosen di Fisip Unimal selama ini dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa, bila dihubungkan dengan pelaksanaan Kebijakan Serdos?
4. Apakah selama ini kemampuan serta pemahaman mahasiswa terbentuk setelah adanya Kebijakan Sedos?
5. Apakah ada perubahan terutama kemampuan serta pemahaman mahasiswa, setelah kebijakan serdos ini berjalan, khususnya di Fisip Unimal?
6. Apakah Kebijakan Serdos merupakan suatu strategi yang tepat dalam meningkatkan kualitas serta kemampuan mahasiwa dalam peningkatan mutu lulusan?
7. Apakah ada perbedaan yang dirasakan oleh mahasiwa terhadap dosen yang sudah bersertifikasi dengan dosen yang belum bersertifikasi, menyangkut tanggung jawab serta kempuan dalam mengajar di Fisip Unimal?
8. Bagaimana solusi dalam meningkatkan kulitas dosen terhadap peningkatan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di FISP Universitas Malikussaleh?

C. Upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di FISIP Universitas Malikussaleh.

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam mengatasi hambatan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi?
2. Sejauh mana upaya yang telah dilakukan oleh Pimpinan Fakultas dalam mengatasi permasalahan tersebut?
3. Sanksi apa yang di ambil Pimpinan Fakultas dalam mengatasi hambatan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik?
4. Apakah selama ini sanksi yang diberikan kepada dosen Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik dalam mengatasi hambatan pelaksanaan tri dharma sudah efektif?
5. Apakah selama ini dengan upaya mengatasi hambatan tri dharma di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik tersebut, mendapat respon positif dari dosen di FISIP Universitas Malikussaleh?
6. Dengan upaya mengatasi hambatan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, apakah sudah memperbaiki kondisi yang baik terhadap pelaksanaan Tri dharma perguruan tinggi?



Lampiran 1

Profil Staf Pengajar Setiap Prodi Berdasarkan Jabatan Fungsional dan Pendidikan

| No | Jabatan/ Pendidikan | Ilmu Admisitra si Negara | Ilmu Komuni kasi | Ilmu Politik | Sosiol ogi | Antro pologi | Tot al Fa kult as |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| A | Jabatan Fungsional : | | | | | | |
| 1 | Non Fungsional | 8 | - | - | - | - | 8 |
| 2 | Asisten Ahli | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 22 |
| 3 | Lektor | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | 25 |
| 4 | Lektor Kepala | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 9 |
| 5 | Guru Besar/Profesor | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | | 24 | 12 | 10 | 11 | 6 | 64 |
| B | Pendidikan Tertinggi : | | | | | | |
| 1 | S1 | 8 | - | - | - | - | 8 |
| 2 | S2/Profesi/Sp-1 | 15 | 12 | 8 | 7 | 5 | 49 |
| 3 | S3/Sp-2 | 1 | - | 2 | 4 | 1 | 8 |
| TOTAL | | 24 | 12 | 10 | 11 | 6 | 64 |

Sumber: Akademik FISIP Universitas Malikussaleh, 2013

Lampiran 2

Profil Staf Administrasi Berdasarkan Status Kepegawaian dan Pendidikan

| No | GOLONGAN | PENDIDIKAN | | | | JUMLAH |
|----|----------|------------|----|----|-------|--------|
| | | SLTA | D3 | S1 | S2/S3 | |
| 1 | PNS | 2 | 1 | 14 | | 17 |
| 2 | CPNS | | | | | |
| 3 | Honorar | 4 | 1 | 2 | | 7 |
| | JUMLAH | 6 | 2 | 16 | | 24 |

Sumber: Akademik FISIP Universitas Malikussaleh, 2013.

Lampiran 3
Mahasiswa Aktif/Terdaftar Tahun 2012/2013

| No | Jurusan/Prodi | Lk | Pr | Jumlah |
|----|-----------------------------|-----|-----|--------|
| 1 | Ilmu Administrasi Negara | 280 | 356 | 636 |
| 2 | Ilmu Komunikasi | 185 | 187 | 372 |
| 3 | Ilmu Politik | 159 | 51 | 210 |
| 4 | Sosiologi | 131 | 190 | 321 |
| 5 | Antropologi | 70 | 83 | 153 |
| | Jumlah | 825 | 867 | 1692 |

Sumber:Akademik FISIP Universitas Malikussaleh, 2013.

Lampiran 4
Rata-rata Masa Studi Mahasiswa Tahun 2008-2010

| No. | Program Studi | Rata-rata Masa Studi (tahun) | | Rata-rata IPK Lulusan | |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------|-----------------------|------|
| (1) | (2) | (3) | | (4) | |
| 1 | Ilmu Administrasi Negara | 2010 2011 2012 | 4.10 | 3.20 3.19 3.14 | 3.18 |
| 2 | Ilmu Komunikasi | 2010 2011 2012 | 4.7 | 3.06 3.23 3.27 | 3.19 |
| 3 | Ilmu Politik | 2010 2011 2012 | 4.9 | 3.17 3.31 3.15 | 3.21 |
| 4 | Sosiologi | 2010 2011 2012 | 4.9 | 3.18 3.06 3.17 | 3.13 |
| 5 | Antropologi | 2010 2011 2012 | 4.9 | 3.09 3.05 3.04 | 3.07 |
| Rata-rata di Fakultas | | | 4.8 | | 3.15 |

Sumber:Akademik FISIP Universitas Malikussaleh, 2013.

Lampiran 5

Data Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2012/2013

| No | Jurusan/Prodi | Jumlah |
|----|--------------------------|--------|
| 1 | Ilmu Administrasi Negara | 657 |
| 2 | Ilmu Komunikasi | 102 |
| 3 | Ilmu Politik | 44 |
| 4 | Sosiologi | 82 |
| 5 | Antropologi | 59 |
| | Jumlah | 944 |

Sumber:Akademik FISIP Universitas Malikussaleh, 2013.

Lampiran 6

Rasio Jumlah Dosen dan Mahasiswa 2012/2013

| NO | URAIAN | JUMLAH DOSEN | JUMLAH MAHASISWA | RASIO |
|----|--------------------------|--------------|------------------|-------|
| 1 | Ilmu Administrasi Negara | 24 | 636 | 1:27 |
| 2 | Ilmu Komunikasi | 12 | 372 | 1:31 |
| 3 | Ilmu Politik | 10 | 210 | 1:21 |
| 4 | Sosiologi | 11 | 321 | 1:27 |
| 5 | Antropologi | 6 | 153 | 1:26 |
| | Total | 64 | 1692 | 1:26 |

Sumber:Akademik FISIP Universitas Malikussaleh, 2013.

Lampiran 7

**JUMLAH JUDUL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK TAHUN 2010/2012**

| No | Nama Program Studi | Jumlah Judul Penelitian | | | Jumlah Judul Kegiatan Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat | | |
|----|--------------------|-------------------------|------|------|--|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | Ilmu Adm Negara | - | 1 | - | 5 | 5 | 6 |
| 2 | Ilmu Komunikasi | 4 | 3 | 1 | - | 8 | 12 |
| 3 | Ilmu Politik | 7 | 1 | - | 14 | 5 | 3 |
| 4 | Sosiologi | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 5 | Antropologi | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| | Total | 16 | 8 | 8 | 22 | 21 | 28 |

Sumber:Akademik FISIP Universitas Malikussaleh, 2013.

Lampiran 8

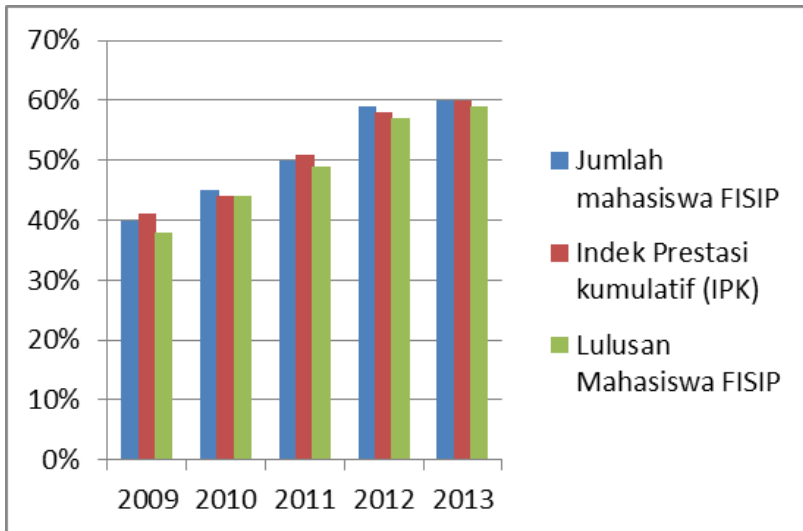
**PRASARANA dan SARANA FISIP UNIMAL
Tahun 2012/2013**

| No. | Uraian | Unit/Buah | Luas (M2) |
|-----|-----------------------|-----------|------------------|
| 1. | Gedung Dekanat | 1 | 350 |
| 2. | Gedung Jurusan /Prodi | 5 | 240 |
| 3. | Ruang Kuliah | 15 | @ 54 m2 (9X 6) |
| 4. | Perpustakaan | 1 | 240 m2 (6x14 m2) |
| 5. | Laboratorium Komputer | 1 | 48 m2 (6 x 8 m2) |
| 6. | Mushalla | 1 | 96 m2 (8 x12 m2) |
| 7. | Computer Lab /Adm | 55 | |
| 8. | Printer | 12 | |
| 9 | Laptop | 8 | |
| 10 | LCD | 9 | |

| | | | |
|----|---------------------|-----|----------------|
| 11 | White Board | 15 | |
| 12 | Lab. Komunikasi | 1 | 48 m2 (6x8 m2) |
| 13 | White Boord digital | 1 | |
| 14 | Aula | 1 | 54 m2 (9x6 m2) |
| 15 | Kursi kuliah | 750 | |
| 16 | Meja Kuliah dosen | 15 | |
| 17 | Buku Perpustakaan | | |
| 18 | AC | | |
| 19 | Kipas Angin | | |
| 20 | TV | 1 | |

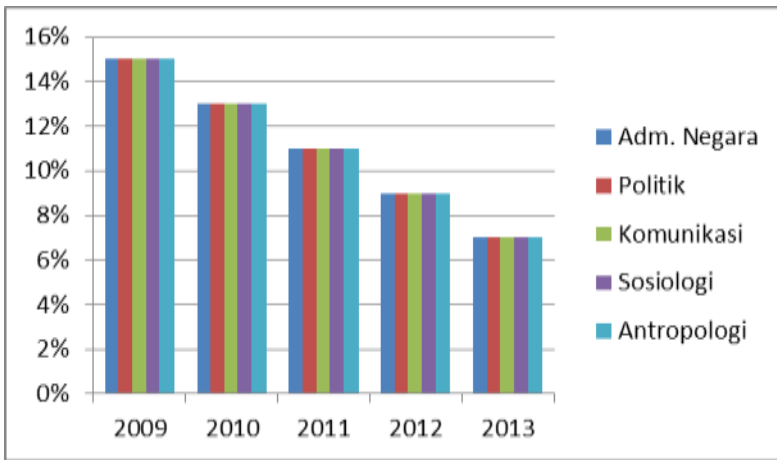
Sumber: Akademik FISIP Universitas Malikussaleh, 2013.

Lampiran 9



Perkembangan Jumlah Mahasiswa, IPK mahasiswa dan Lulusan Mahasiswa FISIP Universitas Malikussaleh

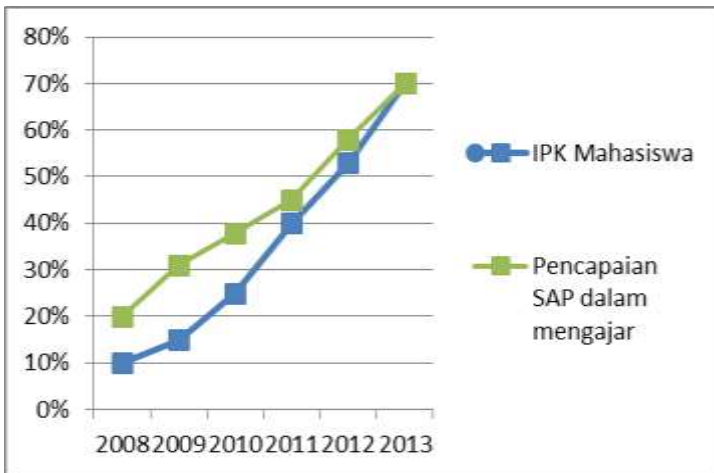
Lampiran 10



Perkembangan Jumlah Mahasiswa FISIP Universitas Malikussaleh yang Drop Out

Sumber: Akademik FISIP Universitas Malikussaleh, 2013.

Lampiran 11



Peningkatan Kinerja dan Prestasi Dosen Dalam Proses Belajar Mengajar

Sumber: Akademik FISIP Universitas Malikussaleh, 2013

Lampiran 12

Tugas Utama Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Malikussaleh

| No | Rincian Tugas | Pencapaian | Keterangan |
|----|--|---|--|
| 1. | Menduduki jabatan pimpinan dalam lembaga Pemerintahan/Pejabat Negara maupun daerah harus dibebaskan dari jabatan organiknya. | Menduduki jabatan dalam lembaga Pemerintah Daerah | Kab. Bireuen, Aceh Besar, Aceh Barat serta Kota Banda Aceh, dalam Propinsi Aceh |
| 2. | Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat | Memberi materi pada setiap kegiatan Pemerintah, seperti: Pembinaan Administrasi Desa | Di Kecamatan Seunuedon, Kec. Aceh Utara, Propinsi Aceh |
| 3. | Memberi latihan/penyuluhan/penataran pada masyarakat | Pencapaian melalui pelaksanaan, Kuliah Kerja Nyata (KKN) | Pelaksanaan KKN Tiap tahun di Selenggarakan, Terbagi di tiap-tiap Kab/Kota di Aceh |
| 4. | Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan | Memberi materi pada masyarakat tentang PILKADA Di Aceh, dalam konteks bahaya "Many Politic" | Pernah dilakukan di hampir seluruh Kab/Kota di dalam Pemerintah Aceh |
| 5. | Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat | Pencapaiannya melalui ikut serta dalam berbagai Opini Surat kabar nasional | Harian Serambi Indonesia, koran Waspada (Koran Lokal), |

| No | Rincian Tugas | Pencapaian | Keterangan |
|----|---------------|---------------|-------------------------------|
| | | maupun daerah | Kompas (Surat kabar nasional) |

Sumber: Akademik FISIP Universitas Malikussaleh, 2013.

Lampiran 13

Dampak Penilaian Program Sertifikasi Dosen Dalam Berbagai Aspek di FISIP Universitas Malikussaleh

| No. | Aspek Penilaian Dampak Sertifikasi Dosen | Pencapaian (%) | Keterangan |
|-----|---|--------------------------------------|---|
| 1. | Kemampuan dosen dalam mengajar: a. Penguasaan Teori b. Pembuatan SAP | 65 % 60 % | Dilakukan pada setiap proses pengajaran serta pembuatan SAP diawal semester |
| 2. | Kinerja dosen dalam melaksanakan tugas a. Jumlah kehadiran mengajar b. Ketepatan waktu dalam mengajar | 70 % 65 % | Disetiap proses belajar mengajar |
| 3. | Keterlibatan dalam berbagai penelitian: a. Penelitian Mandiri b. Hibah bersaing c. Dosen muda d. Hibah penelitian tim Pascasarjana e. Hibah penelitian kerjasama antar perguruan Tinggi | 65 % 70 % 70 % 65 % 40 % | Semua penelitian bersumber dari DIKTI, kecuali penelitian mandiri (bebas) |
| 4. | Keterlibatan pengabdian masyarakat: a. Supervisor KKN b. Pemateri (kuliaah umum) | 70 % 65 % | Dilakukan pada setiap kegiatan KKN dan sosialisasi kepada masyarakat |

Sumber: Akademik FISIP Unimal, 2013.

Lampiran 14

Jumlah Penelitian di Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu poltik Universitas Malikussaleh dari tahun 2010-2013.

| No. | Program studi | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------|-----------------|------|------|------|------|
| 1. | Ilmu Adm Negara | - | 1 | - | 3 |
| 2. | Ilmu Komunikasi | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 3. | Ilmu Politik | 7 | 1 | - | 2 |
| 4. | Sosiologi | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 5. | Antropologi | 3 | 1 | 1 | - |
| Total | | 16 | 8 | 8 | 12 |

Sumber: Akademik FISIP Unimal, 2013

Lampiran 15

Jumlah dosen yang Terlibat Dalam Pengabdian Masyarakat di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

| No. | Pengabdian Masyarakat | Jumlah dosen yang terlibat dalam Kegiatan tersebut |
|-----|--|--|
| 1. | Supervisor dalam kegiatan KKN | 30 dosen FISIP Unimal yang terlibat dalam kegiatan KKN tahun 2013 ini, terbagi di di 3 kabupaten yaitu: Aceh Utara, Aceh Tengah, dan Bireuen. |
| 2. | Menjadi Pemateri tentang Pilkada Eksekutif (2012) dan sosialisasi penegakan syariat islam (2011) | Dosen yang terlibat dari berbagai kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, seperti: Pilkada eksekutif tahun 2012 berjumlah 17 serta sosialisasi penegakan syariat Islam di Aceh 2011 berjumlah 19 orang dosen |

Sumber: Akademik FISIP Unimal, 2013.

Lampiran 16

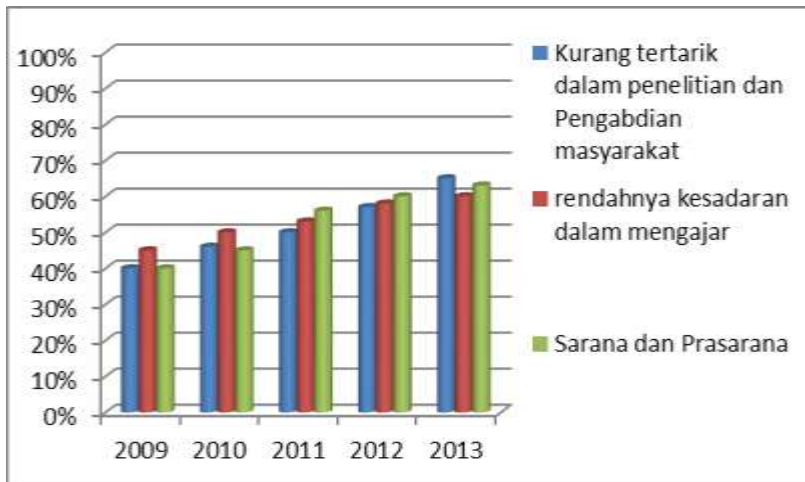
Dampak Program Sertifikasi Terhadap Perbaikan Kondisi Kegiatan Civitas Akademika FISIP Universitas Malikussaleh

| No. | Program | Bentuk Kegiatan yang dilakukan oleh FISIP Unimal | Dampak yang terjadi |
|-----|------------------------------|---|--|
| 1. | Pengajaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan proses belajar mengajar berdasarkan SAP 2. Pembenahan Kurikulum sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja 3. Usaha Peningkatan kinerja dosen dalam mengajar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya semua materi-materi perkuliahan ditiap semester 2. Terciptanya Kurikulum di FISIP Unimal sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. 3. Terciptanya kinerja dosen yang baik dalam mengajar |
| 2. | Penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan atau perbekalan tentang penelitian bagi dosen 2. Kerjasama serta Sosialisasi oleh LPPM Universitas Malikussaleh dengan FISIP terhadap informasi penelitian bagi para dosen. 3. Membentuk kelompok kecil di FISIP untuk untuk merangsang minat atau keinginan dosen untuk mealakukan penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen dapat memahami tentang pembuatan penelitian 2. Terjalin kerjasama yang baik antara LPPM Unimal dengan FISIP dalam penyediaan informasi penelitian 3. Terciptanya keinginan dosen untuk melakukan penelitian |
| 3. | Pengabdian kepada Masyarakat | Melaksanakan berbagai kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, seperti Pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata serta | Terwujudnya peran aktif dosen FISIP terhadap berbagai bentuk kegiatan pengabdian masyarakat |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | pelaksanaan penyampaian materi terhadap pemberdayaan masyarakat khususnya di Propinsi Aceh. | |
|--|--|---|--|

Sumber: Akademik FISIP Unimal, 2013

Lampiran 17



Persentase Penelitian Dosen di FISIP Universitas Malikussaleh

Lampiran 18

Jumlah Dosen Tersertifikasi Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh

| No | NIDN | Nama Dosen | NIP |
|----|------------|--------------------------|--------------------|
| 1. | 0017107103 | SAFUWAN | 197110172006041001 |
| 2. | 0018077802 | CUT SUKMAWATI | 197807182002122003 |
| 3. | 0003068005 | MARYAM | 198006032006042003 |
| 4. | 0015068201 | NUR HAFNI | 198206152006042001 |
| 5. | 0006077502 | MUHAMMAD NAZARUDDIN | 197507062003121001 |
| 6. | 0011017405 | AGUNG UTAMA LUBIS | 197401112006041002 |
| 7. | 0004017402 | DEDDY SATRIA M | 197503032002122002 |
| 8. | 0005057207 | MUHAMMAD ALI | 197205052002121002 |
| 9. | 0010047504 | Muhammad Rizwan, S.Ag.MA | 197504102003121002 |

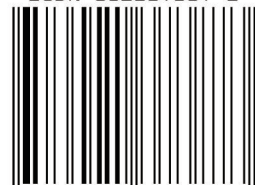
| | | | |
|-----|-------------|-----------------------------------|--------------------|
| 10. | 0001001750 | M HUSEN MR | 197501202005011007 |
| 11. | 0001007700 | ANISMAR | 197007102003121001 |
| 12. | 0002505680 | MUHAMMAD | 196805252002121004 |
| 13. | 0002401770 | ALFIAN | 197701242005011001 |
| 14. | 0009017303 | AMIRUDDIN KETAREN | 197301092005011001 |
| 15. | 0009047501 | TEUKU KEMAL FASYA | 197504092005011000 |
| 16. | 0009097201 | IBRAHIM CHALID | 197209092003121002 |
| 17. | 0026067801 | MURNIATI | 197806262005012003 |
| 18. | 0019106402 | M. Akmal, S.Sos.,MA | 196410092001121001 |
| 19. | 00171076210 | Drs Aiyub, M.Si | 196207172001121001 |
| 20. | 0023117303 | Iskandar Zulkarnaen, S.E.,M.Si | 197311232002121001 |
| 21. | 0031126827 | Dahlan A. Rahman, S.Ag.,M.Si | 196812312002121010 |
| 22. | 0015126405 | Ti Aisyah, S.Sos.,M.SP | 196412152001122001 |
| 23. | 0006027006 | Dr Muklir, S.Sos.,SH.,M.AP | 197002062002121002 |
| 24. | 0006056107 | Rasyidin, S.Sos.,MA | 196105062001121001 |
| 25. | 0006056806 | Fauzi, S.Sos.,MA | 196805062002121002 |
| 26. | 0012067604 | Ainol Mardhiah, S.Ag.,M.Si | 197606122005012004 |
| 27. | 0016087605 | Suadi, S.Ag.,M.Si | 197608132003121001 |
| 28. | 0001016726 | Drs. Tarmidi, M.S.P | 196712312002121009 |
| 29. | 0001077802 | Zulham, BA,MA | 197807012003121005 |
| 30. | 0001017305 | Muntasir, S.Ag,MA | 197301012002121002 |
| 31. | 0004017901 | Teuku Alfiady, S.Sos.MSP | 197901042005011002 |
| 32. | 0029057707 | Ferizaldi, SE,M.Si | 197705292003121003 |
| 33. | 0019096705 | Muhammad Hasyem, S.Sos,MSP | 196709192002121001 |
| 34. | 0025057803 | Subhani, S,Sos,M,Si | 197805252002121001 |
| 35. | 0014057704 | Dr.Nirzalin,M.Si | 197705142003121001 |
| 36. | 0012077210 | Fajri M Kasim, M.Ssc | 197212072005011002 |
| 37. | 0028127703 | Naidi Faisal, S.IP,M.Si | 197712282005011002 |

Sumhber: BAAK FISIP Universitas Malikussaleh, 2013.



Universitas Malikusaleh (Unimal) dalam meningkatkan mutu dan kualitas Pendidikan melaksanakan kebijakan pemerintah melalui pelaksanaan sertifikasi dosen yang di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam melaksanakan tugas Tridarma Perguruan Tinggi di Unimal. Fokus penelitian adalah: Sertifikasi Dosen Berdampak Terhadap Peningkatan Tri Dharma di FISIP Unimal. Hambatan Dalam Pelaksanaan Tri Dharma di FISIP Unimal. Serta upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Tri Dharma di FISIP Unimal. Tujuan Penelitian adalah Ingin mengetahui dampak Sertifikasi Dosen terhadap pelaksanaan kegiatan Tri dharma Perguruan Tinggi di FISIP Unimal. Ingin mengetahui hambatan dari Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di FISIP Unimal. Serta upaya penyelesaian hambatan tri dharma perguruan tinggi. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi secara langsung, wawancara dengan Pimpinan Fakultas ISIP Unimal dan dosen FISIP serta Dokumentasi. Teknik Verifikasi Data dengan Triangulation of data (melakukan pelacakan sumber data), Member cheking (melakukan pengecekan ulang terhadap anggota informan), Clarification of research bias (klarifikasi dari peneliti yang bias terutama yang berhubungan dengan fokus kajian).

ISBN 602137387-1



UNIMAL PRESS